



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

KATA PENGANTAR

Sebagai wujud penerapan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan akuntabel serta untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur menyusun Laporan Kinerja Tahun 2024. Laporan Kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 dan dikaitkan dengan Rencana Strategis Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur tahun 2021-2026.

Renstra BPBD menjadi dokumen acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan unit kerja BPBD pada periode tahun 2021 - 2026. Untuk mewujudkan tujuan yang tertuang dalam Renstra BPBD Kab. Luwu Timur, dijabarkan dalam 2 (dua) sasaran strategis, yaitu Meningkatnya Ketahanan Daerah menghadapi bencana dengan indikator Indeks Ketahanan Daerah dan Meningkatnya Layanan SPM Sub Urusan Bencana dengan indikator Indeks Capaian SPM Sub Urusan Bencana dan 1 (satu) sasaran pendukung yaitu Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah. Dalam pencapaian sasaran perlu menyesuaikan dan mempertimbangkan tantangan-tantangan yang ada dalam pencapaian target agar pelaksanaan berjalan lebih efektif dan efisien.

Penyusunan dan penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang berisi tentang prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan merupakan kewajiban setiap SKPD sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini dapat dijadikan bahan dalam peningkatan pelayanan dan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan program dan kegiatan ditahun mendatang.

Laporan Kinerja Tahun 2024 ini merupakan cerminan prestasi serta evaluasi terhadap berbagai program kerja pada Tahun Anggaran 2024, sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksanaan visi, misi dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran OPD sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi, maka Core Value ASN berAKHLAK yang merupakan nilai dasar ASN harus diterapkan dan merupakan Nilai mutlak yang harus dilaksanakan oleh ASN. Perilaku berAKHLAK akan memberikan arah bagi ASN dalam berperilaku, memberikan pelayanan yang lebih baik kepada Masyarakat, bertanggungjawab dan berintegritas.

Demikian Laporan Kinerja ini disampaikan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan laporan tersebut, semoga dapat bermanfaat, khususnya bagi BPBD Kabupaten Luwu Timur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Malili, 10 Februari 2025

KEPALA PELAKSANA,



Dr. APRIL, M. Kes

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19670707 200012 1 002

RINGKASAN EKSEKUTIF

VISI

**“Kabupaten Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju
Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya”**

MISI

MISI Ke- 3 RPJMD

**“Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan
yang berkualitas”**

MISI Ke- 4 RPJMD

“Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik”

NOTOFIKASI

Tercapai

Tidak Tercapai

1

SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN

- I. Meningkatkan ketahanan daerah menghadapi bencana
- II. Meningkatkan layanan SPM sub urusan bencana
- III. Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah
 - a. Meningkatkan upaya penyebaran informasi tentang bagian wilayah kabupaten/kota rawan bencana, kepada Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana
 - b. Meningkatkan upaya pencegahan dan mitigasi untuk mengurangi potensi korban jiwa, kerugian ekonomi dan kerusakan lingkungan akibat bencana di daerah rawan bencana
 - c. Terselenggaranya penanganan penyelamatan dan evakuasi korban bencana serta pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana
 - d. Terciptanya sistem pelayanan administrasi perkantoran yang memadai

2

SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN

- I. Indeks Ketahanan Daerah IKD) = 0,65 (106,55%)
- II. Indeks Capaian SPM Sub Urusan Bencana = 100%
- III. NILAI AKIP Perangkat Daerah = 83,30 (A)
 - a. Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana = 100%
 - b. Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana = 100%
 - c. Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender = 100%
 - d. Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar = 92,92%

3

1. Terlaksananya pelayanan informasi rawan bencana kepada warganegara yang berada dikawasan rawan bencana dan yang
2. Terlaksananya pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan pemerintah dan warganegara untuk mengurangi dampak
3. Terlaksananya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana sesegera mungkin bencana
4. Terlaksananya penataan sistem dasar penanggulangan bencana sesuai standar
5. Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun tepat
6. Tersedianya laporan keuangan perangkat daerah
7. Terlaksananya administrasi dan penatausahaan Barang Milik Daerah pada perangkat daerah
8. Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah
9. Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah
10. Terpenuhinya kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah
11. Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
12. Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang siap pakai

4

1. Cukupan warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana = 0,08%
2. Cukupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana = 4,36%
3. Cakupan warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsive gender = 100%
4. Cukupan sistem dasar penanggulangan bencana sesuai SOP kebencanaan = 33,33%
5. Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu = 100%
6. Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik = 96,87%
7. Persentase BMD yang diadministrasikan sesuai tandar = 100%
8. Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah = 80%
9. Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah = 99,16
10. Persentase BMD-Perangkat Daerah Penunjang yang Terpenuhi = 68,75%
11. Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah = 99,91%
12. Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik = 98,71%

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	<i>hal. i</i>
DAFTAR ISI	<i>iv</i>
DAFTAR TABEL	<i>v</i>
DAFTAR GAMBAR	<i>vii</i>
DAFTAR GRAFIK	<i>viii</i>
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Tugas dan Fungsi	1
1.2 Struktur Organisasi	1
1.3 Aspek Strategis Organisasi	4
1.4 Isu Strategis/Permasalahan	5
1.5 Sistematika Laporan	6
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Target Kinerja tahun 2021-2026	8
1. Visi dan Misi	9
2. Indikator Kinerja Sasaran	10
B. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024	12
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	15
3.2 Analis Capaian Kinerja	16
 BAB IV PENUTUP	97
 LAMPIRAN	101

DAFTAR TABEL

	<i>hal.</i>
Tabel 1 Tujuan, Sasaran, indikator kinerja sasaran, dan target kinerja sasaran RENSTRA BPBD Kabupaten Luwu Timur 2021-2026	11
Tabel 2 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024	12
Tabel 3 Program dan Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2024	13
Tabel 4 Program dan Pagu Anggaran Pergeseran Tahap I Setelah Perubahan Tahun 2024	13
Tabel 5 Tingkat Akuntabilitas Kinerja	15
Tabel 6 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024	16
Tabel 7 Hasil Penilaian Indeks Ketahanan Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2024....	20
Tabel 8 Perbandingan Target dan Realisasi tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya.	20
Tabel 9 Perbandingan Capaian Kinerja s.d Tahun 2024 terhadap Target Jangka Menengah (2021 – 2026)	23
Tabel 10 Nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) 24 Kab/Kota	24
Tabel 11 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 (Berdasarkan DPPA-SKPD TA. 2024).....	30
Tabel 12 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	30
Tabel 13 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 (berdasarkan pergeseran Tahap I setelah Perubahan Tahun TA.2024	31
Tabel 14 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	31
Tabel 15 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024 dengan tahun-tahun Sebelumnya	37
Tabel 16 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 terhadap Target Jangka Menengah (2021-2026)	38
Tabel 17 Realisasi Target SPM Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	39

Tabel 18	Alokasi Anggaran Bidang urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	40
Tabel 19	Kendala Permasalahan dan Solusi SPM urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	41
Tabel 20	Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan.....	61
Tabel 21	Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan.....	61
Tabel 22	Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan.....	62
Tabel 23	Capaian Indikator Kinerja Sasaran	64
Tabel 24	Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun-Tahun sebelumnya	65
Tabel 25	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Jangka Menengah (2021 - 2026)	66
Tabel 26	Pencapaian Kinerja dan Anggaran	68
Tabel 27	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	69
Tabel 28	Capaian Indikator Kinerja Program Pendukung.....	70
Tabel 29	Realisasi Anggaran Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2024.....	78
Tabel 30	Permasalahan Solusi	86

DAFTAR GRAFIK

	<i>hal.</i>
Grafik 1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tangka Pendidikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024.....	2
Grafik 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Badan Penanngulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur 2024.....	2
Grafik 3 Capaian Kinerja Sasaran Strategis I Tahun 2024.....	17
Grafik 4 Prioritas Penilaian Indeks Ketahanan Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2024..	21
Grafik 5 Trend Nilai IRB Kabupaten Luwu Timur 2020 s.d 2024.....	27
Grafik 6 Trend Nilai IKD Kabupaten Luwu Timur 2018 s.d 2024.....	27
Grafik 7 Capaian Kinerja Indeks Capaian SPM Sub Urusan Bencana Tahun 2024...	25
Grafik 8 Capaian Kinerja Program Penanggulangan Bencana Tahun 2024.....	44
Grafik 9 Capaian Kinerja Sasaran 3 Tahun 2024.....	64
Grafik 10 Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2024 (Berdasarkan APBD Perubahan Anggran).....	77
Grafik 11 perbandingan Realisasi Anggran Tahun 2024 (Pergeseran Tahap Pertama Setelah Perubahan Anggran).....	77



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 TUGAS DAN FUNGSI

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dipimpin oleh Kepala Badan yang secara *ex officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur. Berdasarkan peraturan tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai Tugas dan fungsi sebagai berikut :

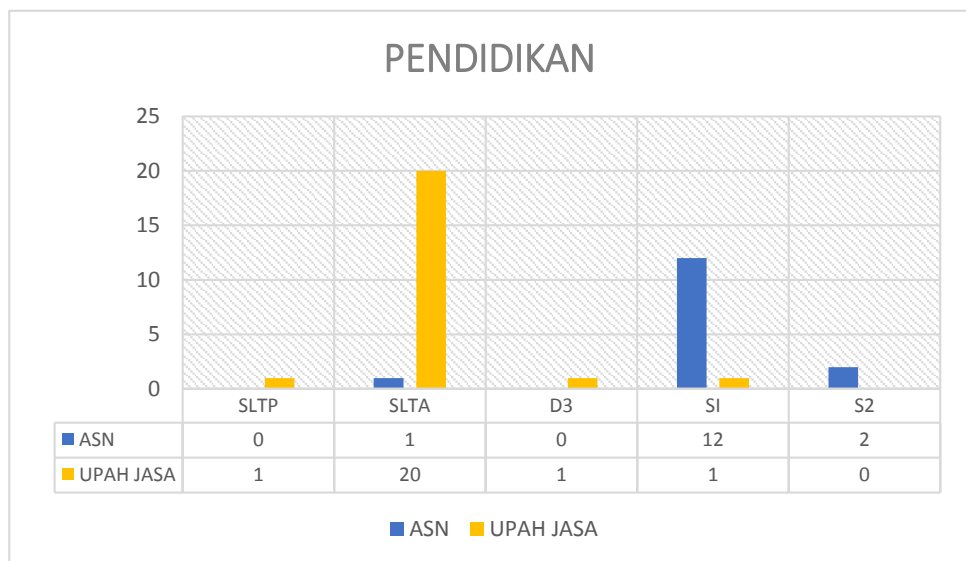
- Tugas* : membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang penanggulangan bencana daerah,
- Fungsi* : - Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- Pengorganisasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

1.2 STRUKTUR ORGANISASI

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 74 Tahun 2021.

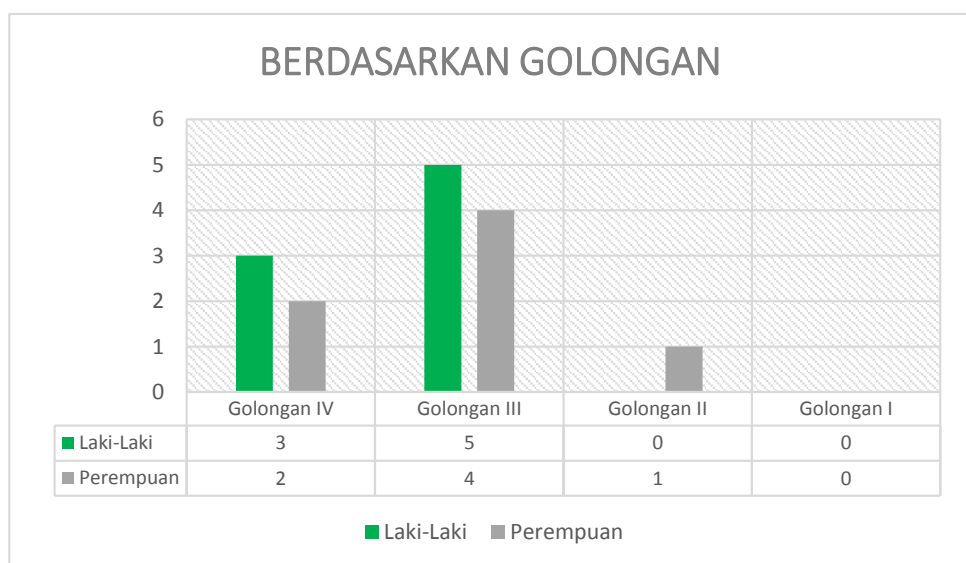
Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, berdasarkan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 didukung dengan jumlah pegawai sebanyak 38 orang, terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) 14 orang, PPPK 1 org dan Tenaga Upah Jasa 23 orang (Tenaga Administrasi 1 orang, Cleaning Service 1 orang, Sopir 1 orang dan Tim Reaksi Cepat 21 orang). Struktur tingkat pendidikan SDM Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur tercantum pada diagram berikut :



Grafik. 1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024



Grafik. 2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024

Gambar.1
 Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur
 Tahun 2024



1.3 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/ Kota dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan **oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana**. BPBD dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008, menggantikan **Satuan Koordinasi Pelaksana Penanganan Bencana** (Satkorlak) di tingkat Provinsi dan **Satuan Pelaksana Penanganan Bencana** (Satlak PB) di tingkat Kabupaten / Kota, yang keduanya dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005.

Oleh karena hal tersebut, pemerintah membuat Undang-Undang tentang penanggulangan bencana yang dituangkan pada Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pasal 27 UU tersebut menegaskan bahwa setiap orang berkewajiban untuk melakukan kegiatan penanggulangan bencana. UU ini juga mengatur keterlibatan pihak swasta, lembaga-lembaga non-pemerintah dan lembaga internasional dalam penanggulangan bencana. Undang-Undang atau Peraturan ini dibuat sebagai payung hukum mengenai proses penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia. Penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Undang-Undang ini dimulai dari prabencana, pada saat bencana hingga proses pemulihan pasca bencana diatur di dalamnya. BNPB dan BPBD dirancang untuk penanggulangan bencana secara menyeluruh yang merupakan perubahan dari pendekatan konvensional yaitu tanggap darurat menuju perspektif baru. Dimana perspektif ini memberi penekanan merata pada semua aspek penanggulangan bencana dan berfokus pada pengurangan resiko serta penanganan korban. Kinerja organisasi merupakan salah satu sorotan yang paling tajam dalam pelaksanaan pemerintahan menyangkut kesiapan, jumlah pendidikan dan profesionalisme. BPBD Kabupaten Luwu Timur sebagai salah satu organisasi pemerintahan yang berwenang dalam penanggulangan bencana, memiliki peran dalam penyelenggaraan penanggulangan atas berbagai bencana di wilayah Kabupaten Luwu Timur. Pelaksanaan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Luwu Timur diperlukan kesiapan yang mantap demi terselenggaranya pelaksanaan pemerintahan yang baik.

Dalam penanganan bencana dibutuhkan kesiagaan dan kecepatan seluruh unsur aparat dari berbagai instansi tanpa terkecuali. Sehingga ketika bencana tiba sudah tidak perlu birokrasi administrasi, koordinasi dan himbauan lagi. Akan tetapi yang terpenting adalah aparat akan bisa hadir dengan cepat di tengah masyarakat ketika bencana terjadi hal itulah yang perlu dibenahi dari sekarang dan itu menjadi tugas BPBD yang bukan hanya sekedar menanggulangi saat terjadi bencana namun juga melakukan koordinasi mulai dari sebelum terjadi bencana, sampai pasca bencana.

1.4 ISU STRATEGIS/PERMASALAHAN

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur merupakan unsur pendukung dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 telah diatur tugas pokok dan fungsi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur antara lain membantu Bupati dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan penanggulangan bencana serta berfungsi merumuskan kebijakan teknis penanggulangan bencana dengan memberikan dukungan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya BPBD Kabupaten Luwu Timur mendukung dan mewujudkan tercapainya sasaran strategis Daerah Kabupaten Luwu Timur yaitu **“Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana (S7)”**. Namun dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Luwu Timur masih terdapat permasalahan antara lain :

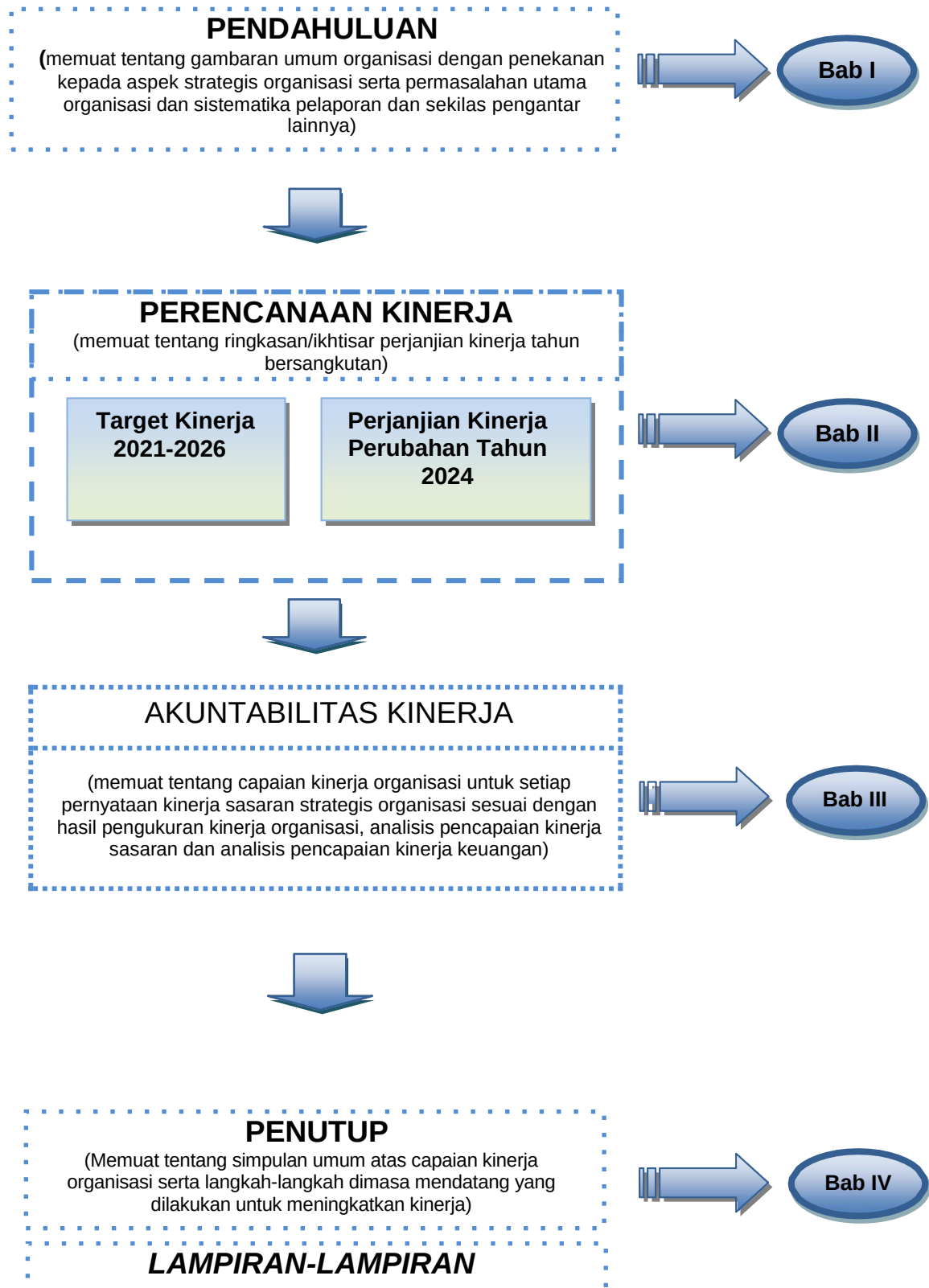
1. Belum optimalnya penerapan Standar Pelayanan Minimal pada sub urusan bencana;
2. Tingginya tingkat kerawanan bencana Kabupaten Luwu Timur
3. Meningkatnya kerusakan lingkungan yang berdampak pada meningkatnya kejadian bencana setiap tahun
4. Belum optimalnya upaya pencegahan dan mitigasi dalam rangka pengurangan risiko bencana
5. Belum optimalnya upaya kesiapsiagaan dan penanganan darurat untuk menghadapi bencana secara mandiri dan proaktif
6. Belum memadainya mekanisme pendukung dalam penyelenggaraan pemulihan dampak bencana
7. Keterbatasan sumber daya logistik dan peralatan
8. Belum optimalnya sinergitas dan koordinasi lintas sektor
9. Luasnya cakupan wilayah pelayanan penanggulangan bencana

1.5 SISTEMATIKA LAPORAN

Laporan Kinerja ini pada dasarnya adalah suatu media untuk mengkomunikasikan capaian kinerja BPBD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024. Capaian Kinerja tersebut dibandingkan dengan Rencana Kinerja Tahun 2024 yang telah diselaraskan dengan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024, yang merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan di masa datang. Artinya, terhadap capaian yang telah mencapai atau melebihi target (sudah baik) agar tetap dipertahankan, sedangkan terhadap capaian kinerja yang masih di bawah target untuk masa mendatang dapat dilakukan perbaikan melalui strategi-strategi yang lebih baik.

Memperhatikan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Maka Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 ini disusun dengan sistematika penulisan dengan bagan sebagai berikut :



BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

Peningkatan kualitas sistem akuntabilitas selalu menjadi perhatian utama setiap perangkat daerah, termasuk BPBD. Peningkatan ini terlihat dari penajaman program pada RENSTRA 2021-2026

Program pada Renstra BPBD periode 2021-2026 berbeda dari Renstra periode sebelumnya yaitu diselaraskan dengan Program Nasional yang berkaitan dengan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Urusan Bencana dan disesuaikan juga dengan Program Prioritas (KP1) Kepala Daerah. Berdasarkan Renstra BPBD 2021-2026, mencakup 2 (dua) sasaran utama yaitu Meningkatnya Ketahanan Daerah Menghadapi Bencana dan Meningkatnya Layanan SPM Sub Urusan Bencana.

A. TARGET KINERJA TAHUN 2021-2026

Penyusunan Renstra BPBD Kabupaten Luwu Timur yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Luwu Timur. Hal ini merupakan upaya untuk mengefektifkan dan mengarahkan sumber daya BPBD dalam mewujudkan peran BPBD sebagai pelaku utama dalam penanggulangan bencana dan membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang penanggulangan bencana daerah. Dalam melaksanakan tugas, BPBD menyelenggarakan dua fungsi utama yaitu perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien serta pengorganisasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Fungsi tersebut diformulasikan ke dalam tujuan dan sasaran BPBD dalam rangka mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah dalam RPJMD 2021-2026. Visi yaitu keadaan umum yang diinginkan pada akhir tahun 2026 atau setelahnya dan misi atau rumusan umum tentang upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, strategi atau program-program indikatif untuk mencapai visi dan misi.

1. Pernyataan Visi

Visi merupakan suatu keadaan atau harapan yang harus diwujudkan pada masa yang akan datang, dengan kata lain visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif.

**“Kabupaten Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju
Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya”**

2. Pernyataan Misi

Misi adalah segala sesuatu (Stratrgi, tindakan) yang harus dilakukan untuk mewujudkan visi. Misi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Luwu Timur yaitu

MISI Ke- 3 RPJMD

**“Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan
lingkungan yang berkualitas”**

Sasaran 7 RPJMD

**“Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan
bencana”**

MISI Ke- 4 RPJMD

“Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik”

Sasaran 8 RPJMD

“Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan”

Sasaran 9 RPJMD

“Meningkatnya kualitas pelayanan publik”

3. Indikator Kinerja Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran yang efektif harus memenuhi kriteria spesifik dan dapat terukur. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Penetapan indikator Kinerja harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Adapun hubungan antara tujuan, sasaran, Indikator Kinerja Tujuan dan Target Jangka Menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026 yang tertuang dalam RENSTRA yang berkaitan dengan Visi dan Misi yang diemban oleh BPBD Kab. Luwu Timur dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.
Tujuan, Sasaran, indikator kinerja sasaran, dan target kinerja sasaran RENSTRA BPBD Kabupaten Luwu Timur 2021-2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Sasaran	Indikator Kinerja sasaran	Kondisi Awal 2020	Target Kinerja Sasaran						Kondisi Akhir 2026
							2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Menurunkan risiko bencana daerah	Indeks Risiko Bencana (IRB)	202	Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,42	0,43	0,44	0,45	0,46	0,48	0,50	0,50
2.	Meningkatkan penyelenggaraan SPM sub urusan bencana	Persentase pemenuhan Layanan SPM Sub Urusan Bencana(%)	100	Meningkatnya layanan SPM sub urusan bencana	Indeks Capaian SPM Sub Urusan bencana (%)	-	100	100	100	100	100	100	100
3.	Meningkatkan Tata Kelola pemerintahan yang berorientasi pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	70(BB)	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	NILAI AKIP Perangkat Daerah	70	70	75	78	80	80	80	80

B. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Pengukuran pencapaian tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Renstra dilakukan melalui pengukuran pencapaian sasaran kegiatan dalam hal ini melalui pengukuran indikator kinerja kegiatan. Untuk menguatkan pencapaian sasaran strategis, di tahun 2024 disusun perjanjian kinerja perubahan sebagai dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu, dokumen penetapan kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran kegiatan, kegiatan, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Target kinerja yang ada dalam perjanjian menunjukkan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran sesuai indikator kinerja.

Perjanjian Kinerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024 yang merupakan kesanggupan untuk melaksanakan kinerja, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024, sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 2.
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,61 (sedang)
2.	Meningkatnya layanan SPM sub urusan bencana	Indeks Capaian SPM Sub Urusan bencana (%)	100%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	83,06 (A)

Penetapan kinerja dengan sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024 didukung dengan pembiayaan APBD Kabupaten Luwu Timur sebesar **Rp. 13.055.467.550,-** (*Tiga Belas Milyar Lima Puluh Lima Juta Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah*), terdiri dari belanja pegawai **Rp 1.995.336.482,-** belanja barang dan jasa **Rp. 2.295.631.068,-** dan belanja modal **Rp 8.764.500.000,-**. Adapun program dan anggaran secara lengkap disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.
Program dan Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2024

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KET.
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	3.740.477.020,-	APBD-P
2	Program Penanggulangan Bencana	1.335.990.530,-	APBD-P
JUMLAH		5.067.467.550,-	

Tabel 4
**Program dan Pagu Anggaran Pergeseran Tahap I
Setelah Perubahan Tahun 2024**

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KET.
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	3.740.477.020,-	APBD-Pergeseran I Setelah Perubahan
2	Program Penanggulangan Bencana	9.314.990.530,-	APBD-Pergeseran I Setelah Perubahan (Dana Hibah RR)
JUMLAH		13.055.467.550,-	

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dikatakan mampu mengkomunikasikan capaian kinerja unit kerja secara jujur, objektif, akurat dan transparan dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, apabila dalam penyajiannya memenuhi prinsip-prinsip dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu **pertama**, Prinsip Lingkup Pertanggungjawaban, yang mengandung pengertian bahwa hal-hal yang dilaporkan harus proporsional dengan lingkup kewenangan dan tanggungjawab masing-masing dan memuat baik mengenai kegagalan maupun keberhasilan, **kedua**, Prinsip Prioritas, yang mengandung pengertian bahwa yang dilaporkan adalah hal-hal yang penting dan relevan bagi pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban instansi yang diperlukan untuk upaya-upaya tindak lanjutnya, **ketiga**, Prinsip Manfaat, yang mengandung pengertian bahwa manfaat laporan harus lebih besar daripada biaya penyusunannya dan laporan harus mempunyai manfaat bagi peningkatan pencapaian kinerja.

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang dimaksud, yang ditetapkan dalam Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur melaksanakan kewajiban dengan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran capaian kinerja Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 digunakan untuk mengetahui keberhasilannya dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran. Indikator kinerja yang digunakan adalah indikator kinerja sasaran, yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026. Sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

a. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja Tahun 2024 merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2024 yang telah disepakati bersama, dalam hal ini antara Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Luwu Timur dengan Bupati Luwu Timur. Tingkat akuntabilitas kinerja instansi diukur dari setiap komponen yang ada dengan kategori sebagai berikut :

Tabel. 5
Tingkat Akuntabilitas Kinerja

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1.	AA	>90	Sangat memuaskan
2.	A	>80-90	Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3.	BB	>70-80	Sangat baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal
4.	B	>60-70	Baik, akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan
5.	CC	>50-60	Cukup (memadai), akuntabilitas kerjanya cukup memadai, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban
6.	C	>30-50	Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tak perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar
7.	D	0-30	Sangat kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu perbaikan yang sangat mendasar

Adapun capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel. 6
Pengukuran Capaian Tahun 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI TAHUN 2024	CAPAIAN (%)	NOTIFIKASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,61	0,65	106,55	●
2.	Meningkatnya layanan SPM sub urusan bencana	Indeks Capaian SPM Sub Urusan bencana (%)	100	100	100	●
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	83,06	83,30	100,2	●

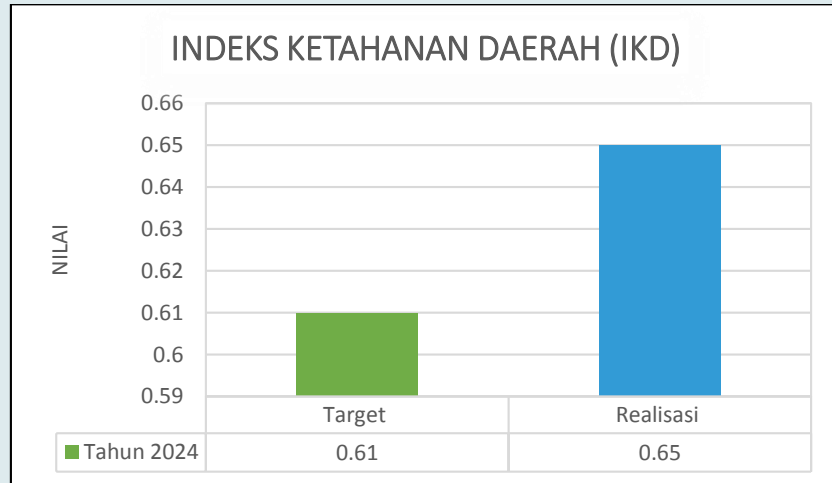
Keterangan : ● Mencapai/Melampaui Target ; ● Belum Mencapai Target

3.2 Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian sasaran strategis dan sasaran program. Dalam menyimpulkan keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian tiga sasaran strategis dilakukan dengan mengukur dan menganalisa capaian indikator *outcome*. Analisis capaian sasaran program juga dilakukan sebagai pendukung capaian kinerja sasaran strategis yang dilakukan terhadap indikator kinerja utama. Analisis juga dilakukan terhadap indikator kinerja yang tidak secara langsung mendukung capaian kinerja, namun berpengaruh terhadap perwujudan sasaran program. Analisis efisiensi penggunaan input berupa sumber daya keuangan dan manusia dilakukan terhadap tiap indikator kinerja dengan cara membandingkan capaian indikator kinerja dengan capaian penggunaan sumber daya. Efisiensi sumber daya terjadi manakala capaian indikator kinerja lebih tinggi dari pada capaian penggunaan sumber daya. Analisis efisiensi dilakukan secara terpisah antara sumber daya keuangan dan sumber daya manusia.

Sasaran Strategis I

Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana



Grafik. 3
Capaian Kinerja Sasaran Strategis I Tahun 2024

INDEKS KETAHANAN DAERAH (IKD)

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024

Formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut : **“Nilai Indeks Ketahanan Daerah”**

Indikator sasaran BPBD Kabupaten Luwu Timur adalah Indeks Ketahanan Daerah dengan target tahun 2024 adalah 0,61 dan realisasi sebesar 0,65 dengan persentase capaian kinerja 106,55%.

Realisasi yang diperoleh merupakan hasil dari pelaksanaan Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) secara mandiri yang dilaksanakan pada Bulan November 2024 melalui FGD Penilaian Indeks Ketahanan Daerah yang diikuti oleh OPD terkait. Dalam pelaksanaan FGD didampingi oleh Fasilitator Nasional dan diperoleh hasil 0,65 (sedang). Hasil penilaian tersebut selanjutnya diverifikasi oleh BPBD Provinsi Sulawesi-Selatan, kemudian diverifikasi akhir oleh BNPB pada Bulan Desember 2024. Setelah itu hasilnya dirilis oleh BNPB melalui BUKU IRBI Tahun 2024 yang diterbitkan pada Awal Tahun 2025.

Capaian target tersebut diperoleh dari penginputan Tools 71 Indikator berdasarkan baseline data 2018-2024 yang dimutakhirkan setiap tahun, dan data tersebut bersumber dari OPD terkait seperti Bapelitbangda, Dinas PU & PR, Dinas Kesehatan, Dinas Perkimtan, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan, DLH, Satpol PP, Dinas DAMKAR & Penyelamatan, TNI/POLRI dsb.

Penginputan hasil penilaian IKD dilakukan melalui aplikasi inaRISK yaitu suatu platform yang digunakan untuk menilai kapasitas daerah secara mandiri. Hasil IKD nantinya tersimpan dalam server dan dapat diakses kembali oleh masing-masing daerah sehingga ini memudahkan proses pengarsipan dan pemutakhiran nilai IKD.

Indeks Ketahanan Daerah adalah instrument untuk mengukur kapasitas daerah dengan asumsi bahwa bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan di daerah tersebut kondisinya tetap. **INDEKS KETAHANAN DAERAH (IKD)** merupakan bagian **dari perhitungan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)**. IKD dinilai setiap tahun untuk mengukur keberhasilan capaian kinerja penanggulangan bencana. **IKD** aspek penting: merupakan komponen pada **kajian kapasitas** di dalam KRB **data input** dalam **perhitungan IRBI**. Penilaian IKD dilakukan dengan mekanisme ‘pemutakhiran’ bukan pengisian dari awal. Hasil penilaian akan diverifikasi oleh BPBD Provinsi dan BNPB, sehingga nilai bisa berubah. Nilai IKD yang baik adalah yang selalu meningkat, sehingga baseline yang rendah pun tidak masalah

Salah satu strategi dalam menurunkan Indeks Risiko Bencana adalah peningkatan kapasitas Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana melalui Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) yang merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten, kota dan provinsi.

Dalam penilaian Indeks Ketahanan Daerah terdapat 71 indikator yang dipedomani dengan 7 program prioritas yaitu : Penguatan kelembagaan dan kebijakan, Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu, Pengembangan sistem informasi diklat dan logistik, Penanganan tematik kawasan rawan bencana, Peningkatan efektifitas pencegahan dan mitigasi bencana, Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana serta Pengembangan sistem pemulihan bencana.

Adapun hasil dari penilaian indeks kapasitas penanggulangan bencana di Kabupaten Luwu Timur adalah :

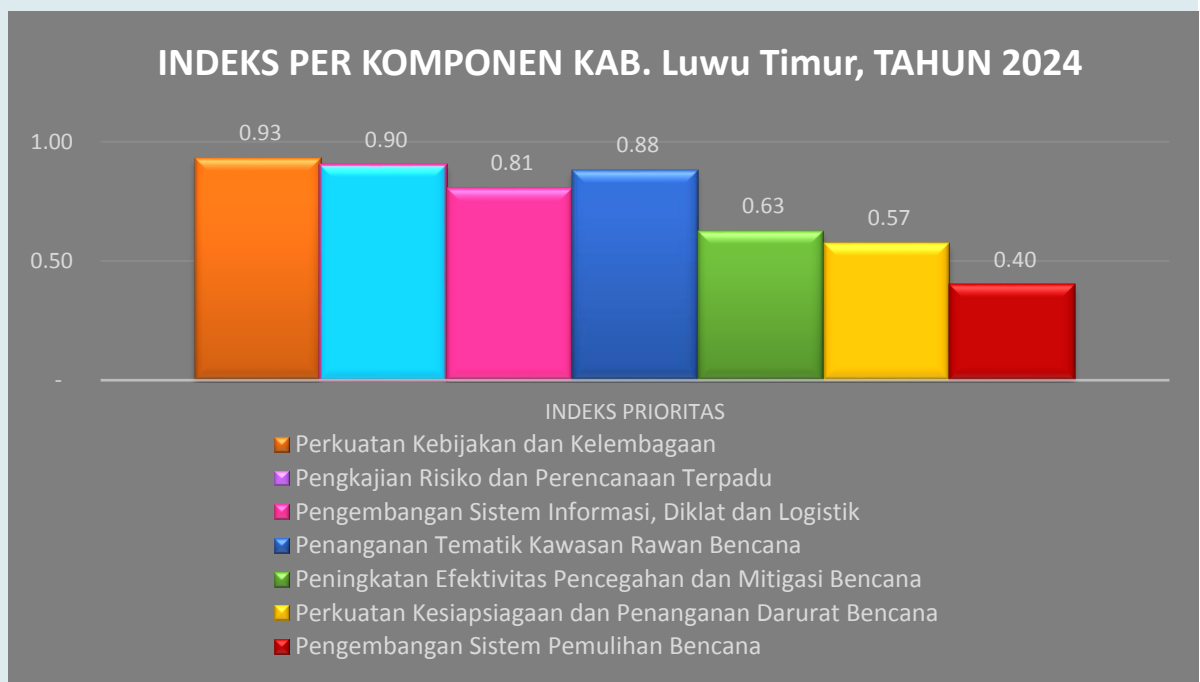
1. Penguatan kelembagaan dan kebijakan, yaitu :
 - Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2020 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah
 - Peraturan Bupati Nomor 74 tahun 2021 tentang SOTK BPBD

- Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2011 tentang RTRW Kab. Luwu Timur 2011-2031
 - Rencana Detail Tata Ruang 2015-2025
 - Rencana Detail Tata Ruang Wotu, Malili, Wasuponda, Towuti, Mangkutana, Tomoni dan Tomoni Timur
 - Perda Nomor 7 tahun 2014 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup
 - Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2010 tentang bangunan Gedung
 - Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana
 - Perbup BTT Nomor 38 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran , pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga
 - Perbup Nomor 34 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 3 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
 - SK Kepala Dinas Kesehatan Nomor 094/Dinkes/115/XI/2022 tentang Klaster Kesehatan dalam penanggulangan bencana
 - SK Bupati Luwu Timur Nomor 180/VII/Tahun 2018 tentang SOP Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2. Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu, yaitu :
- Dokumen Kajian Risiko Bencana Kab. Luwu Timur
 - Peta Bahaya/Peta Risiko Bencana Kab. Luwu Timur
 - Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kab. Luwu Timur
3. Pengembangan sistem informasi diklat dan logistik, yaitu :
- PUSDALOPS BPBD
 - Pelatihan Penanggulangan Bencana setiap tahun
 - Gladi Penanggulangan Bencana setiap tahun
 - Pengadaan kebutuhan logistik dan peralatan bencana setiap tahun
 - Penyimpanan/Gudang Logistik BPBD
 - Pemeliharaan peralatan dan suplay logistik secara periodik
 - Kemampuan pemenuhan pangan daerah untuk kebutuhan darurat.
4. Penanganan tematik kawasan rawan bencana, yaitu :
- Penataan Ruang berbasis Pengurangan Risiko Bencana
 - Pembentukan Desa Tangguh Bencana

- Rumah Sakit terakreditasi (RS. I Lagaligo dan RS. Primaya Hospital Inco Soroako)
 - Puskesmas terakreditasi 17 dari 18 Puskesmas
 - Satuan Pendidikan Aman Bencana Kabupaten Luwu Timur
 - Pembentukan Forum Risiko Bencana Tingkat Kabupaten
 - Forum Pengurangan Risiko Bencana Tingkat Desa
5. Peningkatan efektifitas pencegahan dan mitigasi bencana, yaitu :
- Rehabilitasi tanggul sungai
 - Normalisasi/Restorasi sungai
 - Pembangunan Bendung Sungai
 - Bangunan penahan gelombang (Pembangunan Sea Wall Pantai Lemo Desa Mabonta)
 - Bangunan Perkuatan Tebing Sungai
 - Pembangunan Embung
6. Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana, yaitu :
- Dokumen Rencana Kontigensi Banjir
 - Dokumen Rencana Kontijensi Gempa Bumi
 - Sistem Peringatan Dini Banjir di Sungai Kalaena (Sirine Banjir dan Sensor TMA Sungai)
 - EWS INA Tews (Sistem Peringatan Dini Gempa Bumi yang Berpotensi Tsunami)
 - Pelaksanaan Simulasi, Sosialisasi, Pelatihan, Gladi kesiapsiagaan
 - Pemasangan Rambu-Rambu dan Papan Himbauan Peringatan Bencana
 - RTD PT. Vale Indonesia mengenai kegagalan Bendungan
 - Penentuan Status Darurat Bencana
 - Penerapan Sistem Komando Operasi Darurat
 - Pengerahan Tim Reaksi Cepat ke lokasi bencana
 - Pengerahan Tim SAR/BASARNAS
 - Pengerahan Bantuan Masyarakat dan Dunia Usaha
 - Penghentian Status Darurat Bencana
7. Pengembangan sistem pemulihan bencana, yaitu :
- Perbaikan rumah penduduk (pasca bencana)
 - Bantuan Keuangan untuk korban bencana.

Mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah terkait kebencanaan yaitu Indeks Risiko Bencana, maka BPBD beserta stakeholder lainnya mempunyai tugas untuk menurunkan Nilai IRB Kabupaten Luwu Timur melalui peningkatan Kapasitas penanggulangan bencana di Kabupaten Luwu Timur melalui Penilaian Indeks Ketahanan Daerah. Hasil dari penilaian IKD akan berpengaruh terhadap penurunan Nilai IRB Kabupaten Luwu Timur. Nilai IRB Kabupaten Luwu Timur tahun 2024 adalah 133,38 dari target 150, dengan persentase capaian 112,46%.

Nilai IRB Kabupaten Luwu Timur tersebut mengalami penurunan karena adanya upaya dan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur khususnya BPBD Kabupaten Luwu Timur untuk melakukan Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD), yang dilaksanakan setiap tahunnya. **“Jika Indeks Ketahanan Daerah meningkat, maka Indeks Resiko Bencana akan menurun”**. IKD dan IRBI menjadi **RAPOR** bagi Pemerintah Daerah di bidang penanggulangan bencana. **Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Luwu Timur telah berinvestasi dalam Pengukuran Risiko Bencana di Kabupaten Luwu Timur. Pengukuran IRB dan IKD merupakan ukuran keberhasilan capaian kinerja Penanggulangan Bencana di Kabupaten Luwu Timur.**



Grafik. 4
Prioritas Penilaian Indeks Ketahanan Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2024

NO.	PRIORITAS	INDEKS PRIORITAS	INDEKS KAPASITAS DAERAH	TINGKAT KAPASITAS DAERAH
1	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	0,93	0,65	SEDANG
2	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	0,90		
3	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	0,81		
4	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0,88		
5	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0,63		
6	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0,57		
7	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0,40		

Tabel. 7
Hasil Penilaian Indeks Ketahanan Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2024

2. Perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya

Tabel. 8
Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024 dengan tahun-tahun Sebelumnya

Sasaran I :	Meningkatnya Ketahanan Daerah menghadapi Bencana												Target Tahun 2024
Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			
	Targ et	Realis asi	Capai an	Target	Realis asi	Capai an	Targ et	Realis asi	Capaia n	Targ et	Realis asi	Capai an	
Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,43	0,43	100 %	0,44	0,44	100 %	0,45	0,60	133,33 %	0,61	0,65	106,55 %	0,61 (seda ng)

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dijelaskan bahwa perbandingan capaian Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya, terdapat peningkatan. Ini berarti bahwa setiap tahunnya beberapa indikator penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) terpenuhi dan dilaksanakan di Kab. Luwu Timur. Nilai IKD bisa meningkat ataupun menurun tergantung pada pelaksanaan Program Penanggulangan Bencana di daerah. Nilai IKD diperoleh melalui pelaksanaan FGD untuk Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Tahun 2024, yang dilaksanakan pada bulan November 2024 dan diverifikasi oleh BPBD Provinsi Sulawesi Selatan dan selanjutnya diverifikasi oleh BNPB pada bulan Desember 2024. Setelah itu hasilnya dirilis pada awal tahun 2025.

3. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah

Berdasarkan realisasi sampai dengan Tahun 2024 jika dibandingkan dengan target yang direncanakan sampai dengan tahun 2026, telah melampaui target. Dan upaya yang dilakukan adalah melakukan pemutakhiran Nilai IKD melalui FGD Penilaian Indeks Ketahanan Daerah setiap tahunnya, agar 7 prioritas dengan 71 indikator dan 284 Pertanyaan dapat dipenuhi secara bertahap, yang pada akhirnya dapat menurunkan Indeks Risiko Bencana Kabupaten Luwu Timur.

Adapun perbandingan antara target dan capaian Tahun 2024 dengan target jangka menengah pada Renstra BPBD Kabupaten Luwu Timur 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 9
Perbandingan Capaian Kinerja s.d Tahun 2024 Terhadap Target Jangka Menengah (2021 – 2026)

Sasaran I :	Meningkatnya Ketahanan Daerah menghadapi Bencana		Target Akhir Renstra 2026	% Capaian s/d 2024 terhadap target akhir Renstra 2026
Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi			
	Tahun 2024	Realisasi sampai dengan Tahun 2024		
Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,65	0,65	0,50 (sedang)	130%

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini Dengan Target Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota

Dalam Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) tidak ditetapkan Standar Nasional tetapi hanya score penilaian yaitu 0,01 s.d 0,39 kategori **Rendah**, 0,40 s.d 0,79 kategori **Sedang** dan 0,8 s.d 1 kategori **Tinggi**. Dan pada tahun 2024, Nilai IKD Kabupaten Luwu Timur telah mencapai angka yaitu 0,65 dengan predikat sedang.

Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) mempunyai Timeline penilaian setiap tahunnya yaitu proses pengumpulan data dan penilaian IKD sampai dengan bulan September, selanjutnya pengumpulan dan Verifikasi IKD bulan Oktober s.d November oleh BPBD Provinsi dan pada bulan Desember dilakukan verifikasi, perhitungan dan publikasi oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Nilai Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 yaitu 0,65 dengan predikat sedang dari target yang direncanakan sebesar 0,61 dengan persentase capaian kinerja 106,55%. Nilai yang diperoleh Kabupaten Luwu Timur lebih tinggi jika dibandingkan dengan Nilai Indeks Ketahanan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 0,42 (sedang) yang merupakan hasil rata-rata nilai IKD dari 24 Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi-Selatan. Dan bila dibandingkan dengan 24 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, maka Nilai IKD Kabupaten Luwu Timur berada pada peringkat I. Hal ini bisa tercapai karena Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam hal ini BPBD Kab. Luwu Timur telah menetapkan IKD sebagai Indikator Kinerja Utama. Didukung dengan penganggaran untuk pelaksanaan Sosialisasi dan FGD Penilaian Indeks Ketahanan Daerah yang didampingi oleh Fasilitator Nasional dan Daerah. Pada pelaksanaan FGD tersebut menghadirkan OPD terkait sehingga diperoleh data dan informasi pendukung yang lebih akurat dan lengkap. Adapun perbandingan Nilai IKD Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel. 10
Nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) 24 Kab/Kota

KABUPATEN/KOTA	NILAI IKD TAHUN 2024
LUWU TIMUR	0,65
Luwu Utara	0,63
Kota Palopo	0,57
Soppeng	0,56
Wajo	0,56
Barru	0,51
Pinrang	0,48
Kota Makassar	0,46
Kepulauan Selayar	0,45
Bulukumba	0,44
Kota Pare-Pare	0,42
Enrekang	0,42
Takalar	0,39
Toraja Utara	0,38
Maros	0,37
Pangkajene & Kepulauan	0,37
Luwu	0,36
Gowa	0,31
Tana Toraja	0,28
Sinjai	0,28
Sidenreng Rappang	0,27
Soppeng	0,25
Jeneponto	0,24
Bantaeng	Tidak menilai

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau Peningkatan/Penurunan kinerja serta alternative Solusi yang telah dilakukan

❖ Analisis Penyebab keberhasilan dalam pencapaian indikator sasaran tersebut yaitu :

- Ditetapkannya Mitigasi Bencana sebagai Program Prioritas Kepala Daerah sehingga Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Risiko Bencana dan Indeks Ketahanan Daerah menjadi lebih fokus dalam pencapaiannya.
- Tersedianya Data Base (Baseline 2018-2024) berdasarkan hasil penilaian Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Luwu Timur.
- Telah dilakukan pemutakhiran data IKD setiap tahun oleh BPBD Kabupaten Luwu Timur melalui pelaksanaan Forum Group Discussion (FGD) Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dengan melibatkan OPD terkait, Instansi Vertikal dan Dunia Usaha.
- Terdapat beberapa rekomendasi pada penilaian IKD tahun sebelumnya yang telah ditindaklanjuti seperti penyusunan Dokumen Rencana Kontijensi Gempa Bumi, PUSDALOPS BPBD, Sistem Peringatan Dini Banjir (EWS), RDTR yang telah berbasis Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dan beberapa rencana penyusunan dokumen kebencanaan yang telah tertuang dalam dokumen Renstra BPBD 2021-2026, Penyusunan Dokumen KRB, Dokumen RPB dsb.
- Adanya dukungan dari Pemerintah Daerah karena telah menetapkan Mitigasi Bencana sebagai program prioritas kepala daerah dan dukungan penganggaran untuk kegiatan Mitigasi Bencana di seluruh desa di Kabupaten Luwu Timur melalui Dana Bantuan Khusus Keuangan (BKK).

❖ Hambatan/Kendala

Dalam pencapaian indikator Indeks Ketahanan Daerah (IKD), terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu :

- Timeline Penilaian IKD sudah ditetapkan setiap tahunnya oleh BNPB, dengan waktu verifikasi dan rilis nilai IKD ditetapkan diakhir tahun.
- Keterbatasan anggaran untuk pengurangan risiko bencana (pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan) yang melekat pada OPD strategis dan bukan hanya di BPBD
- Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi dari OPD terkait
- Belum meratanya pemahaman terkait IRB dan IKD di beberapa stakeholder

- Telah banyak upaya pengurangan risiko bencana yang telah dilakukan namun belum terpetakan dengan baik
- Belum terintegrasinya indikator IKD kedalam dokumen Renstra OPD terkait
- Belum maksimalnya partisipasi OPD terkait pada pelaksanaan FGD Penilaian IKD.

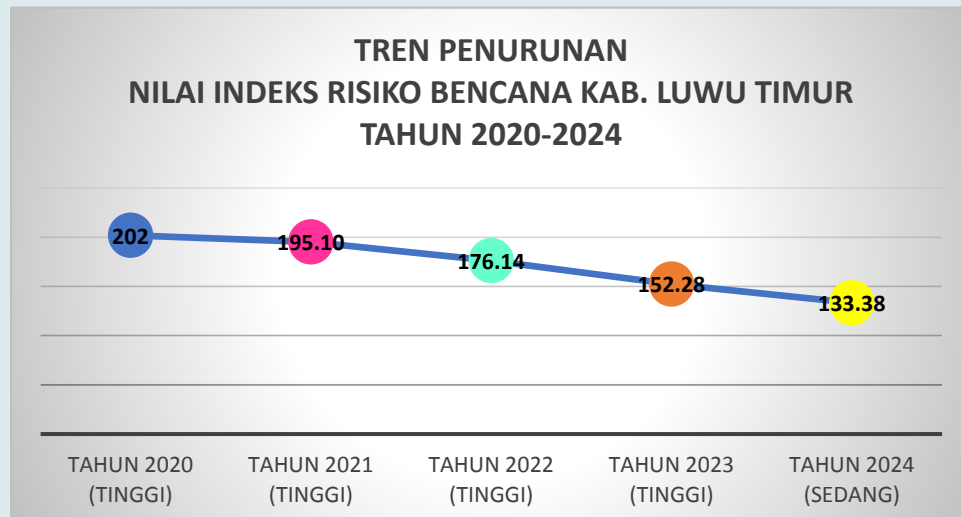
❖ **Solusi**

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi, maka telah dilakukan beberapa solusi yaitu :

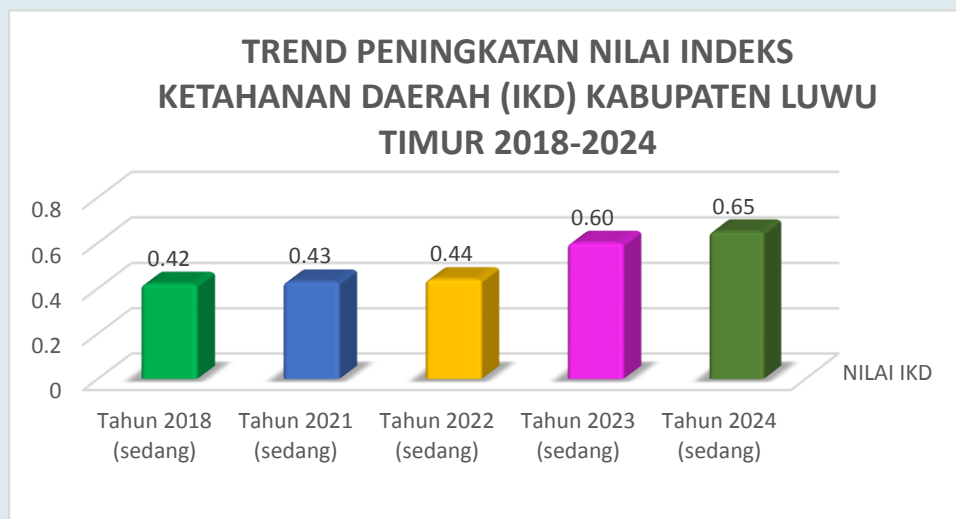
- Nilai IKD setiap triwulannya tetap menggunakan baseline tahun sebelumnya
- Mengusulkan penggunaan dana desa untuk kegiatan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan
- melakukan penjemputan data dan informasi ke OPD terkait
- Melakukan sosialisasi/lokakarya terkait IRB dan IKD
- Melakukan pemetaan terkait upaya pengurangan risiko bencana yang telah dilakukan di Kabupaten Luwu Timur baik oleh OPD, TNI/POLRI, Instansi Vertikal, Dunia Usaha dan Masyarakat,
- Pelaksanaan FGD untuk penilaian IKD sesuai timeline.

❖ **Efektivitas Pelaksanaan Program Penanggulangan Bencana dalam menunjang Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran OPD**

Pelaksanaan Program Penanggulangan Bencana sudah dikatakan efektif atau berhasil, dengan melihat Penurunan Nilai Indeks Risiko Bencana Kabupaten Luwu Timur setiap tahunnya yang dicapai melalui Peningkatan Kapasitas Daerah dalam penanggulangan bencana melalui Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD). Keberhasilan tersebut dicapai melalui peningkatan koordinasi lintas sektor dan lintas OPD. Penyelenggaraan penanggulangan bencana bukan hanya bertumpuh pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah saja tetapi didukung oleh OPD teknis terkait, Akademisi, Dunia Usaha, media dan Masyarakat atau (Pentahelix Kebencanaan).



Grafik 5
Trend Nilai IRB Kabupaten Luwu Timur 2020 s.d 2024



Grafik 6
Trend Nilai IKD Kabupaten Luwu Timur 2018 s.d 2024

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

❖ Efisiensi Anggaran

Dalam pencapaian sasaran strategis BPBD, terdapat beberapa efisiensi anggaran yaitu :

- Terkait kebutuhan logistik penanggulangan bencana, pada tahun 2024, BNPB dan BPBD Provinsi Sul-Sel memfasilitasi logistik korban bencana untuk BPBD Kab. Luwu Timur, daftar bantuan logistik Tahap I yaitu : Makanan Siap Saji 6 paket, Matras 5 lbr, Sabun Mandi 144 Pcs, Jerigen Lipat 30 Pcs, Perlengkapan sekolah 7 Pcs, Logistik Pangan 15 Paket (Gula pasir, Minyak Goreng, Ikan Kaleng, Beras, Air Mineral), Logistik Perlengkapan

Keluarga 5 Paket (Sabun Mandi, Sikat Gigi, Pasta Gigi, Shampo, Handuk Kecil, Handuk Dewasa, Pembalut, Sarung, Minyak kayu Putih), Logistik Shelter Kit (Tenda Terpal Plastik 3 buah dan selimut 20 buah). Dan bantuan logistik Tahap II, terdiri dari : Makanan Siap Saji 6 Paket, Matras 5 Lbr, Sabun Mandi 72 Pcs, Jerigen Lipat 30 Pcs, Ember 10 Pcs, Masker 2000 Pcs, Logistik Pangan 20 Paket (Gula Pasir, Minyak Goreng, Ikan Kaleng, Air Mineral), Logistik Shelter Kit (selimut 20 buah). Bantuan logistic tahap 3 yaitu : Logistik pangan 10 paket (gula pasir 10 kg, madu 10 dus, minyak goreng 10 ltr, ikan kaleng 10 klg, beras 10 krg, mie instant 10 dus, air mineral 10 dos), Logistik perlengkapan keluarga 5 paket (sabun mandi 5 buah, sikat gigi 5 buah, pasta gigi 5 buah, shampoo 5 btl, minyak kayu putih 5 buah, handuk 5 buah, pembalut malam 5 bkg, kain lap handuk 5 lbr, sarung 5 buah), Logistik Shelter Kit (terpal 3 lbr), Matras 5 lbr, Paket Sembako 5 paket, Makanan Siap saji 5 pcs, Selimut 10 lbr dan Hygiene Kit 5 paket.

- Efisiensi pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana dengan adanya bantuan dari BNPB Tahun 2024 yaitu : Perahu Polyethylene 1 unit, Mesin Perahu 1 unit, Life Jacket 8 pcs, Safety Helm 8 pcs, Ring Buoy 1 pcs, Rescue Ropw 10 m dan Hook 1 pcs.
- Sedangkan untuk pemenuhan kebutuhan dasar lainnya untuk korban bencana seperti beras dan bahan makanan pokok lainnya selain dari BPBD, juga disediakan di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Dalam pencapaian target program prioritas (KP 1) Pemerintah Daerah yaitu MITIGASI BENCANA, terdapat pelaksanaan program/kegiatan di Desa melalui Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Tahun 2024 ataupun menggunakan Dana Desa yang dilaksanakan oleh beberapa desa di wilayah Kabupaten Luwu Timur. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Pengadaan APAR.

❖ Efisiensi Sumber Daya

- Dengan keterbatasan sumber daya sarana, prasarana dan tenaga dalam menyampaikan informasi maupun pengetahuan tentang kebencanaan, maka dapat terfasilitasi dengan adanya papan himbauan atau peringatan dini yang ditempatkan pada beberapa kecamatan sehingga dengan sendirinya masyarakat dapat melihat langsung informasi terkait kebencanaan dari media atau papan himbauan peringatan dini tersebut.

Selain itu penyebaran informasi juga dilakukan melalui Media Sosial yaitu FB, IG & Twitter yaitu [Pusdalops Bpbd Lutim](#).

- Sumber daya yang ada pada BPBD Kabupaten Luwu Timur baik sumber daya manusia maupun sumber daya peralatan masih belum memadai, namun dengan keterbatasan tersebut, BPBD tetap berupaya untuk bekerja maksimal dalam penanggulangan bencana. Sumber daya manusia yang ada di BPBD Kabupaten Luwu Timur sebanyak 38 orang yang terdiri dari 14 orang PNS, PPPK 1 org, 2 orang Upah Jasa, dan 21 orang Tim Reaksi Cepat (TRC). Dengan membandingkan luas cakupan wilayah pelayanan penanggulangan bencana yang tidak sebanding dengan jumlah personil yang ada. Maka dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, BPBD Kabupaten Luwu Timur memaksimalkan tenaga relawan-relawan dari berbagai komunitas seperti Tim Relawan Penanggulangan Bencana yang berjumlah 182 orang yang tersebar di 11 kecamatan, BASARNAS, Tim SAR, TAGANA, PMI dsb. Sedangkan dari segi sumberdaya sarana dan prasarana dalam hal ini terkait peralatan bencana, BPBD memaksimalkan peralatan yang dimiliki oleh OPD terkait seperti Dinas PU&PR, Dinas Perikanan, Dinas Sosial P3A, Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas Perhubungan, BASARNAS dsb.
- Terkait pemulihan sarana dan prasarana fisik serta nonfisik pasca bencana, juga dapat difasilitasi oleh SKPD terkait seperti Dinas PU & PR, Dinas Perikanan, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman & Pertanahan. Jadi dalam hal ini bahwa pemulihan sarana dan prasarana fisik serta nonfisik pasca bencana dapat terwujud melalui kerjasama/koordinasi lintas sektoral baik itu dari BPBD maupun OPD terkait dengan memaksimalkan sumberdaya yang ada. Dan terdapat Dana Hibah Rehabilitasi & Rekonstruksi Pasca Bencana sebesar Rp 7.979.000.000,- dan telah diterima pada tanggal 23 Desember 2024. Namun pelaksanaan kegiatan fisiknya dilaksanakan di tahun 2025.

❖ Analisis Efisiensi Sumber Daya

Tabel. 11
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024
(Berdasarkan DPPA-SKPD Tahun TA. 2024)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Alokasi Anggaran Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,61	0,65	106,55%	1.335.990.530,-	1.111.799.828,66,-	83,21%
Meningkatnya layanan SPM sub urusan bencana	Indeks Capaian SPM Sub Urusan bencana (%)	100%	100%	100%			
Program Penanggulangan Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100%	100%	116.395.070,-	114.704.611,-	98,55%
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	100%	257.297.360,-	174.807.110,-	67,94%
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	100%	100%	100%	772.688.140,-	702.262.851,-	90,89%
	Cakupan sistem dasar penanggulangan bencana sesuai SOP kebencanaan	100%	33,33%	33,33%	189.609.960,-	120.025.256,-	63,30%

Tabel. 12
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi Biaya
1	2	3	4	5
Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	106,55%	83,21%	16,79%

Tabel. 13
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024
(Berdasarkan Pergeseran Tahap I Setelah Perubahan Tahun TA. 2024)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Alokasi Anggaran Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,61	0,65	106,55%	9.314.990.530,-	1.111.799.828,66,-	11,94%
Meningkatnya layanan SPM sub urusan bencana	Indeks Capaian SPM Sub Urusan bencana (%)	100%	100%	100%			
Program Penanggulangan Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100%	100%	116.395.070,-	114.704.611,-	98,55%
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	100%	257.297.360,-	174.807.110,-	67,94%
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	100%	100%	100%	772.688.140,-	702.262.851,-	90,89%
	Cakupan sistem dasar penanggulangan bencana sesuai SOP kebencanaan	100%	33,33%	33,33%	8.168.609.960,-	120.025.256,-	1,47%

Tabel. 14
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi Biaya
1	2	3	4	5
Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	106,55%	11,94%	88,06%

Pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Ketahanan Daerah Menghadapi Bencana sebesar 106,55% dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 11,94% berdasarkan pagu pergeseran tahap I setelah perubahan sehingga persentase efisiensi biaya adalah 88,06%. Sedangkan bila dibandingkan dengan pagu perubahan anggaran tahun 2024, maka realisasi keuangannya adalah 83,21% dengan efisiensi biaya 16,79%. Adapun Persentase efisiensi biaya dapat hitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Persentase efisiensi biaya} = 100\% - \left[\frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\% \right]$$

7. Analisis Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja sasaran

❖ Program Penanggulangan Bencana

Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.

Tujuan program penanggulangan bencana yaitu : memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada, menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh, menghargai budaya lokal, membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta, mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan, menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana bukan hanya melekat pada BPBD saja tetapi didukung oleh beberapa OPD terkait seperti Dinas PU&PR, Dinsos P3A, Dinas Pemadam Kebakaran & Penyelamatan, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan, BKAD, Bapelitbangda, BKPSDM, Dinas PMD, DPRD, TNI/POLRI, Instansi Vertikal, Dunia Usaha, Media dan Masyarakat. Dan dalam Upaya pencapaian Sasaran Meningkatnya Ketahanan Daerah menghadapi bencana, sangat dibutuhkan kolaborasi Pentahelik kebencanaan. Dan sebagai OPD pengampuh untuk pencapaian Indikator Kepala Daerah yaitu Penurunan Indeks Risiko Bencana melalui Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD), maka BPBD sebagai leading sektor yang bertugas untuk melaksanakan Penilaian Indeks Ketahanan Daerah dengan melibatkan seluruh OPD terkait dalam Forum Group Discussion (FGD) untuk mengetahui seberapa besar kapasitas daerah dalam

menghadapi bencana. Sehingga nantinya akan diperoleh data dan informasi pendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Luwu Timur secara menyeluruh. Dan salah satu program yang dilaksanakan oleh BPBD Kab. Luwu Timur dalam pencapaian sasaran yaitu Program Penanggulangan Bencana, dan melalui program tersebut, beberapa indikator dalam penilaian Ketangguhan daerah dapat dipenuhi. Seperti Penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana, Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana, Dokumen Rencana Kontingenji, Pengintegrasian dokumen KRB kedalam RTRW, Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Kabupaten, penyediaan logistik korban bencana, penanganan darurat bencana, pemulihan pasca bencana, diklat kebencanaan, pembentukan Desa Tangguh Bencana, Sekolah Aman Bencana, Sosialisasi Rawan Bencana, Penyusunan Regulasi kebencanaan dsb.

Pada tahun 2024, Pelaksanaan Program Penanggulangan Bencana pada BPBD Kabupaten Luwu Timur dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota :
 - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
2. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana :
 - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
 - Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
 - Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
 - Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
 - Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
3. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana :
 - Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
 - Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
 - Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
 - Respon Cepat Bencana Non Alam Pandemi/Wabah Penyakit
4. Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana :
 - Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
 - Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota
 - Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota.

8. KESIMPULAN

- ❖ Capaian Kinerja Sasaran “Meningkatnya Ketahanan Daerah Menghadapi Bencana” dengan Indikator Indeks Ketahanan Daerah (IKD) yaitu 106,55% diperoleh dari rumus perhitungan :

$$= \frac{\text{Realisasi IKD}}{\text{Target IKD}} \times 100$$

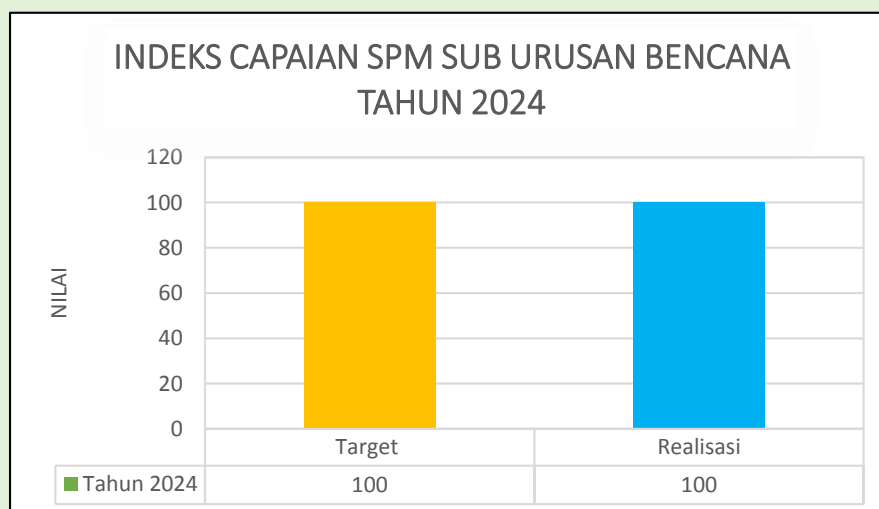
$$= \frac{0,65}{0,61} \times 100$$

$$= 106,55\%$$

- ❖ Alokasi anggaran yang disediakan pada Dokumen DPPA-SKPD BPBD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 dalam pencapaian kinerja sasaran yaitu : **Rp. 1.335.990.030,-** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 1.111.799.828,66,-** atau **83,21%**.
- ❖ Namun pada bulan Desember 2024, diperoleh Dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana sebesar Rp 7.979.000.000,- dan dimasukkan pada DPPA-SKPD Pergeseran Tahap Pertama setelah Perubahan pada Bulan Desember Tahun 2024. Namun kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan di akhir tahun dan dianggarkan kembali pada DPA-SKPD TA. 2025. Penambahan Dana Hibah RR tersebut mempengaruhi realisasi keuangan, yang semula Realisasi Keuangan untuk mendukung pencapaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) sebesar **83, 21%** berubah menjadi **11,94%**.
- ❖ Kegiatan Rehabilitasi & Rekonstruksi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Penetapan SPPH Dana Hibah RR pada tanggal 30 Oktober 2024 dan Penyaluran Dana Hibah RR dari Kementerian Keuangan ke Pemerintah Daerah pada tanggal 23 Desember 2024.

Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Layanan SPM Sub Urusan Bencana



Grafik. 7
Capaian Kinerja Indeks Capaian SPM Sub Urusan Bencana Tahun 2024

Indeks Capaian SPM Sub Urusan Bencana

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024

Formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut : “Pencapaian mutu minimal layanan dasar x Bobot Mutu (20%) + Persentase pencapaian penerima layanan dasar x Bobot Penerima layanan (80%)”.

Target Indikator sasaran 2 Tahun 2024 adalah 100% dan realisasi 100% dengan persentase capaian kinerja 100%. Hal ini terjadi karena adanya perbaikan target tahunan yang dilakukan pada perubahan anggaran menyesuaikan dengan realisasi berdasarkan hasil konsultasi dengan Biro Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan serta Zoom Meeting tentang Tata cara penginputan SPM Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Kemendagri.

Adapun capaian dari ketiga layanan SPM tersebut yaitu **Layanan informasi rawan bencana** dengan capaian kinerja 100%, layanan ini diberikan kepada masyarakat melalui 3 metode yaitu sosialisasi melalui tatap muka dengan masyarakat di daerah rawan bencana, sosialisasi melalui media sosial dan wahana multimedia serta sosialisasi melalui papan informasi publik. Pelaksanaan sosialisasi melalui tatap muka dilakukan melalui pelaksanaan sub kegiatan Sosialisasi KIE Rawan Bencana dan dilaksanakan pada bulan Juli tahun 2024, dengan sasaran peserta sosialisasi adalah Pelajar Tingkat SMP/SMA. Sedangkan media sosial yaitu melalui Facebook, Instagram, WhatsApp, Pusdalops BPBD. Adapun sosialisasi melalui papan informasi publik yaitu penempatan papan himbauan peringatan dini bencana di 11 kecamatan.

Terkait **Layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana** dengan capaian 100%, layanan ini didukung oleh beberapa sub kegiatan yaitu Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana dilaksanakan pada tanggal 2 s.d 3 Desember 2024 bertempat di Desa Pasi-Pasi Kec. Malili dan Kelurahan Malili, dengan jumlah peserta 100 org dengan sasaran masyarakat yang berada di daerah rawan bencana. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) dilaksanakan pada tanggal 10 s.d 11 Agustus 2024 di Desa Lampia Kec. Malili dengan peserta TRC sebanyak 37 org dan jenis pelatihan yang dilakukan adalah Water Rescue. Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana merupakan tindaklanjut dari Kerjasama BPBD dan Tim Penggerak PKK Kab. Luwu Timur. Pelaksanaan gladi/simulasi diikuti oleh Tim Penggerak PKK Kab. Luwu Timur mulai dari tingkat desa, kecamatan dan kabupaten dengan peserta sebanyak 250 org. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan, dilaksanakan pada tanggal 24 s.d 27 September 2024. Bentuk pelaksanaannya adalah Pembentukan Desa Tangguh Bencana (DESTANA) sebanyak 4 desa yaitu : Desa Argomulyo Kec. Kalaena, Desa Balambano Kec. Wasuponda serta Desa Laskap dan Desa Puncak Indah Kec. Malili, dan yang terakhir adalah Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana, Dimana pada tahun 2024, terdapat bantuan dari BNPB berupa Perahu Polythylene 1 unit, mesin perahu karet 25 HP 1 unit, Life Jacket 8 pcs, Helm Safety 8 pcs, Ring Buoy 1 pcs, Rescue Ropw 10 m dan Hook 1 pcs. Adapun untuk pengadaan Sarpras PB yang bersumber dari APBD BPBD TA. 2024 tidak direalisasikan dan dilakukan efisiensi anggaran. Pencapaian SPM untuk Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan juga didukung dengan adanya penempatan Sistem Peringatan Dini Gempa Bumi yang berpotensi Tsunami (WRS InaTEWS) di Kantor BPBD. Selain itu juga terdapat alat deteksi gempa bumi yang ditempatkan di Desa Atue Kec. Malili, Desa Matompi Kec. Towuti dan Desa Kalpataru Kec. Tomoni. Alat ini berfungsi untuk mendeteksi gempa bumi lokal sesar Matano dan alat deteksi gempa

bumi di Desa Cendana Hitam Kec. Tomoni Timur untuk mendeteksi gempa bumi dari sesar-sesar yang jauh diluar wilayah Luwu Timur. Selain itu juga terdapat system peringatan dini banjir yang ditempatkan di Sungai Kalaena Desa Pertasi Kencana Kec. Kalaena dan Sungai Malili. Dengan adanya peralatan tersebut dapat diasumsikan bahwa seluruh Masyarakat Luwu Timur memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.

Pada tahun 2024, terdapat beberapa kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten Luwu Timur yang sumber pendanaannya berasal dari Lembaga seperti BAZNAS yang menyelenggarakan Pelatihan Tanggap Bencana bagi Tim Relawan Penanggulangan Bencana, Pelatihan Mitigasi Bencana oleh Karang Taruna Luwu Timur. Selain itu juga dilaksanakan sosialisasi, edukasi dan simulasi penanggulangan bencana di beberapa sekolah.

Sedangkan untuk **Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana** capaian kinerjanya 100%. Realisasinya dihitung berdasarkan jumlah korban bencana yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi. Pada tahun 2024, jumlah korban bencana yang memperoleh layanan sebanyak 996 org (535 Laki-laki dan 461 Perempuan) terdiri dari penyelamatan & evakuasi korban bencana kebakaran rumah 109 org, cuaca ekstrim 197 org dan orang hilang 21 org dan Banjir 668 org, tanah longsor 1 org. Dan kita ketahui bahwa kejadian bencana tidak dapat diprediksi Kapan, Dimana dan berapa banyak jumlah korban dan kerugian yang terdampak.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun-tahun Sebelumnya

Tabel. 15
Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024 dengan Tahun-tahun Sebelumnya

Sasaran II :	Meningkatnya layanan SPM sub urusan bencana												Target Tahun 2026
Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			
	Targ et	Realis asi	Capai an	Targe t	Realis asi	Capai an	Tar get	Realis asi	Capai an	Targ et	Realis asi	Cap aian	
Indeks Capaian SPM Sub Urusan bencana (%)	0%	0%	0%	100 %	97,83 %	97,83 %	100 %	97,72 %	97,72 %	100 %	100 %	100%	100%

Berdasarkan tabel diatas, realisasi Tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dan mencapai 100%. Hal ini disebabkan karena adanya perbaikan dalam hal penetapan target tahunan yang disesuaikan dengan hasil Zoom Meeting tentang Tata Cara Penginputan SPM Triwulan II Tahun 2024 oleh Kemendagri dan hasil koordinasi dan konsultasi dengan Biro Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan. Faktor pendukung lainnya adalah terdapat lembaga, organisasi pemuda dan sekolah-sekolah yang melaksanakan kegiatan kebencanaan di Kabupaten Luwu Timur yang menunjang pencapaian SPM Sub Urusan Bencana Tahun 2024.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan Target Jangka Menengah

Tabel. 16
Perbandingan Capaian Kinerja s.d Tahun 2024 Terhadap Target Jangka Menengah (2021 – 2026)

Sasaran 2 :	Meningkatnya layanan SPM sub urusan bencana		Target Akhir Renstra 2026	% Capaian s/d 2024 terhadap target akhir Renstra 2026
Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi			
	Tahun 2024	realisasi rata-rata sampai dengan tahun 2024		
Indeks Capaian SPM Sub Urusan bencana (%)	100%	98,51%	100%	98,51%

Berdasarkan realisasi rata-rata tahun 2022 s.d Tahun 2024 jika dibandingkan dengan target yang direncanakan sampai dengan tahun 2026, sangat memungkinkan untuk dapat dicapai. Dan upaya yang dilakukan untuk mencapai target 3 layanan dasar sub urusan bencana yaitu untuk layanan informasi rawan bencana dengan cara memaksimalkan penyebaran informasi melalui media sosial dan papan himbauan peringatan dini bencana di setiap kecamatan serta sosialisasi secara tatap muka langsung melalui pelaksanaan Sosialisasi KIE Rawan Bencana di 11 kecamatan. Sedangkan untuk layanan pencegahan dan kesiapsiagaan dengan cara memaksimalkan pelaksanaan kegiatan serta anggaran yang terdapat pada beberapa OPD terkait misalnya Pelaksanaan kegiatan kebencanaan melalui Dana Bantuan Khusus Keuangan untuk Mitigasi Bencana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dunia usaha dan Masyarakat. Memaksimalkan penggunaan sarana prasarana BMKG untuk deteksi Gempa Bumi Lokal dan yang bersumber dari luar wilayah Luwu Timur. Begitu juga untuk layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Dengan memaksimalkan koordinasi dengan BASARNAS, pengerahan Tim Relawan, dunia usaha dan masyarakat dalam melakukan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

4. Perbandingan dengan Target Nasional (SPM Penanggulangan Bencana)

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

Berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota dan Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, maka terdapat 3 jenis pelayanan dasar pada sub urusan bencana yang wajib dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu

1. Pelayanan informasi rawan bencana
2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

Adapun **Target nasional** dari ketiga jenis pelayanan dasar tersebut adalah **100% setiap tahun**. Olehnya itu perbandingan antara target nasional dengan capaian Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 17
Realisasi Target SPM Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Uraian Kinerja			Anggaran		(%)
		Indikator Capaian	Target Nasional (%)	Realisasi Tahun 2024 (%)	Anggaran Perubahan Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pelayanan Informasi Rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100%	116.395.070,-	114.704.611,-	21,41%
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	257.297.360,-	174.807.110,-	67,94%
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	772.688.140,-	702.262.851,-	90,89%

Tabel. 18
Alokasi Anggaran Bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program/ Kegiatan / sub Kegiatan	Alokasi Biaya		
			Anggaran		
			APBN	APBD-P	Sumber dana lain yang sah
1	2	3	4	5	6
		Program Penanggulangan Bencana	-	1.146.806.570,-	-
1	Pelayanan Informasi Rawan bencana	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	-	116.395.070,-	-
		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota	-	116.395.070,-	-
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-	257.723.360,-	-
		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	-	61.020.750,-	-
		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	-	65.750.000,-	-
		Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	-	57.937.060,-	-
		Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	-	35.877.450,-	-
		Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-	36.712.100,-	-
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-	772.688.140,-	-
		Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota	-	593.750.900,-	-
		Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	-	64.495.000,-	-
		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	-	95.141.600,-	-
		Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/ Wabah Penyakit	-	9.335.040,-	-
		Aktivasi system komando penanganan darurat bencana	-	9.965.600,-	-

Tabel. 19
Kendala, Permasalahan dan Solusi
SPM Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	KENDALA/PERMASALAHAN	SOLUSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	(1). Keterbatasan Anggaran/pembiayaan penanggulangan bencana,	(1).Memaksimalkan penyebarluasan informasi rawan bencana melalui Pusdalops Penanggulangan Bencana, Papan Hibauan Peringatan Dini dan Media Sosial, (2).Memaksimalkan keterlibatan Dunia Usaha dan Masyarakat dalam penyebarluasan informasi rawan bencana, (3).Meningkatkan koordinasi dilingkup Pemerintah daerah, Dunia Usaha dan masyarakat terkait kegiatan kebencanaan.
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	(1). Keterbatasan Anggaran/pembiayaan penanggulangan bencana (2). Pelaksanaan Kegiatan tidak sesuai rencana aksi	(1).Meningkatkan koordinasi dilingkup Pemerintah daerah, Dunia Usaha dan masyarakat terkait kegiatan kebencanaan, (2).Memaksimalkan program dan kegiatan pada OPD terkait yang menyediakan anggaran untuk Mitigasi Bencana struktural dan Non Struktural
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	(1).Keterbatasan sarana dan prasarana penanggulangan bencana, (2).Luasnya cakupan wilayah penanganan penanggulangan bencana yang tidak sebanding dengan jumlah personil yang ada, (3).Keterbatasan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia yang memahami mekanisme penanggulangan bencana baik secara teknis maupun non teknis	(1).Pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan melalui BNPB dan BMKG, (2).Penguatan Tim Relawan Penanggulangan Bencana di Kecamatan, (3).Pembentukan Posko Terpadu Penanggulangan Bencana, (4). Keikutsertaan dalam kegiatan Diklat Kebencanaan baik yang dilaksanakan oleh BNPB, BASARNAS, BPBD Provinsi dan BPBD Kab. Luwu Timur

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau Peningkatan/Penurunan kinerja serta alternative Solusi yang telah dilakukan

- ❖ Analisis Penyebab keberhasilan dalam pencapaian indikator sasaran yaitu $\geq 100\%$ yaitu :
 - Penetapan Mitigasi Bencana sebagai Program Prioritas Kepala Daerah sehingga menjadi prioritas untuk dianggarkan.
 - Kolaborasi Pentahelix Kebencanaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Luwu Timur
 - Koordinasi lintas sektoral dalam penanggulangan bencana
 - Penyebarluasan informasi kebencanaan melalui media sosial
 - Adanya pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara periodik terkait capaian SPM

❖ **Hambatan/Kendala**

Dalam pencapaian sasaran tersebut, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu :

- Adanya perbedaan persepsi terkait penetapan target triwulan & tahunan
- Kurangnya sosialisasi
- Minimnya kualitas SDM penanggulangan bencana
- Keterbatasan anggaran
- Terdapat beberapa media penyampaian informasi peringatan dini bencana yang mengalami kerusakan
- Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai rencana aksi

❖ **Solusi**

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi maka langkah-langkah yang ditempuh adalah :

- Penentuan target tahunan harus sesuai dengan capaian tahun sebelumnya
- Memaksimalkan sosialisasi KIE rawan bencana melalui media sosial (FB, IG, WA) dan melalui papan informasi publik
- Memaksimalkan koordinasi lintas OPD terkait pelaksanaan program/kegiatan yang berkontribusi dalam pencapaian SPM di kabupaten misalnya dengan Dinas PMD terkait penggunaan Dana Bantuan Khusus Keuangan (BKK) untuk Mitigasi Bencana di desa, Dinas Sosial &P3A terkait penyediaan logistik untuk korban bencana, Dinas PUPR terkait pelaksanaan pekerjaan konstruksi untuk Mitigasi Bencana Struktural, Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan terkait Cadangan pangan dsb.
- Pencapaian target semaksimal mungkin dengan mencermati capaian program/kegiatan lintas OPD yang berkontribusi dalam pencapaian SPM urusan bencana.
- Peningkatan kapasitas SDM penanggulangan bencana melalui diklat/pelatihan dan simulasi
- Percepatan pelaksanaan kegiatan

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

❖ **Efisiensi Anggaran**

Dalam pencapaian sasaran strategis 2, dilakukan beberapa efisiensi anggaran yaitu :

- Adanya penggunaan Dana Bantuan Khusus Keuangan (BKK) Desa untuk pelaksanaan Mitigasi Bencana di desa.
- Efisiensi anggaran logistik untuk korban bencana karena adanya supporting logistik dari BNPB dan BPBD Provinsi Sul-Sel dan OPD terkait seperti bantuan logistik dari Dinas Sosial & P3A, Cadangan Pangan dari Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan serta bantuan logistik dari dunia usaha dan Masyarakat.
- Dilakukan efisiensi anggaran untuk pengadaan Sarpras Penanggulangan Bencana dengan adanya bantuan dari BNPB
- Pelaksanaan Kegiatan Kebencanaan oleh Dunia Usaha, Masyarakat dan Lembaga lainnya misalnya BAZNAS Tanggap Bencana, Kegiatan Pelatihan Mitigasi Bencana oleh Karang Taruna Luwu Timur, Pelaksanaan Sosialisasi, Edukasi dan Simulasi Penanggulangan Bencana di sekolah-sekolah dan Damkar Masuk Sekolah.

❖ Efisiensi Sumber Daya

Dalam pencapaian sasaran 2, dilakukan melalui pemanfaatan sumber daya yaitu:

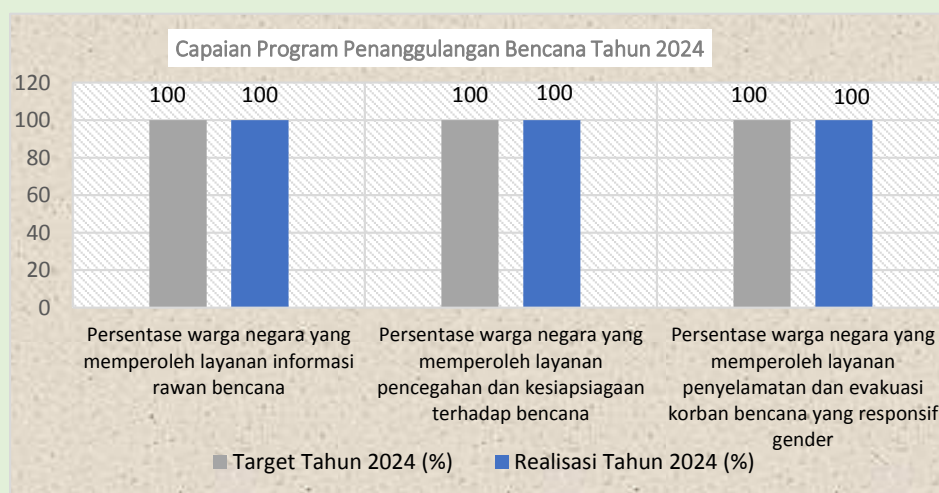
- Pemanfaatan media sosial dalam penyebaran informasi kebencanaan.
- Pemanfaatan sarana dan prasarana BMKG dalam penyebarluasan informasi kebencanaan seperti alat deteksi gempa bumi lokal yang berada di 3 titik yaitu di Desa Matompi Kec. Towuti, Desa Ussu Kec. Malili, Desa Kalpataru Kec. Tomoni dan Alat Ina TEWS untuk mendeteksi gempa yang berasal dari luar Kabupaten Luwu Timur yang ditempatkan di Kantor BPBD.

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran

❖ Progam Penanggulangan Bencana

Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi

Sasaran program adalah : (1) Meningkatnya upaya penyebaran informasi tentang bagian wilayah kabupaten/kota rawan bencana, kepada Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana, (2) Meningkatnya upaya pencegahan dan mitigasi untuk mengurangi potensi korban jiwa, kerugian ekonomi dan kerusakan lingkungan akibat bencana di daerah rawan bencana, (3) Terselenggaranya penanganan penyelamatan dan evakuasi korban bencana serta pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana



Grafik. 8
Capaian Kinerja Program Penanggulangan Bencana Tahun 2024

❖ **Indikator Program Penanggulangan Bencana Tahun 2024 adalah :**

a. Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (Indikator SPM Sub Urusan Bencana)

Formulasi : “Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana dibagi jumlah seluruh warga negara yang berada di daerah rawan bencana dikali seratus”.

$$= \frac{308.530}{308.530} \times 100$$

$$= 100\%$$

Target Tahun 2024 adalah 100% dan realisasi 100% dengan persentase capaian kinerja 100%. Capaian tersebut berasal dari pelaksanaan Layanan Informasi kebencanaan melalui PUSDALOPS BPBD, Penyampaian informasi kebencanaan melalui Papan himbauan informasi bencana dan rambu-rambu peringatan dini dan rambu-rambu peringatan bencana yang ditempatkan di 11 kecamatan, pelaksanaan Sosialisasi, komunikasi, informasi rawan bencana di sekolah-sekolah, penyebaran informasi kebencanaan melalui PUSDALOPS BPBD, Facebook, Instagram dan WhatsApp, dengan akumulasi jumlah masyarakat yang menerima layanan informasi sebesar 308.530 org dibagi jumlah penduduk Kab. Luwu Timur 308.530 jiwa.

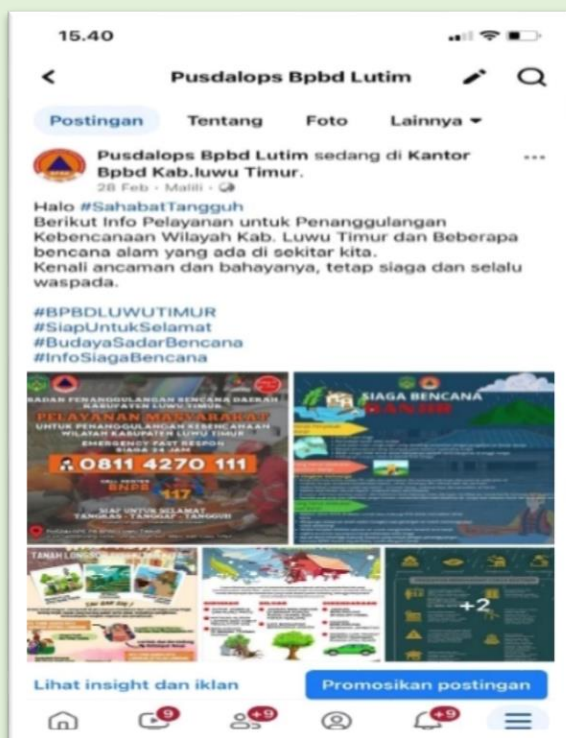
Dokumentasi Layanan Informasi Rawan Bencana



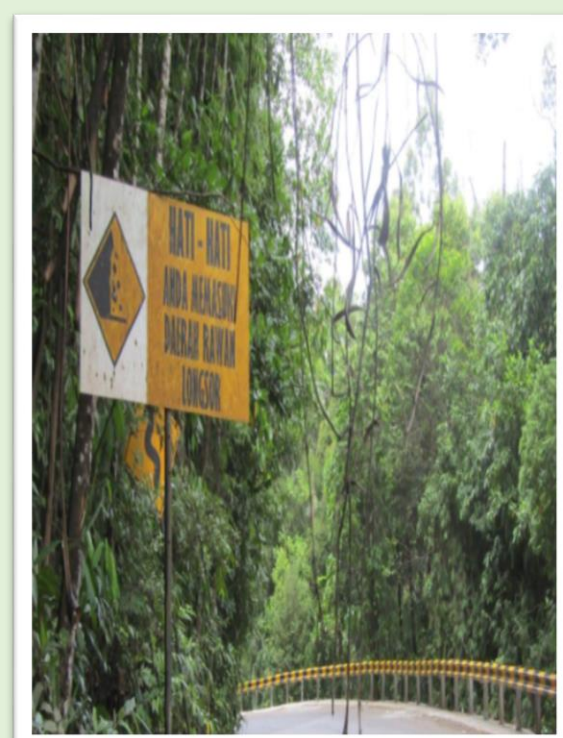
Papan Himbauan Peringatan Dini Bencana



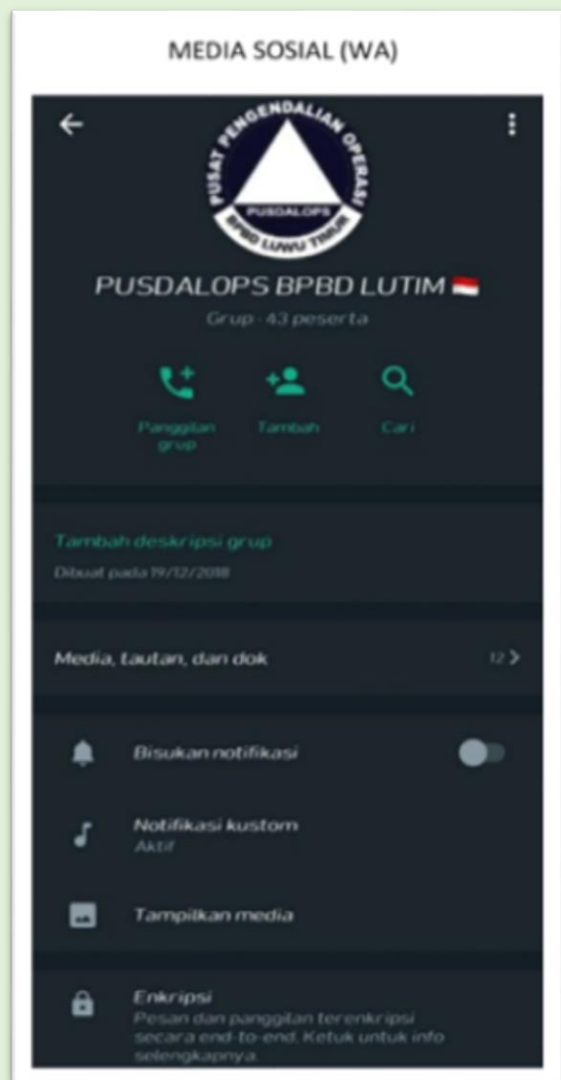
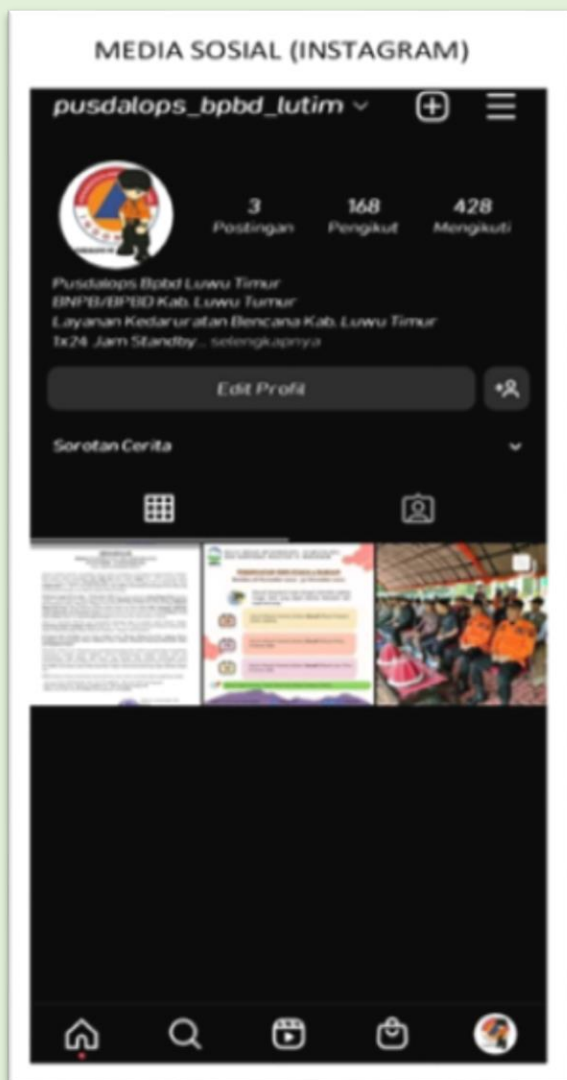
Papan Himbauan Peringatan Dini Bencana



Media Sosial BPBD



Rambu-Rambu Peringatan Daerah Rawan





Sosialisasi KIE Rawan Bencana di Sekolah

- b. **Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana** (Indikator SPM Sub Urusan Bencana)

Formulasi : “Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dibagi jumlah seluruh warga negara yang berada di daerah rawan bencana dikali seratus”.

$$= \frac{13.167}{13.167} \times 100$$

$$= 100\%$$

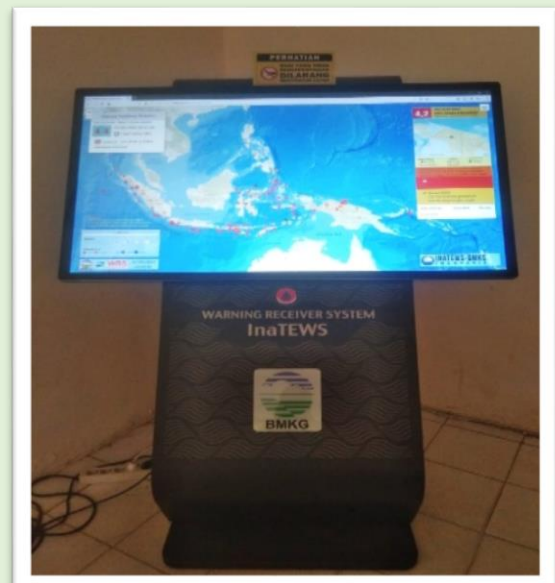
Target Tahun 2024 adalah 100% dan realisasi 100% dengan persentase capaian kinerja 100%. Target yang ditetapkan untuk layanan ini adalah 13.167 org yang berada di daerah rawan bencana. Target yang ditetapkan untuk layanan ini adalah 13.167 org yang berada di daerah rawan bencana. Komponen penyusun dalam indikator ini berasal dari sub kegiatan Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana yang direncanakan pada Bulan Maret Tahun 2024, namun pelaksanaannya tertunda sampai dengan bulan Mei 2024 karena menyesuaikan jadwal Tim Penggerak PKK Kab. Luwu Timur. Jumlah peserta sosialisasi sebanyak 250 org. Sub kegiatan tersebut merupakan tindaklanjut Kerjasama antara BPBD Kab. Luwu Timur dengan Tim Penggerak PKK Kab. Luwu Timur dalam mewujudkan Program Keluarga Tangguh Bencana. Sub kegiatan lainnya adalah Pengembangan Kapasitas TRC direncanakan pada triwulan II TA. 2024 dan terealisasi Agustus 2024 dengan jumlah TRC yang dilatih sebanyak 37 org dari target 50 org. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota dilaksanakan pada

tanggal 2 s.d 3 Desember 2024 bertempat di Desa Pasi-Pasi Kec. Malili dan Kelurahan Malili, dengan jumlah peserta 100 org dengan sasaran masyarakat yang berada di daerah rawan bencana. Selanjutnya adalah Pembentukan Desa Tangguh Bencana yang telah dilaksanakan pada tanggal 24 s.d 27 September 2024. Adapun desa yang dibentuk adalah Desa Argomulyo, Desa Balambano, Desa Laskap & Desa Puncak Indah. Layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan juga dapat dicapai dengan adanya Penempatan alat deteksi gempa lokal sesar matano di 3 lokasi yaitu Desa Matompi Kec. Towuti, Desa Atue Kec. Malili dan Desa Kalpataru Kec. Tomoni, Penempatan alat deteksi banjir di Kec. Kalaena dan Kec. Malili serta Alat deteksi gempa bumi yang berpotensi tsunami yang ditempatkan di Kantor BPBD Kab. Luwu Timur. Dan semua peralatan tersebut dapat memantau seluruh wilayah kabupaten Luwu Timur. Sedangkan untuk Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan tahun 2024, BNPB memfasilitasi peralatan bencana seperti Perahu Polyethylene, mesin perahu karet, lifejacket, helm safety dsb.

[Dokumentasi Layanan Pencegahan & Kesiapsiagaan Bencana](#)



Alat Pemantau Gempa Bumi Lokal



Alat Deteksi Gempa Bumi Berpotensi Tsunami (INA Tews)



Sistem Peringatan Dini Banjir Sungai Malili



Sistem Peringatan Dini Banjir Sungai Kalaena



Pembukaan Simulasi PB oleh SEKDA Kab. Lutim



Pelaksanaan Simulasi oleh Tim Penggerak PKK



Pertolongan Darurat oleh TRC-BPBD (Simulasi)



Pendirian Pos Kesehatan (Simulasi Gempa Bumi)



Pembentukan POSKO Tanggap Darurat Bencana



Pendirian Tenda Pengungsi (Simulasi Gempa Bumi)



Pelaksanaan Pengembangan Kapasitas TRC





Pembentukan Destana Desa Argomulyo



Pembentukan Destana Desa Balambano



Pembentukan Destana Desa Laskap



Pembentukan Destana Desa Puncak Indah



Pelatihan Mitigasi Bencana di Desa Pasi-Pasi Kec. Malili





Pelatihan Mitigasi Bencana di Kelurahan Malili

Dokumentasi

Kegiatan Layanan Pencegahan & Kesiapsiagaan yang dilaksanakan oleh Lembaga, Organisasi Pemuda & Sekolah yang mendukung Pencapaian SPM Sub Urusan Bencana Tahun 2024



Pelatihan BAZNAS Tanggap Bencana Tahun 2024



Pelatihan Mitigasi Bencana oleh Karang Taruna Kab. Luwu Timur Tahun 2024



Edukasi Bencana Gempa Bumi di SDIT INSAN RABBANI, 05 September 2024

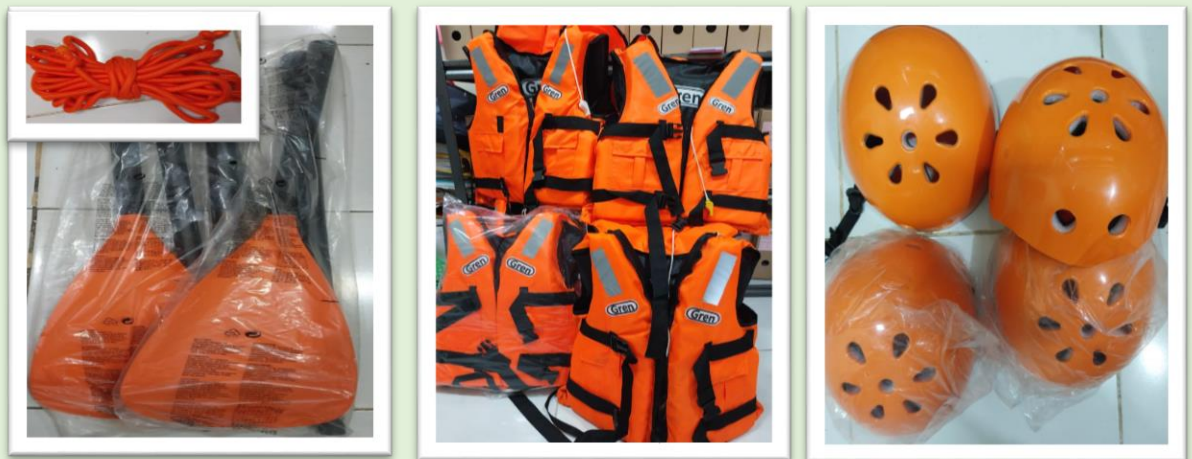


Simulasi Bencana Gempa Bumi di SDIT MADANI, 29 September 2024

Dokumentasi
Bantuan Sarana & Prasarana Penanggulangan Bencana Tahun 2024 oleh BNPB
Mendukung Capaian SPM Sub Urusan Bencana



Perahu Polythylene dan Mesin Perahu, Bantuan BNPB Tahun 2024



Life Jacket, Tali, Helm Safety, Bantuan BNPB Tahun 2024

- d. **Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender** (Indikator SPM Sub Urusan Bencana)

Formulasi : “Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi bencana dibagi jumlah seluruh keseluruhan korban bencana dikali seratus”.

$$= \frac{996 \text{ jiwa}}{996 \text{ jiwa}} \times 100$$

$$= 100\%$$

Target tahun 2024 adalah 100% dan realisasi 100% dengan persentase capaian kinerja 100%. Dengan perhitungan bahwa jumlah korban bencana bulan Januari s.d Desember 2024 sebanyak 996 jiwa (535 Laki-laki dan 461 Perempuan) dan semuanya memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi. Jumlah tersebut merupakan akumulasi total korban bencana dari 324 kejadian bencana yang terjadi di Kab. Luwu Timur tahun 2024 dengan rincian : kejadian kebakaran rumah 109 jiwa, cuaca ekstrim 197 jiwa, banjir 668 jiwa, tanah longsor 1 jiwa, serta korban orang hilang/tenggelam 21 jiwa.

Dokumentasi Layanan Penyelamatan & Evakuasi Korban Bencana



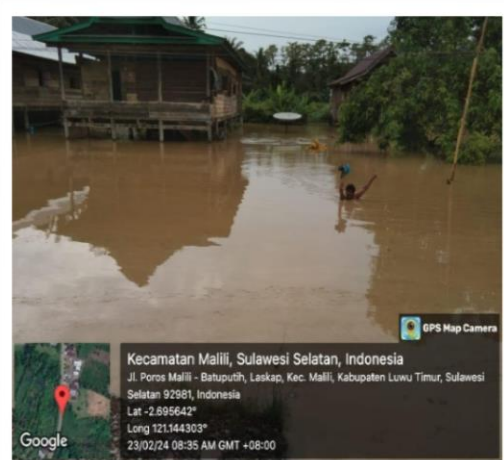
Kunjungan Bupati ke lokasi pencarian orang tenggelam



Pencarian orang tenggelam di Sungai Kalaena



Respon Cepat Pembersihan Sungai Malili akibat Banjir oleh TRC, DAMKAR & BASARNAS



Penyelamatan & Evakuasi Korban Banjir Desa Pongkeru Kec. Malili



Briefing Penyelamatan & Evakuasi Korban Orang Tenggelam di Danau Desa Bantilang Kec. Towuti



Evakuasi Korban Tenggelam di Danau Towuti, Desa Bantilang Kec. Towuti



Respon Cepat Penangan Longsor di Desa Kasintuwu Kec. Mangkutana, 11 November 2024



Respon Cepat Penanganan Pohon Tumbang oleh TRC-BPBD



**Respon Cepat Pembersihan Sungai akibat Banjir oleh TRC BPBD
di Desa Burau Pantai Kec. Burau, 16 Oktober 2024**

Dokumentasi
Uji Coba Peralatan Perahu Viber dan Susur Sungai Malili
oleh Kepala Pelaksana BPBD, TRC & Damkar



Dokumentasi
Bantuan Logistik Korban Bencana Tahun 2024 Kolaborasi BPBD,
Dinsos & P3A serta Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan Tahun 2024
Mendukung Capaian SPM Sub Urusan Bencana



Penyaluran Bantuan Logistik Banjir Bandang di Kab. Luwu Oleh Wakil Bupati Luwu Timur

Dokumentasi Beras Cadangan Pangan, Bantuan dari Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan
untuk Korban Banjir Desa Purwosari Kec. Tomoni Timur 04 Mei 2024



Penyaluran Bantuan Logistik Korban Banjir Desa Burau Pantai Kec. Burau



Penyaluran Bantuan Logistik Korban Bencana Angin Kencang di desa kanawatu Kec.Wotu,
 5 Desember 2024



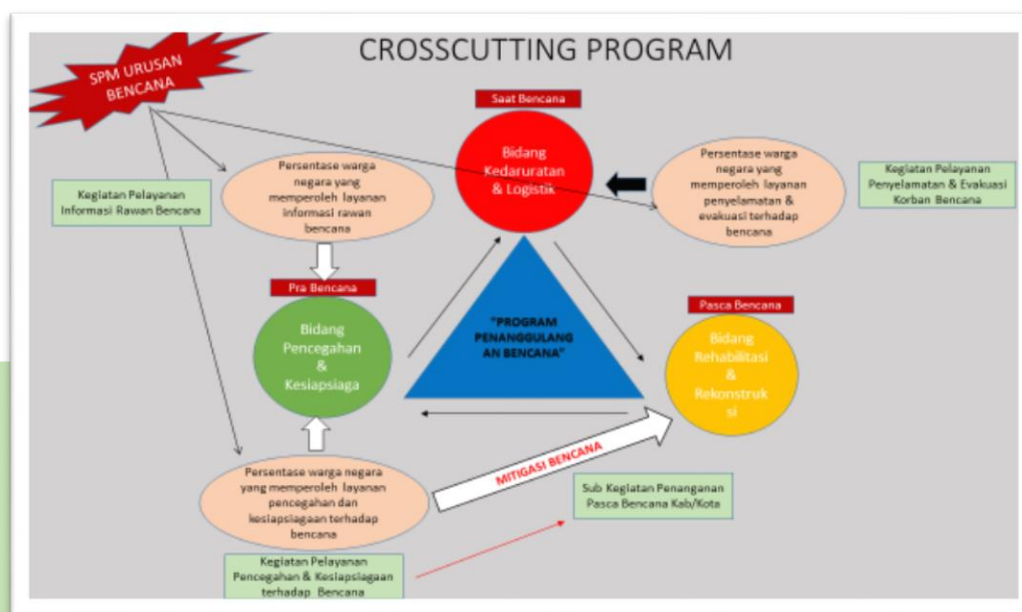
Penyaluran Bantuan Logistik oleh Kepala Pelaksana BPBD dan Kepala Dinas Sosial & P3A



Penyaluran Bantuan Logistik Korban Kebakaran Rumah di Desa Kasintuwu Kec. Mangkutana



Crosscutting Program Penanggulangan Bencana dalam Pencapaian SPM Sub Urusan bencana :



Pada tahun 2024, pencapaian SPM Sub Urusan Bencana pada Program Penanggulangan Bencana dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan sub kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
 - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota
2. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
 - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
 - Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
 - Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
 - Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
 - Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
3. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi terhadap Korban bencana
 - Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
 - Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
 - Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
 - Respon Cepat Bencana Non Alam Pandemi/Wabah Penyakit

Adapun capaian kinerja Kegiatan/Sub kegiatan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

1. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota

Tabel. 20
Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian (%)
1	2	3	4	5	7	8
1.	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelayanan informasi rawan bencana kepada warganegara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	0,08%	0,08%	100%
b.	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/kota (Per Jenis Bencana)	Terselenggaranya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana kepada masyarakat per jenis ancaman bencana	Jumlah peserta sosialisasi kebencanaan	250 org	250 org	100%

2. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Tabel. 21
Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Meningkatnya upaya pencegahan dan mitigasi untuk mengurangi potensi korban jiwa, kerugian ekonomi dan kerusakan lingkungan akibat bencana di daerah rawan bencana	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	4,36%	4,355%	99,89%
a	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Terlatihnya aparatur dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana	Jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	100 org	100 org	100%
b.	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya sarana dan prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah sarana prasarana penanggulangan bencana yang diadakan	77 unit	0 unit	0%
c.	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dalam rangka pengurangan resiko bencana	Jumlah desa tangguh bencana yang di bentuk	4 Desa	4 Desa	100%

d.	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Kabupaten/Kota	Terlatihnya Tim Reaksi Cepat (TRC) dalam penanganan bencana	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang di diklat	50 org	37 org	74%
e.	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Terlatihnya warga negara dalam rangka kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang ikut pelatihan	250 org	250 org	100%

1. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Tabel. 22
Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian (%)
1.	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Terlaksananya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana sesegera mungkin	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	100%	100%	100%
a.	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota	Terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status darurat bencana kurang dari 24 jam	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100%	100%	100%
b.	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	Persentase jumlah korban laki-laki dan perempuan berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100%	100%	100%
c.	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi korban bencana	Persentase jumlah korban bencana laki-laki dan perempuan yang terfasilitasi kebutuhan dasarnya yang responsif gender	100%	100%	100%
d.	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/ Wabah Penyakit	Terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status kejadian luar biasa wabah penyakit	100%	100%	100%
e.	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100%	100%	100%

8. KESIMPULAN

- ❖ Capaian Kinerja Sasaran “Meningkatnya layanan SPM sub urusan bencana yaitu 100% diperoleh dari rumus perhitungan :

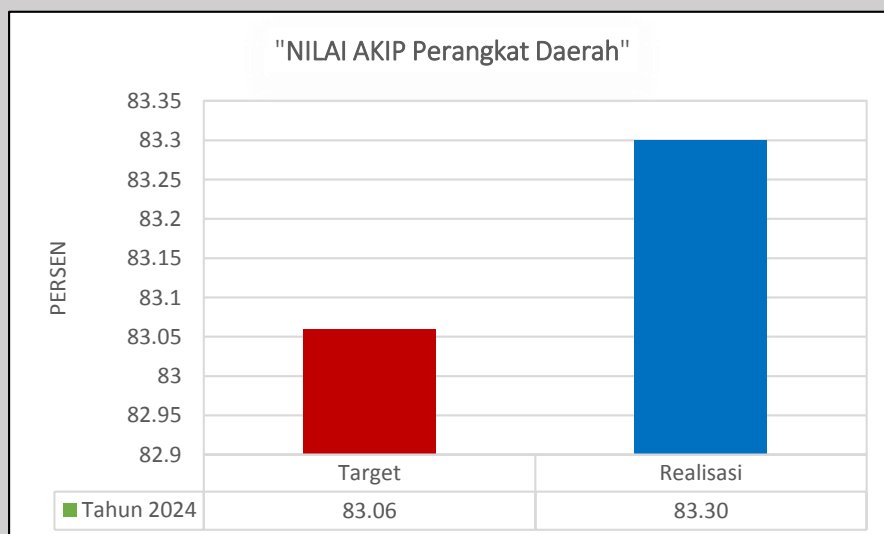
$$= \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100$$

$$= \frac{100}{100} \times 100$$

$$= 100\%$$

- ❖ Alokasi anggaran yang disediakan pada Dokumen DPPA-SKPD BPBD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 dalam pencapaian kinerja sasaran yaitu : **Rp. 1.146.806.570,-** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 991.774.572,-** atau **86,48%**.

Sasaran Strategis 3 (Sasaran Pendukung)
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah



Grafik. 9
 Capaian Kinerja Sasaran 3 Tahun 2024

NILAI AKIP Perangkat Daerah

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024

Tabel. 23
 Capaian Indikator Kinerja Sasaran

Sasaran III :	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			Notifikasi
Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2024			
	Target	Realisasi	Capaian	
NILAI AKIP Perangkat Daerah	83,06	83,30	100,2	

Keterangan : ● Mencapai/Melampaui Target ; ● Belum Mencapai Target

Formulasi Indikator yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah **"NILAI AKIP Hasil LHE Inspektorat"**.

Target Indikator sasaran Tahun 2024 adalah Nilai AKIP 83,06(A), dan realisasinya berdasarkan LHE Inspektorat Tahun 2024 adalah 83,30 dengan predikat A. Realisasi tersebut telah melebihi target yang direncanakan. Hal ini dapat tercapai karena telah dilakukan perbaikan dokumen pendukung SAKIP sesuai dengan hasil coaching Penguatan SAKIP oleh Kementerian PAN-RB, disamping itu beberapa rekomendasi

LHE Inspektorat tahun sebelumnya juga telah ditindaklanjuti. Namun demikian masih perlu perbaikan terhadap beberapa faktor yang dapat mempengaruhi capaian kinerja diantaranya yaitu :

- a. Pelunya penerapan Punishment and Reward
- b. Pentingnya Pengisian/penginputan SKP oleh seluruh ASN
- c. Pentingnya penggunaan Aplikasi pada evaluasi kinerja
- d. Peningkatan kualitas evaluasi kinerja internal yang lebih memadai
- e. Pentingnya kepedulian serta berkomitmen seluruh ASN dalam pencapaian target kinerja OPD.

2. Perbandingan antara target dan realisasi Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

Tabel. 24
Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Sasaran III :	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah									Target Tahun 2026
Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Targ et	Realisasi	Capaian	
NILAI AKIP Perangkat Daerah	75	83,05	110,73 %	83,05	86,00	103,55 %	83,06	83,30	100,2%	80

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dilihat perbandingan capaian kinerja Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya. Dimana target setiap tahunnya dapat tercapai dengan nilai yang meningkat dan melebihi dari target yang direncanakan. Dalam pencapaian target ataupun untuk mempertahankan Nilai AKIP yang diperoleh, beberapa hal yang harus dilakukan yaitu :

- a. Melakukan Reviu kembali Dokumen Perencanaan (Renstra)
- b. Penetapan target kinerja mengacu kepada capaian dan realisasi tahun sebelumnya
- c. Melengkapi setiap indikator dengan definisi operasional dan formula perhitungan
- d. Peningkatan kualitas LKj dengan memperdalam analisis informasi dalam pencapaian kinerja dan dilengkapi dengan bukti dukung dan terdapat perbandingan dengan daerah lain/nasional untuk indikator kinerja yang sejenis.
- e. Melakukan evaluasi/monitoring terhadap pencapaian target Rencana Aksi Kinerja dan Perjanjian Kinerja.

- f. Melakukan perbaikan Penjenjangan Kinerja dengan melengkapi Crosscutting lintas OPD dalam pencapaian kinerja sasaran OPD.
- g. Melakukan evaluasi program dan kegiatan
- h. Melakukan evaluasi/monitoring terhadap pencapaian target Rencana Aksi Kinerja dan Perjanjian Kinerja secara periodik
- i. Mempublikasikan dokumen Renstra, PK, IKU dan LAKIP pada website Instansi Pemerintah
- j. Menindaklanjuti rekomendasi LHE Kementerian PAN-RB dan LHE Inspektorat.

3. Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah

Tabel. 25
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Jangka Menengah
(2021 - 2026)

Sasaran III :	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Target Akhir Renstra 2026	% Capaian s/d 2024 terhadap target akhir Renstra 2026
Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi			
	Tahun 2024	realisasi sampai dengan tahun Tahun 2024		
Nilai AKIP Perangkat Daerah	83,30	83,30	80	104,1%

Berdasarkan tabel tersebut terlihat perbandingan capaian kinerja sampai sampai dengan Tahun 2024 yaitu 83,30 dengan Predikat A telah melebihi target jangka menengah. Hal tersebut dapat dicapai karena adanya dukungan Pemerintah daerah dalam pelaksanaan Coaching Klinik untuk Penguatan SAKIP OPD dan Pemda. Dampaknya yaitu adanya perbaikan dokumen pendukung SAKIP dan beberapa rekomendasi hasil LHE Kementerian PAN-RB dan LHE Inspektorat telah ditindaklanjuti oleh OPD. Diantaranya yaitu Reviu Dokumen Renstra, Perbaikan Perjanjian Kinerja dilengkapi dengan definisi operasional, perbaikan dokumen LKJ sesuai sistematika Permenpan 53 Tahun 2014, perbaikan Dokumen IKU dilengkapi dengan definisi operasional dan formulasi, Perbaikan Penjenjangan Kinerja yang telah dilengkapi dengan Crosscutting lintas OPD dsb.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau Peningkatan/Penurunan kinerja serta alternative Solusi yang telah dilakukan

- ❖ Analisis Penyebab keberhasilan dalam pencapaian indikator sasaran yaitu :
 - Telah dilakukan perbaikan penjelasan kinerja tujuan dan sasaran pada dokumen Renstra Perangkat Daerah
 - Telah dilakukan perbaikan Penjenjangan Kinerja dengan melengkapi Crosscutting lintas OPD dalam pencapaian kinerja sasaran OPD.
 - Telah dilakukan evaluasi/monitoring terhadap pencapaian target Rencana Aksi Kinerja dan Perjanjian Kinerja secara periodik
 - Peningkatan kualitas LKj dengan memperdalam analisis informasi dalam pencapaian kinerja dan dilengkapi dengan bukti dukung dan terdapat perbandingan dengan daerah lain/nasional untuk indikator kinerja yang sejenis.
 - Bahwa setiap indikator kinerja telah dilengkapi dengan definisi operasional dan formulasi perhitungan sebagaimana tertuang dalam Dokumen Renstra dan PK OPD.
 - Telah dilakukan Perbaikan Target kinerja berdasarkan realisasi tahun sebelumnya.
- ❖ **Hambatan/Kendala**

Dalam pencapaian sasaran tersebut, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu :

 - Data pendukung dari bidang teknis belum maksimal
 - Belum adanya regulasi dalam penetapan punishment and reward sehingga hasil pengukuran kinerja tidak dapat dijadikan sebagai dasar pengurangan/penambahan penghasilan
 - Belum adanya aplikasi yang digunakan dalam pengumpulan data dan pengukuran capaian kinerja
- ❖ **Solusi**

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi maka langkah-langkah yang ditempuh adalah :

 - Memaksimalkan pengolahan data dan informasi dari bidang terkait
 - Untuk dibahas lebih lanjut dilevel pimpinan terkait regulasi penetapan punishment and reward untuk dijadikan sebagai payung hukum

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

❖ Efisiensi Anggaran

Dalam pencapaian sasaran pendukung BPBD, dilakukan beberapa efisiensi anggaran yaitu :

- Efisiensi anggaran pada belanja pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya dengan memaksimalkan peralatan yang ada dengan melakukan perbaikan sehingga layak untuk digunakan Kembali.
- Terdapat harga satuan untuk belanja pemeliharaan peralatan dan mesin yang bisa digunakan untuk membiayai lebih dari 1 unit peralatan kantor.
- Efisiensi anggaran untuk belanja logistik korban bencana dengan adanya bantuan dari BNPB, BPBD Provinsi Sulawesi Selatan serta kolaborasi dengan Dinsos & P3A serta Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan untuk pemenuhan beras bagi korban bencana.
- Efisiensi anggaran untuk belanja sarana dan prasarana penanggulangan bencana dengan adanya bantuan Sarpras Penanggulangan Bencana dari BNPB.

❖ Efisiensi Sumber Daya

- Keterbatasan jumlah ASN pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dimaksimalkan dengan rangkap jabatan sebagai pelaksana harian dan memaksimalkan tenaga upah jasa TRC dalam membantu pelaksanaan tugas ASN.
- Memaksimalkan peralatan yang ada dengan melakukan pemeliharaan peralatan kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas ASN.

❖ Analisis Efisiensi Sumber Daya

Tabel. 26
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran III :	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian (%)	Alokasi Anggaran Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	NILAI AKIP Perangkat Daerah	83,06	83,30	100,2	3.740.477.020,-	3.424.792.455,50,-	91,56%

Tabel. 27
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran III	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi Biaya
1	2	3	4	5
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	NILAI AKIP Perangkat Daerah	100,2%	91,56%	8,46%

Pencapaian sasaran pendukung sebesar 100,2% dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 91,56%, sehingga persentase efisiensi biaya adalah 8,46%. Adapun Persentase efisiensi biaya dapat hitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Persentase efisiensi biaya} = 100\% - \left[\frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\% \right]$$

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

❖ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota

Indikator Program adalah Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar dengan **formulasi : jumlah capaian kinerja seluruh kegiatan dibagi jumlah seluruh kegiatan**. Target 100% dan realisasi 92,92% dengan capaian kinerja 92,92%, dan menyerap anggaran sebesar 91,56%. Capaian kinerja program tidak mencapai target karena terdapat beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang capaiannya kinerjanya <100%, sehingga berpengaruh terhadap kinerja program secara keseluruhan. Seperti pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan, hal ini karena adanya beberapa jabatan fungsional yang belum terisi ASN. Demikian halnya dengan sub kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas dan peralatan kantor yang realisasinya disesuaikan dengan kondisi kendaraan dan peralatan yang memerlukan perbaikan. Pengadaan Mebel dan Peralatan Mesin Lainnya juga tidak terealisasi karena adanya efisiensi anggaran akibat keterlambatan dana transfer. Demikian halnya dengan pemeliharaan Musollah Kantor BPBD.

Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung

Tabel. 28
Capaian Indikator Kinerja Program Pendukung

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian (%)
I.	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Terciptanya sistem pelayanan administrasi perkantoran yang memadai	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100%	92.92%	92.92%
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun tepat waktu	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	100%	100%	100%
a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	2 Dok	2 Dok	100%
b.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	2 Dok	2 Dok	100%
c.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	2 Dok	2 Dok	100%
d.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	10 Dok	10 Dok	100%
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya laporan keuangan perangkat daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu	100%	96,87%	96,87%
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	16 Org	15 Org	93,75%
b.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD n	Tersusunnya laporan keuangan bulanan/triwulanan/se mesteran dan akhir tahun dengan baik	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	18 Dok	18 Dok	100%
3.	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi dan penatausahaan Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	Persentase BMD yang diadministrasi sesuai standar	100%	100%	100%
a.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah laporan penatausahaan BMD SKPD yang disusun tepat waktu	4 Dok	4 Dok	100%

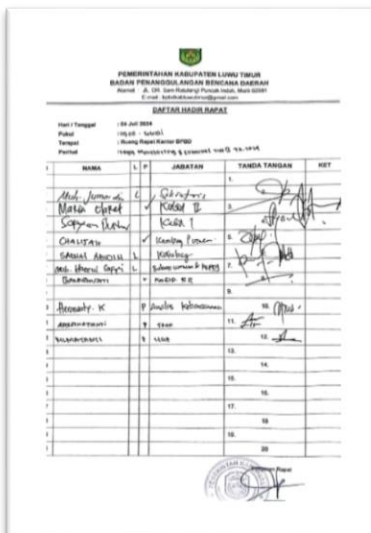
4.	Kegiatan Administrasi Kpegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase rata rata capaian kinerja administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	100%	80%	80%
a.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya peningkatan kapasitas bagi aparatur	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	15 Org	12 Org	80%
5.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Persentase rata rata capaian kinerja adaminstrasi umum Perangkat Daerah	100%	99.16%	99.16%
a.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan untuk bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	8 Jenis	8 Jenis	100%
b.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik untuk kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	20 Jenis	19 Jenis	95%
c.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk kebutuhan kantor	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	3 Jenis	3 Jenis	100%
d.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	60 Expl	60 Expl	100%
e.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terfasilitasinya makanan dan minuman untuk tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya	275 Org	275 Org	100%
f.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	60 Kali	60 Kali	100 %
6.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase BMD-Perangkat Daerah penunjang yang terpenuhi	100%	68.75%	68.75%
a.	Pengadaan Mebel	Tersedianya mebel untuk penunjang urusan perkantoran	Jumlah mebel yang diadakan	6 Unit	0 Unit	0%
b.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan/mesin lainnya untuk kebutuhan kantor	Jumlah Peralatan/Mesin Lainnya yang diadakan	4 Unit	3 Unit	75%

c.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Tersedianya kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah unit kendaraan dinas perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	1 Unit	1 Unit	100%
d.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana prasana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya untuk penunjang urusan perkantoran	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	3 Unit	3 Unit	100%
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa pendukung dan sarana penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase rata rata capaian kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	99.91%	99.91%
a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Teradministrasinya surat masuk dan surat keluar dengan baik	Jumlah surat masuk dan keluar yang diagenda	400 Surat	399 Surat	99.75%
b.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya rekening bulanan telepon, air dan listrik kantor demi kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah rekening bulanan telepon, air dan listrik kantor yang terbayarkan	36 Rek	36 Rek	100%
c.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa tenaga pelayanan umum kantor untuk penunjang urusan perkantoran	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan	2 Org	2 Org	100%
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang siap pakai	Persentase BMD penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	100%	98.71%	98.71%
a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dengan baik	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	13 Unit	13 unit	100%
b.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya dengan baik	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	26 Unit	38 Unit	146.15%
c.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya dengan baik	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 Unit	1 Unit	50%

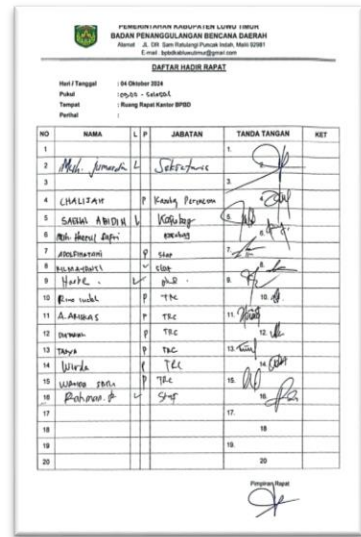
Dokumentasi Kegiatan Penunjang SKPD



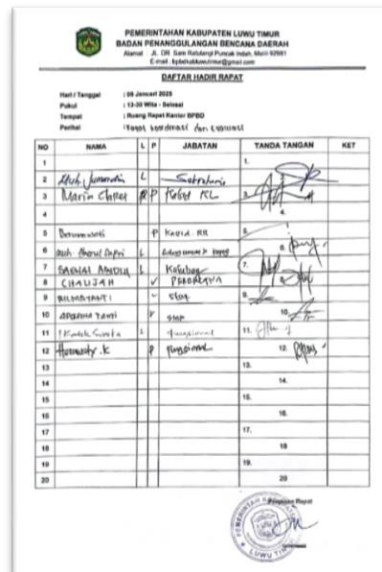
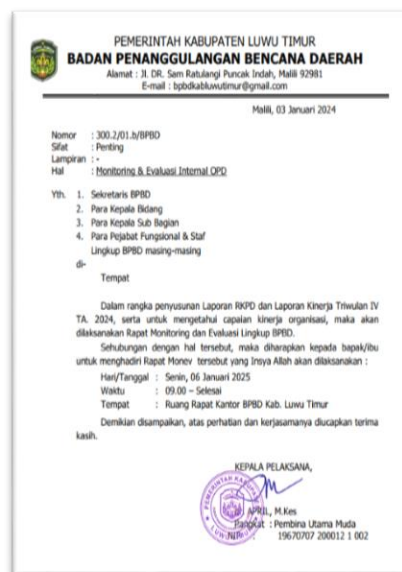
Dokumentasi Pelaksanaan Rapat Money Internal OPD Triwulan I TA. 2024



Dokumentasi Pelaksanaan Rapat Money Internal OPD Triwulan II TA. 2024



Dokumentasi Pelaksanaan Rapat Money Internal OPD Triwulan III TA. 2024



Dokumentasi Pelaksanaan Rapat Money Internal OPD Triwulan IV TA. 2024



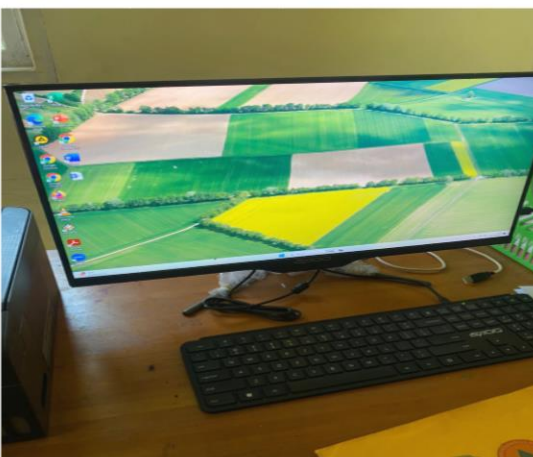
Dokumentasi Pengadaan Kendaraan Dinas



Pengadaan AC ½ PK



Pengadaan AC 1 PK



Dokumentasi Pengadaan Komputer PC 3 Unit

7. KESIMPULAN

- ❖ Capaian Kinerja Sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah yaitu 100,2% diperoleh dari rumus perhitungan :

$$= \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100$$

$$= \frac{83,30}{83,06} \times 100$$

$$= 100,2\%$$

- ❖ Alokasi anggaran yang disediakan pada Dokumen DPA-SKPD BPBD Kabupaten Luwu Timur pada Tahun Anggaran 2024 dalam pencapaian kinerja sasaran yaitu : **Rp. 3.740.477.020,-** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 3.424.792.455,50,-** atau **91,56%**.

3.1 Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan serta analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Anggaran APBD Perubahan untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur tahun 2024 adalah sebesar sebesar **Rp. 5.076.467.550,-** (*Lima Milyar Tujuh Puluh Enam Juta Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah*), terdiri dari belanja pegawai **Rp 1.995.336.482,-** belanja barang dan jasa **Rp. 2.295.631.068,-** dan belanja modal **Rp 785.500.000,-**. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 2 program, 12 kegiatan serta 38 sub kegiatan.

Dan dilakukan Pergeseran Tahap Pertama Setelah Perubahan Anggaran pada tanggal 13 Desember 2024 untuk mengakomodir Dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sebesar **Rp 7.979.000.000,-**. Dana tersebut bersumber dari Kementerian Keuangan. Dana Hibah tersebut diperuntukkan untuk Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa, serta Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam dan tidak dapat dilaksanakan karena waktu yang tersedia sudah tidak memungkinkan lagi untuk melaksanakan proses PBJ disebabkan karena penetapan SPPH Tgl 30 Oktober 2024 dan Penyaluran Dana Hibah RR pada

Tanggal 23 Desember 2024 dari Kementerian Keuangan ke Pemerintah Daerah, sehingga dianggarkan kembali pada DPA-SKPD TA. 2025.

Realisasi anggaran berdasarkan APBD Perubahan sebesar 89,36% namun bila dibandingkan dengan anggaran setelah penambahan Dana Hibah, maka realisasinya menjadi 34,75%. Untuk target dan realisasi anggaran pada Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada grafik berikut ini :



Grafik. 10
Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2024
(Berdasarkan APBD Perubahan TA. 2024)



Grafik. 11
Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2024
(Pergeseran Tahap Pertama setelah Perubahan Anggaran)

Tabel. 29
Realisasi Anggaran Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Jumlah Anggaran Pergeseran Tahap I Setelah Perubahan Rp	Jumlah Target Tahun 2024 (Berdasarkan Anggaran Kas)		Jumlah Realisasi Tahun 2024		Selisih		Sisa Anggaran	
			(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
1	2	4	5		6	7	8	9	10	11
						(6/5*100)	(5-6)	(8/5*100)	(4-6)	(10/4*100)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	13.055.467.550	13.055.467.550	100,00	4.536.592.284	34,75	8.518.875.266	65,25	8.518.875.266	65,25
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	3.740.477.020	3.740.477.020	100,00	3.424.792.456.	91,56	31.684.565	8,44	31.684.565	8,44
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	87.369.880	87.369.880	100,00	77.321.611	88,50	10.048.269	11,50	10.048.269	11,50
1	<i>Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<u>40.498.840</u>	<u>40.498.840</u>	<u>100,00</u>	<u>37.687.825</u>	<u>85,65</u>	5.811.015	<u>14,35</u>	5.811.015	<u>14,35</u>
	Belanja Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	9.000.000	9.000.000	100,00	9.000.000	100,00	-	-	-	-
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.270.770	1.270.770	100,00	1.027.145	80,83	243.625	19,17	243.625	19,17
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	656.070	656.070	100,00	568.760	86,69	87.310	13,31	87.310	13,31
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Cetak	2.750.000	2.750.000	100,00	1.964.040	71,42	785.960	28,58	785.960	28,58
	<i>Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Komputer</i>	<i>1.662.000</i>	<i>1.662.000</i>	<i>100,00</i>	<i>1.596.380</i>	<i>96,05</i>	<i>65.620</i>	<i>3,95</i>	<i>65.620</i>	<i>3,95</i>
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.000.000	3.000.000	100,00	-	-	3.000.000	100,00	3.000.000	100,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	22.160.000	22.160.000	100,00	20.531.500	92,65	1.628.500	7,35	1.628.500	7,35
2	<i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	<u>4.052.560</u>	<u>4.052.560</u>	<u>100,00</u>	<u>3.353.120</u>	<u>82,74</u>	699.440	<u>17,26</u>	699.440	<u>17,26</u>
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.169.990	1.169.990	100,00	1.096.970	93,76	73.020	6,24	73.020	6,24
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	390.570	390.570	100,00	366.490	93,83	24.080	6,17	24.080	6,17
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.200.000	1.200.000	100,00	641.800	53,48	558.200	46,52	558.200	46,52
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.292.000	1.292.000	100,00	1.247.860	96,58	44.140	3,42	44.140	3,42
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	<i>Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD</i>	<u>4.365.200</u>	<u>2.468.700</u>	<u>100,00</u>	<u>3.944.404</u>	90,36	420.796	<u>6,64</u>	420.796	<u>6,64</u>
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	353.700	353.700	100,00	353.700	100,00	-	-	-	-
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	218.500	218.500	100,00	202.500	92,68	16.000	7,32	16.000	7,32
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Cetak	2.550.000	1.275.000	50,00	2.212.204	86,75	337.796	13,25	337.796	13,25
	<i>Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Komputer</i>	<i>1.243.000</i>	<i>621.500</i>	<i>50,00</i>	<i>1.176.000</i>	<i>94,61</i>	<i>67.000</i>	<i>5,39</i>	<i>67.000</i>	<i>5,39</i>
4	<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<u>38.453.280</u>	<u>38.453.280</u>	<u>100,00</u>	<u>35.336.262</u>	<u>91,89</u>	3.117.018	<u>8,11</u>	3.117.018	<u>8,11</u>
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.322.710	1.322.710	100,00	1.221.260	92,33	101.450	7,67	101.450	7,67
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	457.570	457.570	100,00	433.570	94,75	24.000	5,25	24.000	5,25
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Cetak	3.000.000	3.000.000	100,00	2.533.572	84,45	466.428	15,55	466.428	15,55
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.993.000	2.993.000	100,00	1.408.860	47,07	1.584.140	52,93	1.584.140	52,93

	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.000.000	3.000.000	100,00	2.093.000	69,77	907.000	30,23	907.000	30,23
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	27.680.000	27.680.000	100,00	27.646.000	99,88	34.000	0,12	34.000	0,12
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.006.189.082	2.006.189.082	100,00	1.911.435.547	95,28	94.753.536	4,72	94.753.536	4,72
5	<u>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</u>	<u>1.946.736.482</u>	<u>1.946.736.482</u>	<u>100,00</u>	<u>1.859.916.437</u>	<u>95,54</u>	86.820.046	<u>4,46</u>	86.820.046	<u>4,46</u>
	Belanja Gaji Pokok PNS	762.439.637	762.439.637	100,00	741.939.600	97,31	20.500.037	2,69	20.500.037	2,69
	Belanja Gaji Pokok PPPK	45.971.660	45.971.660	100,00	44.850.400	97,56	1.121.260	2,44	1.121.260	2,44
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	71.931.678	71.931.678	100,00	68.048.349	94,60	3.883.239	5,40	3.883.239	5,40
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	788.138	788.138	100,00	-	-	788.138	100,00	788.138	100,00
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	128.590.000	128.590.000	100,00	120.490.000	93,70	8.100.000	6,30	8.100.000	6,30
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	3.240.000	3.240.000	100,00	-	-	3.240.000	100,00	3.240.000	100,00
	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	2.590.000	2.590.000	100,00	2.405.000	92,86	185.000	7,14	185.000	7,14
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	7.700.000	7.700.000	100,00	6.405.000	83,18	1.295.000	16,82	1.295.000	16,82
	Belanja Tunjangan Beras PNS	41.329.569	41.329.569	100,00	38.889.540	94,10	2.440.029	5,90	2.440.029	5,90
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1.400.000	1.400.000	100,00	1.013.880	72,42	386.120	27,58	386.120	27,58
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	12.675.000	12.675.000	100,00	7.552.618	59,59	5.122.382	40,41	5.122.382	40,41
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	1.400.000	1.400.000	100,00	86.528	6,87	1.313.472	93,82	1.313.472	93,82
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	49.400	49.400	100,00	12.447	25,20	36.953	74,80	36.953	74,80
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.400	1.400	100,00	1.128	80,57	272	19,43	272	19,43
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS	855.500.000	855.500.000	100,00	819.507.949	95,79	35.992.052	4,21	35.992.052	4,21
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PPPK	11.130.000	11.130.000	100,00	8.713.998	78,29	2.416.002	21,71	2.416.002	21,71
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja PNS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	<u>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD</u>	<u>59.452.600</u>	<u>59.452.600</u>	<u>100,00</u>	<u>51.519.110</u>	<u>86,66</u>	7.933.490	<u>13,34</u>	7.933.490	<u>13,34</u>
	Belanja Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	22.200.000	22.200.000	100,00	22.200.000	100,00	-	-	-	-
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.615.600	2.615.600	100,00	2.470.910	94,47	144.690	5,53	144.690	5,53
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.324.000	1.324.000	100,00	1.241.500	93,77	82.500	6,23	82.500	6,23
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.205.000	1.205.000	100,00	488.600	40,55	716.400	59,45	716.400	59,45
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.838.000	1.838.000	100,00	1.737.900	94,55	100.100	5,45	100.100	5,45
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000	1.200.000	100,00	-	-	1.200.000	100,00	1.200.000	100,00
	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	29.070.000	29.070.000	100,00	23.380.200	80,43	5.689.800	19,57	5.689.800	19,57
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	20.326.300	20.326.300	100,00	19.360.820	95,25	965.480	4,75	965.480	4,75
7	<u>Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</u>	<u>20.326.300</u>	<u>20.326.300</u>	<u>100,00</u>	<u>19.360.820</u>	<u>95,25</u>	965.480	<u>4,75</u>	965.480	<u>4,75</u>
	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	12.600.000	12.600.000	100,00	12.600.000	100,00	-	-	-	-
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	543.300	543.300	100,00	459.700	84,61	83.600	15,39	83.600	15,39
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	347.000	347.000	100,00	326.750	94,16	20.250	5,84	20.250	5,84
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Cetak	644.000	644.000	100,00	-	-	644.000	100,00	644.000	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Komputer	912.000	912.000	100,00	872.970	95,72	39.030	4,28	39.030	4,28

	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.280.000	5.280.000	100,00	5.101.400	96,62	178.600	3,38	178.600	3,38
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	75.440.000	75.440.000	100,00	51.741.900	68,59	23.698.100	31,41	23.698.100	31,41
8	<u>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</u>	<u>75.440.000</u>	<u>75.440.000</u>	<u>100,00</u>	<u>51.741.900</u>	<u>68,59</u>	23.698.100	<u>31,41</u>	23.698.100	<u>31,41</u>
	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	45.000.000	45.000.000	100,00	25.270.000	56,16	19.730.000	43,84	19.730.000	43,84
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	30.440.000	30.440.000	100,00	26.471.900	86,96	3.968.100	13,04	3.968.100	13,04
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	541.562.300	541.562.300	100,000	525.079.076	96,96	16.483.224	14,23	16.483.224	3,04
9	<u>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</u>	<u>12.625.000</u>	<u>12.625.000</u>	<u>100,00</u>	<u>8.626.00</u>	<u>68,32</u>	3.999.000	<u>31,68</u>	3.999.000	<u>31,68</u>
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Listrik	12.625.000	12.625.000	100,00	8.626.000	68,32	3.999.000	31,68	3.999.000	31,68
10	<u>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</u>	<u>30.347.500</u>	<u>30.347.500</u>	<u>100,00</u>	<u>29.231.000</u>	<u>96,32</u>	1.116.500	<u>3,68</u>	1.116.500	<u>3,68</u>
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	22.760.000	22.760.000	100,00	22.315.000	98,04	445.000	1,96	445.000	1,96
	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	7.587.500	7.587.500	100,00	6.916.000	91,51	671.500	8,85	671.500	8,85
11	<u>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</u>	<u>22.910.000</u>	<u>22.910.000</u>	<u>100,00</u>	<u>15.260.000</u>	<u>66,61</u>	7.650.000	<u>33,39</u>	7.650.000	<u>33,39</u>
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Cetak	22.910.000	22.910.000	100,00	15.260.000	66,61	7.650.000	33,39	7.650.000	33,39
12	<u>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</u>	<u>8.040.000</u>	<u>8.040.000</u>	<u>100,00</u>	<u>8.040.000</u>	<u>100,00</u>	-	-	-	-
	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	8.040.000	8.040.000	100,00	8.040.000	100,00	-	-	-	-
13	<u>Fasilitas Kunjungan Tamu</u>	<u>15.125.000</u>	<u>15.125.000</u>	<u>100,00</u>	<u>11.574.000</u>	<u>76,52</u>	3.551.000	<u>23,48</u>	3.551.000	<u>23,48</u>
	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	15.125.000	15.125.000	100,00	11.574.000	76,52	3.551.000	23,48	3.551.000	23,48
14	<u>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</u>	<u>452.514.800</u>	<u>452.514.800</u>	<u>100,00</u>	<u>452.348.076</u>	<u>99,96</u>	166.724	<u>0,04</u>	166.724	<u>0,04</u>
	Belanja Jasa Tenaga Supir	18.000.000	18.000.000	100,00	18.000.000	100,00	-	-	-	-
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	434.514.800	434.514.800	100,00	434.348.076	99,96	166.724	0,40	166.724	0,40
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	659.600.000	659.600.000	100,00	619.288.000	93,89	40.312.000	6,11	40.312.000	6,11
15	<u>Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</u>	<u>551.000.000</u>	<u>551.000.000</u>	<u>100,00</u>	<u>495.838.000</u>	<u>99,79</u>	1.162.000	<u>0,21</u>	1.162.000	<u>0,21</u>
	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang (MOBIL)	551.000.000	551.000.000	100,00	495.838.000	99,79	1.162.000	0,21	1.162.000	0,21
16	<u>Pengadaan Mebel</u>	<u>34.000.000</u>	<u>34.000.000</u>	<u>100,00</u>	-	-	34.000.000	<u>100,00</u>	34.000.000	<u>100,00</u>
	Belanja Modal Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor (Lemari perlengkapan 1 unit, Lemari Amplifier 1 unit)	7.500.000	7.500.000	100,00	-	-	7.500.000	100,00	7.500.000	100,00
	Belanja Modal Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor (FILLING KABINET 1 unit, LEMARI ARSIP 3 unit)	26.500.000	26.500.000	100,000	-	-	26.500.000	100,00	26.500.000	100,00
17	<u>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</u>	<u>59.000.000</u>	<u>59.000.000</u>	<u>100,00</u>	<u>53.850.000</u>	<u>91,27</u>	5.150.000	<u>8,73</u>	5.150.000	<u>8,73</u>
-	<u>Belanja Modal Alat Pembersih (MESIN BABAT 1 unit)</u>	<u>5.000.000</u>	<u>5.000.000</u>	<u>100,00</u>	-	-	5.000.000	<u>100,00</u>	5.000.000	100,00
	Belanja Modal Personal Computer (KOMPUTER/PC 3 unit)	54.000.000	54.000.000	100,00	53.850.000	99,72	150.000	0,28	150.000	0,28
18	<u>Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</u>	<u>15.600.000</u>	<u>15.600.000</u>	<u>100,00</u>	<u>15.600.000</u>	<u>100,00</u>	-	-	-	-

	Belanja Modal Alat Pendingin (AC 1/2 Pk 2 Unit, AC 1Pk 1 Unit)	15.600.000	15.600.000	100,00	15.600.000	100,00	-	-	-	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	78.889.458	78.889.458	100,00	77.453.502	98,18	1,435.956	1,82	1,435.956	1,82
19	<u>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</u>	<u>4.199.970</u>	<u>4.199.970</u>	<u>100,00</u>	<u>3.867.000</u>	<u>92,08</u>	332.715	7,92	332.715	7,92
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.175.340	2.175.340	100,00	2.062.205	94,80	113.135	5,20	113.135	5,20
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	462.630	462.630	100,00	432.050	93,39	30.580	6,61	30.580	6,61
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Benda Pos	500.000	500.000	100,00	500.000	100,00	-	-	-	-
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Komputer	912.000	912.000	100,00	873.000	95,72	39.000	4,28	39.000	4,28
	Belanja Paket/Pengiriman	150.000	150.000	100,00	-	-	150.000	100,00	150.000	100,00
20	<u>Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</u>	<u>54.889.488</u>	<u>54.889.488</u>	<u>100,00</u>	<u>54.186.247</u>	<u>98,72</u>	703.241	1,28	703.241	1,28
	Belanja Tagihan Telpon	1.560.000	1.560.000	100,00	1.498.400	96,05	61.600	3,95	61.600	3,95
	Belanja Tagihan Air	5.313.600	5.313.600	100,00	4.889.900	92,03	423.700	7,97	423.700	7,97
	Belanja Tagihan Listrik	48.015.888	48.015.888	100,00	47.797.947	99,55	217.941	0,45	217.941	0,45
21	<u>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</u>	<u>19.800.000</u>	<u>19.800.000</u>	<u>100,00</u>	<u>19.400.000</u>	<u>97,98</u>	400.000	2,02	400.000	2,02
	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	4.800.000	4.800.000	100,00	4.400.000	91,67	400.000	8,33	400.000	8,33
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	15.000.000	15.000.000	100,00	15.000.000	100,00	-	-	-	-
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintahan Daerah	271.000.000	271.000.000	100,00	143.112.000	52,79	127.988.000	47,21	127.988.000	47,21
22	<u>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</u>	<u>93.300.000</u>	<u>93.300.000</u>	<u>100,00</u>	<u>64.418.000</u>	<u>74,40</u>	23.882.000	25,60	23.882.000	25,60
-	Belanja pembayaran pajak, bea, dan perizinan	11.600.000	16.600.000	100,00	4.835.500	41,69	6.764.500	58,31	6.764.500	58,31
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	12.800.000	12.800.000	100,00	6.785.000	53,01	6.015.000	46,99	6.015.000	46,99
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	68.900.000	68.900.000	100,00	57.797.500	83,89	11.102.500	16,11	11.102.500	16,11
23	<u>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</u>	<u>67.790.000</u>	<u>67.790.000</u>	<u>100,00</u>	<u>59.750.000</u>	<u>88,14</u>	8.040.000	11,86	8.040.000	11,86
	Belanja Pemeliharaan Alat Berat-Alat Bantu-ElektrikGenerating Set	4.500.000	4.500.000	100,00	4.085.000	90,78	415.000	9,22	415.000	9,22
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor -Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya	49.500.000	49.500.000	100,00	43.125.000	87,12	6.375.000	12,88	6.375.000	12,88
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya (chainsaw, tenda, mesin babat)	2.950.000	2.950.000	100,00	2.900.000	98,31	50.000	1,69	50.000	1,69
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Pendingin	3.000.000	3.000.000	100,00	1.950.000	65,00	1.050.000	35,00	1.050.000	35,00
	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer (Komputer/PC, Laptop)	5.840.000	5.840.000	100,00	5.830.000	99,83	10.000	0,17	10.000	0,17
	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer -Peralatan Personal Computer (Printer)	2.000.000	2.000.000	100,00	1.860.000	93,00	140.000	7,00	140.000	7,00
24	<u>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</u>	<u>110.010.000</u>	<u>110.010.000</u>	<u>100,00</u>	<u>13.944.000</u>	<u>12,68</u>	96.066.000	87,32	96.066.000	87,32
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	110.010.000	110.010.000	100,00	13.944.000	12,68	96.066.000	87,32	96.066.000	87,32

	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	9.314.990.530	9.314.990.530	100,00	1.111.799.829	11,94	8.203.190.701	88,06	8.203.190.701	88,06
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	116.395.070	116.395.070	100,00	114.704.612	98,55	1.690.458	1,45	1.690.458	1,45
25	<u>Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)</u>	<u>116.395.070</u>	<u>116.395.070</u>	<u>100,00</u>	<u>114.704.612</u>	<u>98,55</u>	1.690.458	<u>1,45</u>	1.690.458	<u>1,45</u>
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	4.047.500	4.047.500	100,00	3.896.310	96,26	151.190	3,74	151.190	3,74
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	180.570	180.570	100,00	168.550	93,34	12.020	6,66	12.020	6,66
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	755.000	755.000	100,00	528.000	69,93	227.000	30,07	227.000	30,07
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Komputer	532.000	532.000	100,00	450.000	84,59	82.000	15,41	82.000	15,41
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.000.000	11.000.000	100,00	10.917.500	99,25	82.500	0,75	82.500	0,75
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.500.000	5.500.000	100,00	5.500.000	100,00	-	-	-	-
	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.080.000	1.080.000	100,00	1.080.000	100,00	-	-	-	-
	Belanja Sewa Hotel	900.000	900.000	100,00	900.000	100,00	-	-	-	-
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.500.000	1.500.000	100,00	1.483.500	98,90	16.500	1,10	16.500	1,10
	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya (PAPAN HIMBAUAN 3 Unit)	90.900.000	90.900.000	100,00	89.780.751	98,77	1.119.248	1,23	1.119.248	1,23
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	257.723.360	257.723.360	100,00	174.807.110	67,94	82.490.250	32,06	82.490.250	32,06
26	<u>Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan (Desa Tangguh Bencana)</u>	<u>57.937.060</u>	<u>57.937.060</u>	<u>100,00</u>	<u>55.699.270</u>	<u>96,14</u>	2.237.790	<u>3,86</u>	2.237.790	<u>3,86</u>
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	434.420	434.420	100,00	320.770	73,84	113.650	26,16	113.650	26,16
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	580.640	580.640	100,00	560.500	96,53	20.140	3,47	20.140	3,47
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	1.230.000	1.230.000	100,00	1.193.600	97,04	36.400	2,96	36.400	2,96
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Komputer	542.000	542.000	100,00	530.000	97,79	12.000	2,21	12.000	2,21
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.200.000	13.200.000	100,00	13.124.000	99,42	76.000	0,58	76.000	0,58
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	23.750.000	23.750.000	100,00	23.750.000	100,00	-	-	-	-
	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.080.000	1.080.000	100,00	1.080.000	100,00	-	-	-	-
	Belanja Sewa Hotel	5.400.000	5.400.000	100,00	5.400.000	100,00	-	-	-	-
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11.720.000	11.720.000	100,00	9.740.400	83,11	1.979.600	16,89	1.979.600	16,89
27	<u>Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota</u>	<u>35.877.450</u>	<u>35.877.450</u>	<u>100,00</u>	<u>29.619.680</u>	<u>82,56</u>	6.257.770	17,44	6.257.770	<u>17,44</u>
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	919.880	919.880	100,00	881.900	95,87	37.980	4,13	37.980	<u>4,13</u>
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	105.570	105.570	100,00	99.780	94,52	5.790	5,48	5.790	<u>5,48</u>
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	1.510.000	1.510.000	100,00	1.038.400	68,77	471.600	31,23	471.600	<u>31,23</u>
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Komputer	162.000	162.000	100,00	150.000	92,59	12.000	7,41	12.000	<u>7,41</u>
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.800.000	8.800.000	100,00	6.669.600	75,79	2.130.400	24,21	2.130.400	<u>24,21</u>
	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	5.000.000	5.000.000	100,00	3.700.000	74,00	1.300.000	26,00	1.300.000	<u>26,00</u>
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	10.000.000	10.000.000	100,00	10.000.000	100,00	-	-	-	-
	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.080.000	1.080.000	100,00	-	-	1.080.000	100,00	1.080.000	<u>100,00</u>

	Belanja sewa bangunan gedung tempat pertemuan	3.000.000	3.000.000	100,00	3.000.000	100,00	-	-	-	-
	Belanja Sewa Hotel	1.800.000	1.800.000	100,00	1.500.000	83,33	300.000	16,67	300.000	<u>16,67</u>
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.500.000	3.500.000	100,00	2.580.000	73,71	920.000	26,29	920.000	<u>26,29</u>
28	<u>Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</u>	<u>36.712.100</u>	<u>36.712.100</u>	<u>100,00</u>	<u>36.712.100</u>	<u>100,00</u>	-	-	-	-
	Belanja Bahan bahan lainnya	5.000.000	5.000.000	100,00	4.677.000	93,54	-	-	-	-
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	271.530	271.530	100,00	271.530	100,00	-	-	-	-
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	228.570	228.570	100,00	228.570	100,00	-	-	-	-
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	1.175.000	1.175.000	100,00	1.175.000	100,00	-	-	-	-
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Komputer	613.000	613.000	100,00	550.000	89,72	-	-	-	-
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.200.000	16.200.000	100,00	16.200.000	100,00	-	-	-	-
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8.250.000	8.250.000	100,00	8.250.000	100,00	-	-	-	-
	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.200.000	1.200.000	100,00	1.160.000	96,67	-	-	-	-
	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	1.500.000	1.500.000	100,00	1.500.000	100,00	-	-	-	-
	Belanja Sewa Hotel	2.700.000	2.700.000	100,00	2.700.000	100,00	-	-	-	-
29	<u>Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota</u>	<u>61.020.750</u>	<u>61.020.750</u>	<u>100,00</u>	<u>52.776.060</u>	86,49	8.244.690	<u>13,51</u>	8.244.960	<u>13,51</u>
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	1.781.680	1.781.680	100,00	1.690.710	94,89	90.970	5,11	90.970	5,11
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	187.070	187.070	100,00	173.050	92,51	14.020	7,49	14.020	7,49
	Belanja alat atau bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak	1.440.000	1.440.000	100,00	1.435.000	99,65	5.000	0,35	5.000	0,35
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Komputer	532.000	532.000	100,00	480.000	90,23	52.000	9,77	52.000	9,77
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.300.000	7.300.000	100,00	6.700.000	91,78	600.000	8,22	600.000	8,22
	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	11.500.000	11.500.000	100,00	11.500.000	100,00	-	-	-	-
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	11.500.000	11.500.000	100,00	11.500.000	100,00	-	-	-	-
	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	11.080.000	11.080.000	100,00	10.540.000	95,13	540.000	4,87	540.000	4,87
	Belanja sewa bangunan gedung tempat pertemuan	3.000.000	3.000.000		-		-	-	3.000.000	<u>100,00</u>
	Belanja Sewa Hotel	5.400.000	5.400.000	100,00	5.400.000	100,00	-	-	-	-
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7.300.000	7.300.000	100,00	3.357.000	45,99	3.942.700	54,01	3.942.700	54,01
30	<u>Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota</u>	<u>65.750.000</u>	<u>65.750.000</u>	<u>100,00</u>	-	-	65.750.000	<u>100,00</u>	65.750.000	<u>100,00</u>
	Belanja Modal Alat kantor lainnya (Chainsaw 2 Unit)	35.000.000	35.000.000	100,00	-	-	35.000.000	100,00	35.000.000	<u>100,00</u>
	Belanja Modal Alat SAR Lainnya (Helm safety 15 bh, jasa hujan 30 bh, sepatu Boat 30 psg)	30.750.000	30.750.000	100,00	-	-	30.750.000	100,00	30.750.000	<u>100,00</u>
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	772.688.140	772.688.140	500,00	702.262.851	90,89	70.425.289	9,11	70.425.289	<u>9,11</u>
31	<u>Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota</u>	<u>593.750.900</u>	<u>593.750.900</u>	<u>100,00</u>	<u>574.573.790</u>	96,77	19.177.110	3,23	19.177.110	3,23
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	8.400.000	8.400.000	100,00	3.133.000	37,30	5.267.000	62,70	5.267.000	<u>62,70</u>
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	317.900	317.900	100,00	301.300	94,78	16.600	5,22	16.600	5,22
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	574.000	574.000	100,00	533.600	92,96	40.400	7,04	40.400	7,04
	Belanja alat atau bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak	175.000	175.000	100,00	164.000	93,71	11.000	6,29	11.000	6,29

	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Komputer	324.000	324.000	100,00	250.000	77,16	74.000	22,84	74.000	<u>22,84</u>
	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	530.160.000	530.160.000	100,00	519.240.000	97,94	10.920.000	2,06	10.920.000	2,06
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	53.8000.000	53.8000.000	100,00	519.240.000	97,94	10.920.000	2,06	10.920.000	2,06
32	<u>Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota</u>	<u>64.495.000</u>	<u>64.495.000</u>	100,000	<u>45.206.470</u>	70,09	19.288.530	29,91	19.288.530	29,91
	Belanja Bahan-Bahan Dan Pelumas	15.170.000	15.170.000	100,00	8.100.000	53,39	7.070.000	46,61	7.070.000	46,61
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.000.000	2.000.000	100,00	750.000	37,50	1.250.000	62,50	1.250.000	62,50
	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.925.000	1.925.000	100,00	-	-	1.925.000	100,00	1.925.000	<u>100,00</u>
	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	8.000.000	8.000.000	100,00	450.000	5,63	7.550.000	94,38	7.550.000	94,38
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	37.400.000	37.400.000	100,00	35.906.470	96,01	1.493.530	3,99	1.493.530	3,99
33	<u>Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota</u>	<u>95.141.600</u>	<u>95.141.600</u>	100,00	<u>82.482.591</u>	86,69	12.659.009	13,31	12.659.009	13,31
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	258.600	258.600	100,00	179.820	69,54	78.780	30,46	78.780	30,46
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.086.000	1.086.000	100,00	1.002.330	92,30	83.670	7,70	83.670	7,70
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.317.000	1.317.000	100,00	1.310.000	99,47	7.000	0,53	7.000	0,53
	Belanja persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga-persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga	10.000.000	10.000.000	100,00	9.800.000	98,00	200.000	2,00	200.000	2,00
	Belanja Paket/Pengiriman	2.5000.000	2.5000.000	100,00	-	-	2.5000.000	100,00	2.500.000	<u>100,00</u>
	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	4.500.000	4.500.000	100,00	-	-	4.500.000	100,00	4.500.000	<u>100,00</u>
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	75.480.000	75.480.000	100,00	70.190.441	92,99	5.289.559	7,01	5.289.559	7,01
34	<u>Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit</u>	<u>9.335.040</u>	<u>9.335.040</u>	100,00	-	-	9.335.040	100,00	9.335.040	<u>100,00</u>
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	524.400	524.400	100,00	-	-	524.400	100,00	524.400	<u>100,00</u>
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	610.640	610.640	100,00	-	-	610.640	100,00	610.640	<u>100,00</u>
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Komputer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.000.000	1.000.000	100,00	-	-	1.000.000	100,00	1.000.000	<u>100,00</u>
	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	750.000	750.000	100,00	-	-	750.000	100,00	750.000	<u>100,00</u>
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6.450.000	6.450.000	100,00	-	-	6.450.000	100,00	6.450.000	<u>100,00</u>
35	<u>Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana</u>	<u>9.965.600</u>	<u>9.965.600</u>	100,00	-	-	9.965.600	100,00	9.965.600	<u>100,00</u>
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	210.600	210.600	100,00	-	-	210.600	100,00	210.600	<u>100,00</u>
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	246.000	246.000	100,00	-	-	246.000	100,00	246.000	<u>100,00</u>
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Komputer	669.000	669.000	100,00	-	-	669.000	100,00	669.000	<u>100,00</u>
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.000.000	2.000.000	100,00	-	-	2.000.000	100,00	2.000.000	<u>100,00</u>
	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.500.000	1.500.000	100,00	-	-	1.500.000	100,00	1.500.000	<u>100,00</u>
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.340.000	5.340.000	100,00	-	-	5.340.000	100,00	5.340.000	<u>100,00</u>
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	8.168.609.960	8.168.609.960	300,00	120.025.256	1,47	-	-	8.048.584.704	<u>98,53</u>
36	<u>Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota (SOP&Perbup)</u>	<u>18.139.860</u>	<u>18.139.860</u>	100,00	-	-	18.139.860	100,00	18.139.860	<u>100,00</u>
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	571.790	571.790	100,00	-	-	571.790	100,00	571.790	<u>100,00</u>
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	324.070	324.070	100,00	-	-	324.070	100,00	324.070	<u>100,00</u>

	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	600.000	600.000	100,00	-	-	600.000	100,00	600.000	<u>100,00</u>
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.044.000	1.044.000	100,00	-	-	1.044.000	100,00	1.044.000	<u>100,00</u>
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.000.000	4.000.000	100,00	-	-	4.000.000	100,00	4.000.000	<u>100,00</u>
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11.600.000	11.600.000	100,00	-	-	11.600.000	100,00	11.600.000	<u>100,00</u>
37	<u>Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota (IKD)</u>	<u>65.223.580</u>	<u>65.223.580</u>	100,00	<u>23.322.390</u>	35,76	41.901.190	64,24	41.901.190	64,24
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	3.326.870	3.326.870	100,00	1.005.180	30,21	2.321.690	69,79	2.321.690	69,79
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	329.710	329.710	100,00	308.340	93,52	21.370	6,48	21.370	<u>6,48</u>
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	895.000	895.000	100,00	90.000	10,06	805.000	89,94	805.000	89,94
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Komputer	912.000	912.000	100,00	873.870	95,82	38.130	4,18	38.130	4,18
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.500.000	8.500.000	100,00	2.480.000	29,18	6.020.000	70,82	6.020.000	70,82
	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	15.000.000	15.000.000	100,00	4.625.000	30,83	-	-	10.375	<u>69,17</u>
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	14.500.000	14.500.000	100,00	7.250.000	50,00	7.250.000	50,00	7.250.000	50,00
	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	2.160.000	2.160.000	100,00	1.080.000	50,00	1.080.000	50,00	1.080.000	50,00
	Belanja sewa bangunan gedung tempat pertemuan	4.500.000	4.500.000	100,00	-	-	-	-	4.500.000	<u>100,00</u>
	Belanja Sewa Hotel	2.700.000	2.700.000	100,00	1.350.000	50,00	1.350.000	50,00	1.350.000	<u>100,00</u>
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12.400.000	12.400.000	100,00	4.260.000	34,35	8.140.000	65,65	8.140.000	65,65
38	<u>Koordinasi Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota</u>	<u>8.085.246.520</u>	<u>8.085.246.520</u>	100,00	<u>96.702.866</u>	1,20	7.988.543.654.	98,80	7.988.543.654.	98,80
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	605.380	605.380	100,00	276.250	45,63	329.130	54,37	329.130	<u>54,37</u>
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	881.140	881.140	100,00	306.350	34,77	574.790	65,23	574.790	65,23
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	525.000	525.000	100,00	-	-	525.000	100,00	525.000	<u>100,00</u>
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Komputer	375.000	375.000	100,00	300.000	80,00	75.000	100,00	75.000	<u>100,00</u>
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.000.000	8.000.000	100,00	-	-	8.000.000	100,00	8.000.000	<u>100,00</u>
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	95.860.000	95.860.000	100,00	95.820.266	99,96	39.734	0,04	39.734	0,04
	Belanja Modal Adm dan Pengawasan jembatan pada jalan desa (Ds Kawata Kec. Wasuponda)	1.230.000.000	1.230.000.000	100,00	-	-	1.230.000.000	100,00	1.230.000.000	<u>100,00</u>
	Belanja Modal Adm dan Pengawasan bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam (Rekonstruksi Tanggul Banjir Ds lauwo Kec, Burau)	6.749.000.000	6.749.000.000	100,00	-	-	6.749.000.000	100,00	6.749.000.000	<u>100,00</u>
JUMLAH		13.055.467.550	4.534.598.843	100,00	4.536.592.284	34,75	8.518.875.266	65,25	8.518.875.266	65,25

❖ **Permasalahan dan Solusi terkait Penyerapan Anggaran Tahun 2024**

Tabel. 30
Permasalahan dan Solusi

KODE KEGIATAN					PROGRAM/KEGIATAN	PERMASALAHAN TERKAIT PENCAPAIAN KINERJA (SECARA TEKNIS BAIK FAKTOR INTERNAL MAUPUN FAKTOR EKSTERNAL)	PERMASALAHAN TERKAIT REALISASI KEUANGAN	SOLUSI
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA			-
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
1	05	01	2.01	01	Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indikator output sub kegiatan yaitu Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu sebanyak 2 dokumen. Berdasarkan anggaran kas, output sub kegiatan direncanakan pada triwulan III TA. 2023 sebanyak 2 dokumen dan telah terealisasi 2 dokumen yaitu dokumen renja pokok 2025 dan Renja Perubahan 2024 dengan capaian kinerja 100%	Disediakan anggaran kas s.d triwulan IV sebesar Rp 40.498.840.- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 34.687.825 atau sebesar 85.65%. Realisasi keuangan tidak mencapai target karena masih terdapat Belanja E-Catalog senilai Rp 1.116.895, makan minum rapat Rp 3.000.000 yang dilakukan efisiensi anggaran. Dan Rp 1.628.500 yang merupakan sisa belanja perjalanan dinas. Penggunaan anggaran untuk perjalanan dinas disesuaikan dengan undangan/persuratan	PPTK untuk lebih mencermati sisa belanja e-catalog pada perubahan anggaran
1	05	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun tepat waktu sebanyak 2 dokumen, direncanakan pada Triwulan III TA. 2024 dan terealisasi 100% yaitu Dokumen RKAP-SKPD Tahun 2024 dan RKA-SKPD TA. 2025	Disediakan anggaran kas s.d Triwulan IV sebesar Rp 4.052.560 dan realisasi Keuangan sebesar Rp. 3.353.120 atau sebesar 82.74 %. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp 699.440 merupakan sisa belanja e-catalog	PPTK untuk lebih mencermati sisa belanja e-catalog pada perubahan anggaran
1	05	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Indikator output sub kegiatan adalah jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu dengan target sebanyak 2 dokumen dan terealisasi 2 Dokumen yaitu DPA-SKPD TA. 2024 dan DPPA-SKPD TA. 2024 dengan capaian kinerja 100%.	Disediakan anggaran kas s.d triwulan IV sebesar Rp 4.365.200,- dan Realisasi keuangan sebesar Rp. 3.944.404,- atau sebesar 90.36%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp 420.796 merupakan sisa belanja e-catalog	PPTK untuk lebih mencermati sisa belanja e-catalog pada perubahan anggaran
1	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun Target s.d triwulan IV sebanyak 10 dokumen dan terealisasi 10 dokumen yaitu tersusunnya LKPJ, LPPD, LAKIP, SPM dan Laporan Evaluasi Kinerja TW 4 TA. 2023, Laporan Evaluasi RKPD TW I, II & III TA. 2024, Laporan Evaluasi RKPD Triwulan I, II & III TA. 2024 dengan capaian kinerja 100%	Disediakan anggaran kas s.d triwulan IV sebesar Rp 38.453.280,- Dan Realisasi sebesar Rp. 35.336.262 atau sebesar 91.89%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp 3.117.018 yang terdiri dari sisa belanja e-catalog sebesar Rp 2.176.018 dan Rp 907.000 merupakan sisa belanja makan-minum rapat.	PPTK untuk lebih mencermati sisa belanja e-catalog pada perubahan anggaran
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			

1	05	01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan sebanyak 16 org dan terealisasi hanya 15 org sehingga capaian kinerja 93,75 %. Hal ini disebabkan karena adanya jabatan fungsional penyetaraan yang belum terisi ASN	Disediakan anggaran kas s.d triwulan IV sebesar Rp 1.946.736.482,- dan realisasi Rp 1.859.916.436,50,- atau sebesar 95.54%. Terdapat sisa anggaran yang cukup besar karena beberapa jabatan yang belum terisi personilnya sehingga berdampak pada realisasi keuangan	
1	05	01	202	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu. Target s.d triwulan IV sebanyak 18 dokumen dan realisasi 18 dokumen yaitu Laporan Keuangan Tahun 2023 sebanyak 1 dok, Laporan Triwulan 3 dok, Laporan Bulanan Bendahara 12 dok dan Laporan semester 1 dokumen dengan capaian kinerja 100%	Disediakan anggaran kas s.d triwulan IV sebesar Rp 59.452.600,-, dan Realisasi keuangan Rp. 51.519.110,- atau sebesar 86.66%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp 7.933.490 terdiri dari Rp 1.043.690 merupakan sisa e-catalog, makan minum rapat Rp 1.200.000 dilakukan efisiensi anggaran dan Rp 5.689.800 merupakan sisa perjalanan dinas	PPTK untuk lebih mencermati sisa belanja e-catalog dan belanja lainnya pada perubahan anggaran
1	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD			
1	05	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun dan target s.d triwulan IV sebanyak 4 dokumen dan realisasi 4 dokumen dengan capaian kinerja 100%	Disediakan anggaran kas s.d triwulan IV sebesar Rp 20.326.300,- dan Realisasi sebesar Rp.19.360.820 atau sebesar 95.25%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp 965.480 terdiri dari sisa belanja e-catalog sebesar Rp 786.880 dan sisa perjalanan dinas sebesar Rp 178.600	PPTK untuk lebih mencermati sisa belanja e-catalog pada perubahan anggaran
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
1	05	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan, target s.d triwulan sebanyak 15 orang dan terealisasi 12 org (Adapun bimtek/diklat yang diikuti yaitu Bimtek Manajemen Bencana Tingkat Operator metode non klasikal =1 org Diklat Manajemen Dasar Bencana = 1 orang, Bimtek Penganggaran TAPD = 1 org, Bimtek Perencanaan Keuangan Daerah = 2 org, Bimtek Pengelola sisten BMD= 1 org dan Bimtek PPK Type-C = 1 org, Diklatpim III 1 org, Diklatpim IV 1 org. Bimtek Manjemen Kepegawaian 1 org, Pelatihan SAR Pertolongan Pertama (Firs Aid) 1 org, Bimtek Penyelenggaraan Hukum Adminitrasi Pemerintahan 1 org. dengan capaian kinerja 80%. Pelaksanaan sub kegiatan berdasarkan undangan ataupun pemanggilan peserta.	Disediakan anggaran kas s.d triwulan IV sebesar Rp 75.440.000,- dan realisasi Rp 51.741.900,- atau sebesar 68.59%. Terdapat sisa anggaran yang cukup besar karena beberapa jadwal bimtek yang direncanakan tidak dilaksanakan karena adanya efisiensi anggaran yang dilakukan. Realisasi keuangan disesuaikan dengan undangan atau pemanggilan peserta	
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indikator out put sub kegiatan yaitu Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan sebanyak 8 jenis setiap triwulannya dan terealisasi 8 jenis yaitu Balon Lampu, Kabel, Fitting Lampu, Terminal, Steker dan trafo, saklar dengan realisasi kinerja 100%.	Dan disediakan anggaran s.d triwulan IV sebesar Rp 12.625.000,- dan realisasi keuangan Rp. 8.626.000 (68.32%). Terdapat sisa anggaran sebesar Rp 3.999.000 yang tidak dibelanjakan karena menyesuaikan dengan kebutuhan kantor. Pada dasarnya penggunaan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan kantor	PPTK mencermati kebutuhan kantor untuk disesuaikan pada saat perubahan anggaran.
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan dengan target sebanyak 20 jenis setiap triwulan, dan terealisasi 19 jenis yaitu BBM operasional 2 jenis dan 17 jenis alat dan bahan kebersihan dengan persentase capaian kinerja 95%.	Disediakan anggaran s.d triwulan IV sebesar Rp 30.347.500,- dan Realisasi keuangan Rp 29.231.000,- atau sebesar 96.32%. Penggunaan anggaran disesuaikan kebutuhan kantor.	

1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah Barang cetak dan/atau penggandaan yang disediakan sebanyak 3 jenis setiap triwulan, dan terealisasi 100% yaitu cetak, jilid dan penggandaan	Disediakan anggaran kas s.d triwulan IV sebesar Rp 22.910.000,- Realisasi keuangan Rp. 15.260.000 atau sebesar 66.61%. Terdapat sisa anggaran yang cukup besar karena beberapa jenis barang cetakan yang tidak dibelanjakan misalnya cetak blanko SPPD karena blanko SPPD yang digunakan langsung diprint sesuai kebutuhan. Begitu juga dengan cetak spanduk, penggunaan anggarannya disesuaikan dengan pelaksanaan kegiatan/hari raya yang dilaksanakan setiap tahun	PPTK mencermati rincian belanja pada saat perubahan anggaran
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, dan target s.d triwulan IV sebanyak 60 expl dan realisasi 60 expl yaitu koran lokal 12 expl, koran nasional 12 expl, koran regional 36 expl dengan capaian kinerja 100%	Disediakan anggaran kas s.d triwulan IV sebesar Rp 8.040.000,- dan realisasi keuangan Rp 8.040.000,- atau sebesar 100%.	
1	05	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah tamu yang difasilitasi, dan target s.d triwulan IV sebanyak 275 org dan terealisasi 275 org dengan capaian kinerja 100%	Disediakan anggaran kas s.d triwulan IV sebesar Rp 15.125.000 dan realisasi keuangan Rp. 11.574.000 atau 76.52%. Penggunaan anggaran disesuaikan dengan jumlah kunjungan tamu. Realisasi keuangan kurang dari 100% karena adanya belanja snack yang tidak direalisasikan.	PPTK mencermati realisasi belanja pada saat perubahan anggaran
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti, target s.d triwulan IV sebanyak 60 kali dan realisasi 60 kali, capaian kinerja 100%.	Disediakan anggaran kas s.d triwulan IV sebesar Rp 452.514.800,- dan realisasi keuangan Rp 452.348.076 atau sebesar 99.96%.	
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
1	05	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Indikator sub kegiatan adalah Jumlah mebel yang diadakan sebanyak 6 unit. Berdasarkan anggaran kas, sub kegiatan ini direncanakan pada Triwulan II TA. 2024. Namun tertunda pelaksanaannya karena adanya perbaikan rekening belanja sehingga menunggu perubahan anggaran. Namun tidak terealisasi karena dilakukan efisiensi setelah verifikasi dan evaluasi oleh TAPD dengan pertimbangan adanya keterlambatan dana transfer yang berisiko kemungkinan tidak dapat terbayarkan diakhir tahun dan bilamana tersedia anggaran di bulan desember maka terkendala waktu pengadaan yang sangat singkat.	Disediakan anggaran kas s.d triwulan IV sebesar Rp 34.000.000, yaitu belanja Filling Kabinet, Lemari perlengkapan, Lemari Amplifier Lemari arsip dan realisasi keuangan 0%. Berdasarkan anggaran kas, sub kegiatan ini direncanakan pada Triwulan II TA. 2024. namun tidak terealisasi karena dilakukan efisiensi setelah verifikasi dan evaluasi oleh TAPD dengan pertimbangan adanya keterlambatan dana transfer yang berisiko kemungkinan tidak dapat terbayarkan diakhir tahun dan bilamana tersedia anggaran di bulan desember maka terkendala waktu singkat yang tidak memungkinkan untuk melakukan proses PBJ.	Agar PPTK mencermati anggaran kas yang telah direncanakan serta pemenuhan target kinerja sesuai rencana aksi dan percepatan realisasi belanja melalui e-catalog di awal tahun.
1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Peralatan/Mesin Lainnya yang diadakan sebanyak 4 unit. Berdasarkan anggaran kas maka Pengadaan BM. Pengadaan Peralatan dan mesin direncanakan pada Triwulan II TA. 2024. Berdasarkan anggaran kas, sub kegiatan ini direncanakan pada Triwulan II TA. 2024, Dan terealisasi di triwulan IV TA. 2024 sebanyak 3 unit komputer PC sedangkan Mesin Babat 1 unit tidak terealisasi terkendala tidak tersedia di e-catalog sehingga capaian kinerja 75%	Disediakan anggaran kas s.d triwulan IV sebesar Rp 59.000.000, yaitu belanja Komputer PC Rp 54.000.000,- dan belanja alat pembersih mesin babat Rp. 5.000.000 dan realisasi keuangan Rp 53.850.000 atau sebesar 99.72%.	Agar PPTK mencermati anggaran kas yang telah direncanakan serta pemenuhan target kinerja sesuai rencana aksi dan percepatan realisasi belanja melalui e-catalog diawal tahun
1	05	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indikator sub kegiatan adalah Jumlah kendaraan dinas yang diadakan sebanyak 1 unit. Dan realisasi 1 unit (100%)	Disediakan anggaran sebesar Rp 551.000.000,- dan realisasi Rp 549.838.000 (99.79%).	

1	05	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indikator sub kegiatan adalah umlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan sebanyak 3 unit. Dan realisasi 3 unit Pengadaan AC 1 PK = 1 unit dan AC 1/2 PK = 2 unit	Disediakan anggaran kas s.d pada triwulan IV sebesar Rp 15.600.000,yaitu belanja alat pendingin AC Rp. 15.600.000 dan realisasi sebesar Rp. 15.600.000 atau sebesar 100%.	
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Indikator out put sub kegiatan adalah Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan, dan target s.d triwulan IV sebanyak 400 surat dan realisasi 399 surat dengan persentase capaian kinerja 99,75%. Capaian kinerja disesuaikan dengan jumlah surat yang dikeluarkan maupun yang diterima.	Disediakan anggaran s.d triwulan IV sebesar Rp 4.199.970,- dan Realisasi keuangan Rp 3.867.255 atau sebesar 92.08%. Terdapat sisa anggaran Rp 332.715 terdiri dari Rp 182.715 merupakan sisa belanja e-catalog dan belanja pengiriman Rp 150.000 tidak terealisasi karena sampai dengan akhir tahun tidak terdapat kegiatan yang membutuhkan proses pengiriman	PPTK untuk lebih mencermati sisa belanja e-catalog pada perubahan anggaran
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan, dan target s.d triwulan IV sebanyak 36 rekening dan realisasi 36 rekening yaitu Listrik BPBD 12 rek, Air kantor 12 rek, kartu halo 12 rek. Capaian kinerja sebesar 100%	Disediakan anggaran s.d triwulan IV sebesar Rp 54.889.488,- Dan Realisasi keuangan Rp 54.186.247 atau 98.72%. Realisasi keuangan sifatnya Riil Cost	
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indikator out put sub kegiatan adalah Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan sebanyak 2 orang setiap triwulan. Sedangkan realisasi s.d triwulan IV sebanyak 2 org dengan capaian kinerja 100%.	Disediakan anggaran s.d triwulan IV sebesar Rp 19.800.000,- dan Realisasi keuangan Rp 19.400.000 atau 97.98%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp 400.000 karena honor Pejabat Pengadaan terbayarkan hanya bulan Februari s.d Desember 2024 disesuaikan dengan penetapan SK pejabat pengadaan yang berlaku Februari 2024	PPTK mencermati sisa anggaran pada saat perubahan anggaran
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintahan Daerah			
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indikator out put sub kegiatan Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dengan target 13 unit setiap triwulan dan realisasi s.d triwulan IV sebanyak 13 unit yaitu Kendaraan Roda dua 8 unit., Double Cabin 3 unit, Mobil Truk Serbaguna 1 unit dan Mobil Operasional TRC 1 unit. dengan capaian kinerja 100%.	Disediakan anggaran s.d triwulan IV sebesar Rp 93.300.000,- dan Realisasi keuangan Rp. 69.418.000,- atau 74.40%. Penggunaan anggaran disesuaikan dengan kondisi kendaraan dinas yang memerlukan perbaikan	Agar PPTK tetap mengidentifikasi kondisi kendaraan dinas agar siap pakai
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indikator out put sub kegiatan adalah Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara dengan target s.d triwulan IV sebanyak 26 unit dan terealisasi 38 unit yaitu Tenda 1 unit, printer 12 unit, Laptop 8 unit, Komputer PC 1 unit, Perahu karet 3 unit, chainsaw 5 unit, mesin babat 1 unit, Genset 1 unit, AC 6 unit, dengan persentase capaian kinerja 146,1%. Pemeliharaan peralatan disesuaikan dengan kondisi peralatan. Capaian kinerja melebihi target karena terdapat jenis peralatan yang anggarannya bisa untuk membiayai lebih dari 1 unit peralatan kantor.	Disediakan anggaran s.d triwulan IV sebesar Rp 67.790.000,- dan Realisasi keuangan Rp. 59.750.000,- atau sebesar 88.14%. Terdapat sisa anggaran yang cukup besar karena perhitungan kebutuhan material untuk perbaikan perahu karet tidak sebanyak yang direncanakan. Penggunaan anggaran disesuaikan dengan kondisi peralatan kantor yang membutuhkan perbaikan/pemeliharaan	Agar PPTK tetap mengidentifikasi kondisi peralatan kantor untukantisipasi kejadian bencana

1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indikator out put sub kegiatan adalah Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi dengan target sebanyak 2 unit dan realisasi 1 unit, capaian kinerja masih 50%. Hal ini karena dilakukan efisiensi anggaran pemeliharaan musollah setelah verifikasi dan evaluasi TAPD dengan pertimbangan adanya keterlambatan dana transfer yang berisiko kemungkinan tidak dapat terbayarkan diakhir tahun. Dan bilamana anggaran tersedia diakhir desember maka terkendala waktu pelaksanaan pekerjaan yang singkat.	Disediakan anggaran s.d triwulan IV sebesar Rp 110.010.000,- Realisasi keuangan Rp. 13.944.000 atau 12.68%. Disediakan anggaran untuk membiayai 2 unit gedung yaitu kantor BPBD dan pemeliharaan Musollah Kantor BPBD. Dan terealisasi hanya pemeliharaan kantor BPBD. Hal ini karena dilakukan efisiensi anggaran pemeliharaan musollah setelah verifikasi dan evaluasi TAPD dengan pertimbangan adanya keterlambatan dana transfer yang berisiko kemungkinan tidak dapat terbayarkan diakhir tahun. Dan bilamana anggaran tersedia diakhir desember maka terkendala waktu yang singkat sehingga tidak memungkinkan untuk dilaksanakan	Agar PPTK tetap mengidentifikasi kondisi gedung kantor dan menganggarkan kembali untuk pemeliharaan Musollah di tahun berikutnya.
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			
1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			
1	05	01	2.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah peserta sosialisasi kebencanaan dengan target 250 org. Berdasarkan anggaran kas, sub kegiatan direncanakan pada Triwulan II TA. 2024 dan terealisasi di Triwulan III & IV TA. 2024. Terdapat 2 uraian sub kegiatan yaitu Sosialisasi KIE Rawan Bencana dan telah dilaksanakan pada Bulan Juli 2024, dengan sasaran sosialisasi adalah Pelajar Tingkat SMP/SMA. Sedangkan untuk BM. Pengadaan Papan Himbauan, dilaksanakan pada bulan September 2024 dan ditempatkan di Kecamatan Wotu, Nuha dan Towuti. Dan capaian kinerja adalah 100%.	Disediakan anggaran kas Tahun 2024 kegiatan Sosialisasi KIE sebesar Rp. 116.395.070,- realisasi keuangan Rp. 114.704.611,66,- atau sebesar 98,55%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp 1.690.458,34 terdiri dari Rp 554.710 merupakan sisa belanja e-catalog dan Rp 1.119.248,334 adalah sisa SPK/Kontrak	Agar PPTK mencermati sisa belanja e-catalog pada saat perubahan anggaran.
1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			
1	05	01	2.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah warga negara termasuk golongan rentan di kawasan rawan bencana kab/kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana dengan target sebanyak 100 orang. Berdasarkan rencana aksi maka sub kegiatan ini akan dilaksanakan pada Triwulan III TA. 2024, namun baru terealisasi pada tanggal 2 s.d 3 Desember 2024 bertempat di Desa Pasi-Pasi Kec. Malili dan Kelurahan Malili, dengan jumlah peserta 100 org (di Desa Pasi-Pasi sebanyak 50 orang dan Kelurahan Malili sebanyak 50 orang) dengan sasaran masyarakat yang berada di daerah rawan bencana. Dengan capaian kinerja 100%.	Disediakan Anggaran Kas pada triwulan III sebesar Rp. 61.020.750,- dan realisasi keuangan Rp. 52.776.060,- atau sebesar 86,49 %. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp 8.244.690 terdiri dari sisa belanja e-catalog Rp 161.990, Sewa gedung kantor Rp 3.000.000 tidak terealisasi karena kegiatan dilaksanakan dikantor desa /kelurahan dan Rp 3.942.700 adalah sisa perjalanan dinas karena disediakan untuk 2 org melakukan konsultasi ke provinsi namun yang digunakan hanya 1 org sehingga ada efisiensi anggaran	Agar PPTK mencermati anggaran kas yang telah direncanakan serta pemenuhan target kinerja sesuai rencana aksi

1	05	01	2.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah sarana prasarana penanggulangan bencana yang diadakan dengan target 77 unit. Berdasarkan anggaran kas, sub kegiatan ini dianggarkan pada TW II TA. 2024, dan direncanakan pelaksanaannya setelah perubahan anggaran anggaran karena adanya perbaikan rekening belanja, namun sampai dengan akhir tahun pengadaan tersebut tidak terealisasi dan dilakukan efisiensi setelah verifikasi dan evaluasi TAPD dengan pertimbangan keterlambatan dana transfer yang berisiko tidak dapat terbayarkan diakhir tahun. Dan ketika anggaran tersedia di bulan Desember, terkendala waktu yang singkat untuk proses pengadaannya.	Disediakan Anggaran Kas pada triwulan IV sebesar Rp. 35.000.000,- dan realisasi keuangan Rp. 0,- atau sebesar 0 %,	Menjadi pertimbangan untuk dianggarkan kembali pada tahun berikutnya.
1	05	01	2.02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah desa tangguh bencana yang dibentuk, dengan target sebanyak 4 desa dan realisasi 4 desa dengan capaian kinerja 100% yaitu Desa Argomulyo Kec. Kalaena, Desa Balambano Kec. Wasuponda, Desa Laskap Kec. Malili dan Desa Puncak Indah Kec. Malili.	Disediakan Anggaran Kas pada triwulan III sebesar Rp. 57.937.060,- dan realisasi keuangan Rp. 55.699.270,- atau sebesar 96,14 %. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp 2.237.790 terdiri dari sisa belanja e-catalog Rp 258.190 dan sisa perjalanan dinas Rp 1.979.600	Agar PPTK mencermati anggaran kas yang telah direncanakan serta pemenuhan target kinerja sesuai rencana aksi
1	05	01	2.02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah Tim Reaksi Cepat yang di diklat dengan target sebanyak 50 orang, berdasarkan anggaran kas maka sub kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan III TA 2024. dan telah dilaksanakan pada tanggal 10 s.d 11 Agustus 2024 di Desa Lampia Kec. Malili dengan peserta TRC sebanyak 37 org dan jenis pelatihan yang dilakukan adalah Water Rescue. Dengan capaian kinerja 74%.	Disediakan anggaran kas sebesar Rp. 35.877.450,- realisasi keuangan Rp. 29.619.680,- atau sebesar 82,56 0%. Terdapat sisa anggaran Rp 6.257.770 karena disediakan anggaran untuk membiaya 50 org peserta namun yang terealisasi hanya 37 orang sehingga berpengaruh terhadap penggunaan anggaran lainnya misalnya makan minum peserta, pengadaan baju peserta dsb karena disesuaikan dengan jumlah peserta yang hadir.	Agar PPTK mencermati anggaran kas yang telah direncanakan serta pemenuhan target kinerja sesuai rencana aksi
1	05	01	2.02	10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah warga negara yang ikut pelatihan dengan target 250 org, sub kegiatan ini akan dilaksanakan pada Triwulan I TA. 2024 dan terealisasi pada Triwulan II TA. 2024 yaitu Bulan Mei Tahun 2024. Dengan capaian kinerja 100%. Sub kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Kerjasama BPBD dan Tim Penggerak PKK Kab. Luwu Timur. Pelaksanaan gladi/simulasi diikuti oleh Tim Penggerak PKK Kab. Luwu Timur mulai dari tingkat desa, kecamatan dan kabupaten.	Disediakan Anggaran Kas pada triwulan I sebesar Rp. 36.712.100,- dan realisasi keuangan Rp. 36.712.100,- atau sebesar 100 %	
1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			
1	05	01	2.03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Indikator output adalah Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana dengan target 100% setiap triwulan dan terealisasi 100%. Dengan perhitungan bahwa semua kejadian bencana yang terjadi pada bulan Januari s.d Desember 2024 (324 kejadian), semuanya direspon kurang dari 24 jam ketika laporan diterima dan dilakukan kaji cepat oleh TRC-BPBD	Disediakan anggaran s.d triwulan IV sebesar Rp 593.750.900,- Terealisasi sebesar Rp.574.573.790,- atau sebesar 96,77 % dari target anggaran sampai dengan Triwulan IV ,- terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 19.177.110,- atau sebesar 3,23 % dari target anggaran. Sisa anggaran yang cukup besar yaitu belanja BBM/Pelumas sifatnya disediakan untuk mengantisipasi kejadian bencana serta sisa belanja operasional TRC yang disesuaikan antara jadwal piket dan perjalanan dinas yang dilakukan oleh TRC	PPTK merampungkan laporan realisasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan

1	05	01	2.03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Indikator output adalah Persentase jumlah korban laki-laki dan perempuan berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana dengan target 100% setiap triwulan dan terealisasi 100%. Dengan perhitungan bahwa jumlah korban bencana bulan Januari s.d Desember 2024 sebanyak 996 jiwa (535 Laki-laki dan 461 Perempuan) dan semuanya diberikan layanan penyelamatan dan evakuasi	Disediakan anggaran s.d triwulan IV sebesar Rp 64.495.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 45.206.470,- atau 70,09% dari target anggaran sampai Triwulan IV. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 19.288.530,- atau 29,91% dari total anggaran sampai triwulan IV Tahun 2024. Realisasi anggaran tidak mencapai 100% karena terdapat beberapa kegiatan pencarian korban hilang tidak memerlukan waktu yang cukup lama sampai korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. sehingga belanja Makan Minum aktivitas lapangan dan belanja BBM pada sub kegiatan ini tersisa paling banyak.	PPTK merampungkan laporan realisasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan
1	05	01	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Indikator output adalah Persentase jumlah korban bencana laki-laki dan perempuan yang terfasilitasi kebutuhan dasarnya yang responsif gender dengan target 100% setiap triwulan dan terealisasi 100%. Dengan perhitungan bahwa jumlah korban bencana pada bulan Januari s.d Desember 2024 sebanyak 996 jiwa (535 Laki-laki dan 461 Perempuan) dan semuanya terlayani bantuan logistik baik itu berupa sandang pangan dan hunian sementara (tenda) bagi yang memenuhi syarat untuk diberikan bantuan.	Disediakan anggaran s.d triwulan IV sebesar Rp. 95.141.600,- dengan realisasi sebesar Rp. 82.482.591,- atau 86,69% dari target anggaran sampai pada triwulan IV. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 12.659.009,-. Realisasi anggaran tidak mencapai 100 % karena terdapat Belanja Pengiriman dan Belanja Sewa Mobilitas darat yang tidak digunakan (Bantuan dari BPBD Provinsi diantar langsung ke keseluruhan BPBD Kab/Kota penerima).	PPTK merampungkan laporan realisasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan
1	05	01	2.03	05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Indikator Output adalah Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana dengan target 100% setiap triwulan dan terealisasi 100%. Dengan perhitungan bahwa koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana pada bulan Januari s.d Desember 2024 sebanyak 40 personil dan semuanya aktif dalam penanggulangan bencana	Disediakan anggaran pada triwulan IV sebesar Rp 9.355.040,- Namun realisasi keuangan sampai pada triwulan IV adalah Rp. 0,-, hal ini disebabkan karena anggaran sifatnya disediakan dan tidak terdapat kejadian bencana yang membutuhkan aktivasi sistem komando penanganan darurat.	PPTK merampungkan laporan realisasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan
1	05	01	2.03	06	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Indikator output adalah Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status kejadian luar biasa wabah penyakit dengan target 100% setiap triwulan dan terealisasi 100%. Dengan perhitungan bahwa bencana non alam yang ditangani oleh BPBD terkait giat pemulsaan jenazah covid-19, semuanya direspon kurang dari 24 jam. pada periode Triwulan IV tidak ada laporan Masyarakat yang terkonfirmasi covid-19 (meninggal) atau akibat pandemi lain dan akibat gagal teknologi yang diterima oleh TRC BPBD.	Dan disediakan anggaran s.d triwulan IV sebesar Rp 9.965.600,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 0,- hal ini disebabkan karena sampai dengan triwulan IV tahun 2024 tidak ada kejadian akibat Covid 19 dan bencana wabah penyakit lainnya atau kejadian bencana akibat gagal teknologi.	PPTK merampungkan laporan realisasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan
1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			
1	05	03	2.04	01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Indikator Sub Kegiatan adalah Jumlah regulasi penanggulangan bencana Kabupaten/Kota yang disusun sebanyak 3 dokumen. dan terealisasi hanya 1 dokumen (SOP tentang Bantuan Sosial Pemulihan Pasca Bencana Sektor Perumahan). dengan capaian kinerja 33,33%. Berdasarkan anggaran kas, sub kegiatan ini direncanakan pada triwulan III TA. 2024. Direncanakan penyusunan Perbup RPB, KRB dan SOP. Dan yang realisasi hanya SOP sedangkan Perbup RPB dan KRB masih dalam bentuk draft karena rekomendasi akhir terkait dokumen tersebut baru terbit diakhir November 2024.	Disediakan anggaran kas s.d triwulan IV sebesar Rp. 18.139.860,- dan realisasi 0%.	Agar PPTK mencermati anggaran kas yang telah direncanakan serta pemenuhan target kinerja sesuai rencana aksi

1	05	03	2.04	02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Indikator Sub Kegiatan adalah Jumlah Forum PRB yang dibentuk dan difasilitasi sebanyak 1 Forum. Berdasarkan anggaran kas, sub kegiatan direncanakan pada Triwulan II & III TA. 2024. Sub kegiatan ini memfasilitasi pengembangan kapasitas forum PRB dan Pelaksanaan Penilaian Indeks Ketahanan Daerah.	Disediakan anggaran kas s.d triwulan IV sebesar Rp. 65.223.580,- dan realisasi keuangan Rp. 23.322.390 atau sebesar 35.76%. Terdapat sisa anggaran yang cukup besar karena adanya efisiensi untuk pelaksanaan sosialisasi IKD sehingga pelaksanaan Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) langsung pada pelaksanaan FGD IKD. Selain itu sub kegiatan ini juga untuk membiayai Pengembangan kapasitas Forum PRB, namun tertunda pelaksanaannya terkendala adanya perbaikan struktur anggota forum sehingga SK Forum baru selesai di Bulan Desember sehingga waktu tidak memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan forum PRB	Agar PPTK mencermati anggaran kas yang telah direncanakan serta percepatan pelaksanaan kegiatan
1	05	01	2.02	07	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Target output sub kegiatan pada triwulan IV yaitu tersusunnya dokumen Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana sebanyak 1 dokumen setiap triwulannya dan terealisasi 100%.	Disediakan Anggaran kas sampai dengan TW IV Tahun 2024 sebesar Rp 8.085.246.520 dan terealisasi Rp 96.702.866 (1.20%), terdapat sisa anggaran yang sangat besar, terdiri dari Belanja Makan Minum Rapat Rp 8.000.000, tidak terealisasi karena kegiatan koordinasi penanggulangan pascabencana banyak dilakukan di Desa dan Kecamatan yang terdampak serta koordinasi dengan OPD terkait. Dan Belanja Dana Hibah Rehabilitasi & Rekonstruksi sebesar Rp 7.979.000.000 yaitu Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa, serta Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam. Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena waktu yang tersedia sudah tidak memungkinkan lagi untuk melakukan proses PBJ disebabkan karena penetapan SPPH Tgl 30 Oktober 2024 dan Penyaluran Dana Hibah RR dari Kementerian Keuangan pada Tanggal 23 Desember 2024. Dan kegiatan tersebut telah dimasukkan kembali pada penganggaran tahun 2025.	PPTK untuk memastikan penganggaran Dana Hibah untuk Tahun 2025

3.4. Strategi dan Kebijakan dalam Pencapaian Kinerja Sasaran OPD

Dalam pencapaian kinerja sasaran yang telah diperjanjikan oleh Kepala OPD, terdapat beberapa kebijakan strategis yang dilakukan pada Tahun 2024 yaitu :

1. Menetapkan SK Kepala Pelaksana BPBD Nomor 13 Tahun 2024 tentang Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Kencang Tahun 2024. Berdasarkan data kejadian bencana BPBD Triwulan I Tahun 2024, menyebutkan telah terjadi 78 kejadian bencana yang di dominasi oleh kejadian bencana angin kencang, banjir akibat curah hujan tinggi sehingga menjadi dasar untuk ditetapkan Status Siaga Bencana.
2. Penetapan SK Bupati Luwu Timur Nomor : 421/F-01/XII/Tahun 2024 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Alam Angin Kencang, Banjir, Tanah Longsor, dan Abrasi di Kabupaten Luwu Timur. SK tersebut dibuat sebagai Upaya untuk mengantisipasi potensi kerawanan terjadinya

bencana sesuai dengan analisa data prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), dimana cuaca atau kondisi alam sangat ekstrim yang berpotensi terjadinya bencana alam Hidrometeorologi Basah, yang dapat menyebabkan korban jiwa, kerugian ekonomi, kerusakan harta benda, fasilitas umum dan fasilitas pemerintah.

3. Penyebarluasan informasi kebencanaan melalui Media Sosial (Facebook, WAG, Instagram Pusdalops BPBD)
4. Penerapan Aplikasi SIAGA BENCANA untuk percepatan Pelayanan Pasca Bencana Penyaluran Dana BTT untuk korban bencana.
5. Pembentukan Group WA “PEDULI DESA” untuk mempermudah pelaporan kejadian bencana di Wilayah Kabupaten Luwu Timur, dimana group tersebut beranggotakan seluruh kepala desa dengan tujuan untuk mempermudah koordinasi sebagai upaya untuk percepatan penanganan bencana sampai ditingkat desa.

3.5. Pencapaian Kinerja mempengaruhi Budaya Kerja Organisasi

Budaya kerja merupakan bagian penting dalam suatu organisasi sebab suatu organisasi mungkin tidak akan berjalan baik, tanpa didasari dengan budaya kerja yang jelas. Oleh suatu organisasi, budaya kerja merupakan perihal wajib untuk dipertimbangkan sebab hal tersebut terkait dengan interaksi antara pegawai satu dengan yang lain. Hal tersebut pun berkontribusi besar akan kinerja dan kesuksesan suatu organisasi. Kuatnya budaya kerja nampak dari bagaimana pegawai memandang budaya kerja sehingga berpengaruh terhadap perilaku yang digambarkan memiliki motivasi, dedikasi, kreativitas, kemampuan dan komitmen yang tinggi. Semakin kuat budaya kerja, semakin baik produktivitas yang dihasilkan pegawai. Dan pada akhirnya akan memberikan kepuasan kepada masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan para aparatur negara.

Budaya Kerja merupakan suatu sikap mental yang selalu mencari perbaikan atau penyempurnaan apa yang telah dicapai. Sebagai abdi masyarakat posisi pegawai negeri sipil, sebagai mesin birokrasi dituntut untuk bekerja secara efektif dan efisien dalam rangka memaksimalkan fungsi organisasi pemerintah. Selain tuntutan diatas tanggungjawab yang lain adalah menjaga serta memperbaiki citra para pegawai dimata masyarakat, karena sering dianggap sebagai pegawai yang tidak memiliki inovasi kerja yang tinggi sehingga kinerja organisasi dinilai kurang optimal.

Pelaksanaan budaya kerja aparatur Negara dengan nilai-nilai yang seharusnya merupakan langkah awal yang sebaiknya dipilih dalam upaya melakukan Reformasi birokrasi secara keseluruhan, sehingga dapat menjadi birokrasi yang efisien dan efektif

dengan aparatur yang bersih, transparan, dan professional dalam menjalankan tugasnya.

Dalam hal pencapaian kinerja sasaran OPD dapat mempengaruhi budaya kerja organisasi hal ini dapat terlihat dari beberapa hal seperti :

- a. Pencapaian target kinerja Sasaran Strategis yaitu Meningkatnya Ketahanan Daerah Menghadapi Bencana dengan Indikator “Indeks Ketahanan Daerah (IKD)” pada triwulan I s.d III Tahun 2024, masih di angka 0,60 dari target 0,61. Dan sesuai dengan penjelasan diatas bahwa “Budaya Kerja adalah mencari perbaikan atau penyempurnaan atas apa yang telah dicapai” maka menjadi tanggung jawab ASN BPBD berkomitmen untuk bagaimana mencapai target yang direncanakan. Dan pada akhirnya dengan Metode Pelaksanaan Forum Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan pada Bulan November 2024, dengan melibatkan seluruh OPD terkait, Instansi Vertikal dan Dunia Usaha, melalui pendampingan Fasilitator Nasional. Dalam pelaksanaan Penilaian IKD tersebut terdapat kendala terkait pengumpulan bukti dukung (evidence) dari OPD terkait, sehingga diperlukan upaya untuk berkoordinasi dan berkolaborasi antar OPD untuk pemenuhannya. Dan hasilnya adalah Nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dapat dicapai di angka 0,65 dengan predikat Sedang. Dan capaian ini melebihi dari target kinerja yang direncanakan.
- b. Pencapaian target kinerja Sasaran Strategis yaitu Meningkatnya Layanan SPM Sub Urusan Bencana dengan Indikator “Indeks Capaian SPM Sub Urusan Bencana pada Tahun 2024 sudah mencapai 100%. Bilamana pengukuran capaian SPM hanya berdasarkan anggaran yang tersedia melalui DPA-SKPD BPBD TA. 2024, maka sangat berat untuk memenuhi target yang telah ditetapkan. Namun dengan upaya maksimal yang dilakukan oleh BPBD untuk berkoordinasi lintas sektoral dan berkolaborasi maka SPM tersebut dapat terpenuhi.
- c. **Hubungan Budaya Kerja “BERAKHLAK” terhadap pencapaian kinerja yaitu :**
 - Berorientasi Pelayanan
Berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dengan memahami dan memenuhi kebutuhan Masyarakat. Hal ini dapat terlihat dari pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana serta pemberian bantuan logistik untuk korban bencana dan hal ini juga berkaitan dengan Tupoksi BPBD.
 - Akuntabel
Mengemban amanat dan kepercayaan yang diberikan dengan penuh tanggung jawab. Hal ini dapat dilihat dengan tidak adanya penyalahgunaan kewenangan jabatan, menolak bentuk gratifikasi dalam melakukan pelayanan

kemanusiaan untuk korban bencana. Membantu korban bencana dengan Ikhlas dan penuh tanggungjawab.

➤ **Kompeten**

Meningkatkan diri dengan terus belajar. Hal ini dapat terlihat dari kegiatan yang telah dilaksanakan misalnya peningkatan kapasitas bagi TRC-BPBD, keikutsertaan dalam berbagai diklat teknis kebencanaan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial bagi Tim penanggulangan bencana.

➤ **Harmonis**

ASN menghargai setiap orang, menolong orang lain, dan membangun lingkungan kerja yang kondusif. Hal ini dapat terlihat dari pelayanan kemanusiaan yang diberikan untuk menolong korban bencana. Hal lainnya adalah berinteraksi dengan rekan kerja, atasan dan bawahan dengan sopan dan menjunjung tinggi etika terbukti dalam pelaksanaan Rapat Monev Internal lingkup OPD.

➤ **Loyal**

Berdedikasi tinggi terhadap kepentingan bangsa dan negara. Hal ini dapat terlihat dari perilaku bersikap dan berperilaku yang melindungi nama baik serta citra instansi/OPD.

➤ **Adaptif**

ASN cepat menyesuaikan diri dengan perubahan, mengembangkan inovasi dan kreatifitas, serta proaktif. Hal ini dapat terlihat dengan adanya pengembangan Inovasi di BPBD seperti Penerapan Aplikasi SIAGA Bencana, PEDULI DESA yang merupakan upaya untuk percepatan penanganan bencana di Kabupaten Luwu Timur.

➤ **Kolaboratif**

Saling bersinergi dan bekerja sama, terlihat dengan adanya keterlibatan OPD terkait, Instansi Vertikal, Dunia Usaha dan Masyarakat dalam penanggulangan bencana. Ini berarti bahwa memberi kesempatan berbagai pihak untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Luwu Timur. Hal lainnya adalah melakukan Kerjasama melalui Perjanjian Kerjasama lintas OPD terkait dan Vertikal dalam penanganan bencana, misalnya Kerjasama BPBD dengan BMKG Wilayah IV Makassar tentang Pemanfaatan Informasi di Bidang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika dalam Rangka Penanggulangan Bencana di Kabupaten Luwu Timur. Kerjasama BPBD dengan Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan untuk pemenuhan Cadangan pangan untuk korban bencana dsb.



BAB 4

PENUTUP

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Luwu Timur telah menetapkan 2 (dua) sasaran strategis dan 1 sasaran pendukung yang didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, serta Rencana Strategis (Renstra) BPBD Tahun 2021-2026.

Secara umum hasil pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam pencapaian sasaran pada Tahun 2024, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Realisasi Anggaran berdasarkan APBD Perubahan Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 4.536.592.284,- (89,36%) yang terdiri dari Belanja Pegawai Rp. 1.908.116.436,50,- (95,63%) dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 1.919.407.096,- (83,61%) dan Belanja Modal Rp 709.068.751,66,- (90,27%).
- b. Realisasi anggaran berdasarkan Pergeseran Pertama Setelah Perubahan Anggaran Tahun 2024 sebesar 34,75%.
- c. Dan dilakukan Pergeseran Tahap Pertama Setelah Perubahan Anggaran pada tanggal 13 Desember 2024 untuk mengakomodir Dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sebesar **Rp 7.979.000.000,-**. Dana tersebut bersumber dari Kementerian Keuangan. Dana Hibah tersebut diperuntukkan untuk Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa, serta Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam dan tidak dapat dilaksanakan karena waktu yang tersedia sudah tidak memungkinkan lagi untuk melaksanakan proses PBJ disebabkan karena penetapan SPPH tertanggal 30 Oktober 2024 dan Penyaluran Dana Hibah RR dari Kementerian Keuangan ke Pemerintah Daerah pada tanggal 23 Desember 2024.
- d. Persentase Capaian Kinerja sasaran strategis I dengan indikator Indeks Ketahanan Daerah yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan bencana Daerah Tahun 2024 sebesar **106,55%** dengan **predikat BAIK**.
- e. Persentase Capaian Kinerja sasaran strategis II yaitu Indeks Capaian SPM Sub Urusan Bencana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan bencana Daerah Target Tahun 2024 sebesar **100%** dengan realisasi **100% predikat Baik**

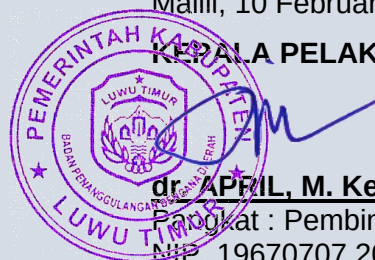
- f. Persentase Capaian Kinerja sasaran III (sasaran pendukung) yaitu Nilai SAKIP Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan bencana Daerah Tahun 2024 sebesar **100,2%**, dengan **predikat BAIK**.
- g. Persentase Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana berdasarkan jenis pelayanan dasar yaitu :
- Pelayanan Informasi Rawan Bencana : 100%
 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana : 100%
 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana : 100%
- h. Faktor yang menjadi penghambat pencapaian kinerja Tahun 2024 terhadap beberapa target sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Luwu Timur yaitu :
- Pelaksanaan program/kegiatan tidak sesuai rencana aksi dan anggaran kas yang telah ditetapkan
 - Keterlambatan proses pengadaan melalui E-Catalog
 - Pengolahan data dan informasi pada lingkup bidang yang belum maksimal
 - Terdapat beberapa kegiatan yang sifatnya disediakan sehingga penggunaan anggarannya disesuaikan dengan kondisi atau kejadian bencana
 - Terdapat perbedaan persepsi terkait penetapan target triwulanan dan tahunan pada saat penginputan aplikasi SPM Sub Urusan Bencana sehingga terjadi perubahan target.
 - Terdapat perubahan rekening belanja pada beberapa sub kegiatan sehingga pelaksanaannya menunggu perubahan anggaran.
- i. Strategi dan Kebijakan yang dilakukan dalam Pencapaian Target Kinerja OPD sampai dengan Tahun 2024 yaitu :
- Untuk Pemenuhan SPM Sub Urusan Bencana pada Layanan Informasi Rawan Bencana yaitu dengan memaksimalkan Penyebarluasan Informasi Kebencanaan melalui media sosial dan penempatan papan himbauan peringatan dini bencana di daerah rawan bencana.
 - Memaksimalkan koordinasi lingkup OPD, Dunia Usaha dan Masyarakat untuk pelaksanaan kegiatan kebencanaan misalnya melalui pelaksanaan Mitigasi dan Edukasi misalnya Baznas Tanggap Bencana, Pelatihan Mitigasi Bencana oleh Karang Taruna Kab. Luwu Timur, pemangkasan pohon yang berpotensi mengancam keselamatan jiwa manusia sebagai upaya Mitigasi dan Pencegahan.
 - Mitigasi Bencana Banjir melalui Pembersihan Sungai

- Memfasilitasi kegiatan kebencanaan yang dilaksanakan di sekolah-sekolah dengan berpartisipasi sebagai Narasumber.
 - Pengajuan Proposal Peralatan dan Logistik Korban Bencana ke BNPB melalui BPBD Provinsi Sulawesi Selatan.
- j. Adapun rekomendasi terkait peningkatan kinerja di masa mendatang yang perlu ditindaklanjuti oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Luwu Timur adalah sebagai berikut :
- Pelaksanaan program/kegiatan sesuai rencana aksi
 - Percepatan proses pengadaan melalui E-Catalog
 - Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap perjanjian kinerja secara berjenjang di tingkat SKPD
 - Meningkatkan peran serta masyarakat, swasta, organisasi masyarakat, dan lembaga-lembaga pemerhati lingkungan dalam rangka penanggulangan bencana dalam rangka pencapaian SPM Sub Urusan Bencana
 - Memaksimalkan penyebaran informasi kebencanaan melalui media sosial
 - Memaksimalkan pengolahan data dan informasi lingkup OPD
 - Mencermati /kegiatan yang sifatnya disediakan untuk mengatisipasi SILPA program diakhir tahun
 - Memprioritaskan program/kegiatan pengampuh Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penanggulangan Bencana
 - Mencermati penetapan target tahunan dan triwulanan SPM
 - Meningkatkan koordinasi lintas sektoral terkait penanggulangan bencana.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Tahun 2024 ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak terkait pelaksanaan tugas pokok & fungsi BPBD Kabupaten Luwu Timur, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja organisasi terhadap perkembangan tuntutan stakeholders, sehingga kontribusi BPBD dalam pembangunan dapat lebih dirasakan manfaatnya.

Malili, 10 Februari 2025

KEPALA PELAKSANA,



dr. APRIL, M. Kes

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19670707 200012 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Alamat Jl. DR. Sam Ratulangi Desa Puncak Indah Kec. Malili, 92981

E-mail :bpbdkabluwutimur@gmail.com

TINDAK LANJUT LHE AKIP INTERNAL TAHUN 2024

***Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah***

No.	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak lanjut	Penanggung jawab	Status/Progres Penyelesaian	Link Data Dukung
1	2	3	4	5	6
1.	Agar seluruh pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyusun SKP tepat waktu dan sesuai ketentuan dan memahami hasil pengukuran kinerja	Telah dilakukan penyampaian melalui persuratan terkait Penyusunan SKP kepada masing-masing ASN yang bersangkutan untuk segera ditindaklanjuti (dokumen terlampir).	Sekretaris	Selesai	https://drive.google.com/file/d/1QgEqEn6qYt65aQnvSwZaden6V2XYGF7H/view?usp=sharing
2.	Agar memaksimalkan hasil evaluasi akuntabilitas internal untuk peningkatan kinerja, juga sebagai pendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.	Untuk memaksimalkan hasil evaluasi internal demi peningkatan kinerja , efektifitas , dan efisiensi, maka upaya yang dilakukan adalah fokus pada perbaikan sistem evaluasi, pengembangan SDM, dan pemanfaatan data evaluasi untuk merumuskan tindakan perbaikan. Dan secara detil. langkah-langkah yang ditempuh adalah : Untuk peningkatan kualitas evaluasi yaitu dengan membentuk Tim Evaluasi Internal Lingkup OPD sesuai dengan SK Kepala Pelaksana No. 12.a Tahun 2024 ttg Pembentukan Tim Evaluasi Evaluasi Kinerja BPBD Tahun 2024 . Selanjutnya adalah peran pimpinan/keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan evaluasi kinerja. Dan hal tersebut telah dilaksanakan, Dimana rapat evaluasi internal OPD dipimpin langsung oleh Kepala OPD (Surat undangan Monev, Daftar hadir dan dokumentasi). Langkah selanjutnya adalah Pembinaan Budaya Akuntabilitas, dimana setiap ASN bertanggungjawab atas kinerjanya. Hal tersebut tertuang dalam Penyusunan Perjanjian Kinerja oleh masing-	Kepala OPD	Selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1b4IOUNUqOr6TXEmjPSQDZ5_pnbdat-v?usp=sharing

		masing ASN sesuai tupoksinya (Dokumen PK Eselon II, III & IV Tahun 2024). Langkah selanjutnya adalah Pemanfaatan hasil evaluasi untuk perbaikan. Hal ini dibuktikan dengan Perbandingan Capaian Kinerja eselon II yaitu Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dan Capaian SPM Tahun 2024 yang jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya terus mengalami peningkatan. Misalnya Nilai IKD Tahun 2023 = 0,60 (sedang) dan Nilai IKD Tahun 2024 = 0,65 (sedang). Begitu juga Capaian SPM Tahun 2023 = 97,72 sedangkan Tahun 2024 = 100% (Perbandingan Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun sebelumnya, BAB III, Akuntabilitas Kinerja pada LAPKIN BPBD Tahun 2024).			
--	--	---	--	--	--

Malili, 18 Maret 2025
KEPALA PELAKSANA,

dr. APRIL, M.Kes
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19670707 200012 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Alamat Jl. Dr. Sam Ratulangi Desa Puncak Indah Kec. Malili, 92981

E-mail :bpbdkabluwutimur@gmail.com

TINDAK LANJUT LHE KEMENPAN-RB TAHUN 2024
Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak lanjut	Penanggung jawab	Status/Progres Penyelesaian	Link Data Dukung
1	2	3	4	5	6
1.	Mereviu kembali perencanaan kinerja pada tingkat PD secara menyeluruh untuk memastikan seluruh sasaran strategis berorientasi hasil (outcome) dengan indikator kinerja yang SMART dan cukup sehingga dapat menjawab kinerja utama PD.	Telah dilakukan reviu perencanaan kinerja dan dipastikan bahwa sasaran strategi BPBD telah berorientasi hasil (outcome) dengan indikator yang SMART. Sasaran Strategis BPBD adalah Meningkatnya Ketahanan Daerah Menghadapi Bencana dengan Indikator Kinerja : Indeks Ketahanan Daerah (IKD). Sasaran tersebut mengacu kepada sasaran strategis Kepala Daerah yaitu Menurunkan Risiko Bencana Daerah dengan Indikator Indeks Risiko Bencana (IRB). Jika IKD naik maka Nilai IRB akan menurun. (Dokumen Renstra & IKU BPBD 2021-2026)	Kepala OPD	Selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1FCJleOy_WvkWX5j32FPDsx2i6qBFi0JP?usp=sharing
2.	Menyempurnakan penjenjangan kinerja seluruh PD dan memastikan penjenjangan kinerja telah mampu mengidentifikasi kinerja crosscutting. Hal ini untuk memastikan koordinasi antar PD sehingga mampu mendorong peningkatan capaian kinerja.	Bahwa penjenjangan kinerja telah mengidentifikasi kinerja Crosscutting didalamnya sehingga terlihat koordinasi antar PD dalam pencapaian kinerja. (Pohon Kinerja BPBD 2021-2026 dan Penjelasan Crosscutting Lintas OPD)	Kepala OPD	Selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1IVVw90HerDPGjpARjEnKvfPkABwHO3GH?usp=sharing
3.	Memastikan setiap indikator kinerja yang ditetapkan diikuti dengan definisi operasional dan formulasi perhitungan serta sumber data yang jelas dan relevan. Hal ini untuk memastikan pengukuran kinerja yang dilakukan telah disertai dengan data yang relevan atau menggambarkan kondisi yang ingin dicapai sehingga data kinerja yang dihasilkan dari pengukuran kinerja dapat diandalkan.	Bahwa setiap indikator kinerja telah dilengkapi dengan definisi operasional dan formulasi perhitungan sebagaimana tertuang dalam Dokumen Renstra dan Perjanjian Kinerja Eselon II, III & IV Tahun 2024 dan 2025.	Kepala OPD	Selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1hOpP8iZpnzMqS0WuzZSTOqATKr9oSLhQ?usp=sharing
4.	Agar terus meningkatkan kualitas laporan kinerja pada tingkat PD dan melengkapi perbandingan capaian kinerja baik tingkat Pemda maupun PD terhadap daerah lain atau nasional yang dapat dibandingkan. Hal ini untuk melihat kemajuan Pembangunan daerah secara regional atau nasional.	Bahwa dalam Dokumen Laporan Kinerja BPBD Tahun 2024, telah memuat perbandingan capaian kinerja terhadap daerah lain/provinsi yang dapat dilihat pada Indikator Indeks Ketahanan Daerah (IKD). Sedangkan terhadap nasional yaitu Indeks Capaian SPM Sub Urusan Bencana, Dimana target nasional adalah 100% setiap tahun. (BAB III, Akuntabilitas Kinerja, hal.23,24 & 39 LAPKIN BPBD Tahun 2024).	Kepala OPD	Selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1gjHZrPHXyNR4BxKEwRhNsoH0oYDXtygP?usp=sharing

5.	Agar terus mengoptimalkan pemanfaatan informasi dalam laporan kinerja sebagai bahan masukan dalam perencanaan kinerja selanjutnya baik dalam penentuan target agar lebih menantang dan realistis maupun dalam penentuan strategi yang akan diputuskan agar lebih tepat dalam mendorong kinerja yang telah ditetapkan.	Telah dilakukan optimalisasi pemanfaatan informasi dalam laporan kinerja untuk perencanaan kinerja selanjutnya. Hal ini dibuktikan dengan penentuan target setiap tahunnya mengacu kepada realisasi tahun sebelumnya atau lebih tinggi dari tahun sebelumnya. (Dapat dilihat pada Dokumen PK Eselon II Tahun 2025 dan Matriks Sandingan Renstra & PK Tahun 2025).	Kepala OPD	Selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1-8AIJ9uJJrEK Cwxd3RV89j2DrYSPHSg7?usp=sharing
6.	Meningkatkan kualitas evaluasi internal terhadap PD dengan memastikan bahwa tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi tidak hanya memperbaiki dokumen perencanaan, namun mampu mendorong perbaikan pada pelaksanaan program dan kegiatan PD.	Bahwa Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP BPBD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 telah ditindaklanjuti oleh OPD dan terlampir pada Dokumen Laporan Kinerja BPBD Tahun 2024. (Matriks Tindak Lanjut LHE AKIP Internal Tahun 2024)	Kepala OPD	Selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1QpEV9rggM9Jk7nOkyVsk4tuU-7PkcVr7?usp=sharing

Makli, 18 Maret 2025
KEPALA PELAKSANA,

dr. APRIL M. Kes
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. : 19670707 200012 1 002